

**KAPITA SELEKTA  
HUBUNGAN  
INTERNASIONAL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA  
SANKSI PELANGGARAN**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

**Dr. Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si.**  
**Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si.**

# **KAPITA SELEKTA HUBUNGAN INTERNASIONAL**



**PENERBIT ALFABETA BANDUNG**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

### **©2016, Penerbit Alfabeta, Bandung**

HI01 (xvi + 206) 14,5 x 20,5 cm

Judul Buku : Kapita Selekta Hubungan Internasional

Penulis : Dr. Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si.  
Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si.

Penerbit : **ALFABETA**, cv  
Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373  
Email: [alfabetabdg@yahoo.co.id](mailto:alfabetabdg@yahoo.co.id)  
Website: [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)

Cetakan Kesatu : Januari 2016

ISBN : 978-602-289-166-6

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

## PENGANTAR PENULIS

---

Seiring bergulirnya gerakan reformasi yang mencapai klimaksnya pada tanggal 21 Mei 1998, ditandai dengan lengsernya kekuasaan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, telah menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia internasional. Rentetan peristiwa yang terjadi pasca lahirnya reformasi membuat Indonesia semakin terekspose dalam pemberitaan media massa internasional sehingga memalingkan perhatian masyarakat dunia untuk menoleh negeri yang mayoritas rakyatnya beragama muslim ini.

Serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia, namun berdimensi global dan berdampak internasional ini adalah: *pertama*, lepasnya Timor-Timur dari pangkuan ibu pertiwi pada tahun 1999 melalui jajak pendapat yang di fasilitasi oleh PBB. Berdirinya Timor Leste sebagai sebuah negara baru lepas dari NKRI menempatkan Indonesia menjadi perhatian publik internasional karena saat itu juga di Timor Leste masuk berbagai organisasi internasional di bawah naungan PBB, seperti Pasukan INTERFET dan UNAMET. Belum lagi sisa-sisa masalah yang berasal dari efek hasil jajak pendapat yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai pihak yang selalu dituduh telah melakukan pelanggaran HAM di Timor Leste

sehingga, ketika itu, diancam untuk dibawa ke mahkamah internasional (*international tribunal*).

*Kedua*, maraknya gerakan separatisme dan fenomena disintegrasi bangsa, mulai dari Aceh, Papua, dan Maluku yang menguat kembali tahun 1999. Adanya sinyalemen bahwa berbagai gerakan separatisme di Indonesia memiliki keterkaitan dengan negara-negara asing menjadikan Indonesia semakin menjadi perbincangan masyarakat internasional. Ditambah lagi dengan awal reformasi yang diwarnai dengan adanya konflik, kekerasan, dan kerusuhan yang berbau SARA sehingga menjadikan berbagai lembaga asing dan masyarakat dunia menaruh perhatian lebih terhadap Indonesia.

*Ketiga*, tragedi Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali, yang telah menewaskan lebih dari 300 orang, yang sebagian besar warga negara asing, khususnya Australia, membuat citra Indonesia semakin memburuk di kancah politik internasional. Setelah tragedi Bom Bali I ini kemudian disusul dengan Bom Bali II (2005), dan berbagai aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Solo, Malang, dan lain-lain. Tuduhan bahwa Indonesia sebagai sarang teroris semakin mengkrystal dalam benak masyarakat internasional. Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) mulai dikaitkan dengan Abu Bakar Ba'syir sebagai sel dari Al Qaeda dan mempunyai jaringan di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Philipina.

*Keempat*, bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004, dengan korban meninggal lebih dari 100.000 jiwa telah mengejutkan dunia internasional akan dahsyatnya bencana yang terjadi di kawasan Asia ini. Digelarnya KTT Tsunami di Jakarta dilanjutkan dengan berlalu lalanganya para pemimpin negara ke Aceh

membuktikan bahwa Indonesia semakin populer dalam kancah politik internasional. Nama “Indonesia” mulai tidak asing lagi di pelosok-pelosok dunia, dari kutub utara sampai dengan kutub selatan.

*Kelima*, era reformasi yang telah mengantarkan bangsa Indonesia dari bangsa yang otoriter pada masa Orde Baru menjadi bangsa yang demokratis di masa reformasi dengan memegang teguh penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, supremasi sipil, dan hukum sebagai panglima, telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi raksasa di Asia dan di dunia. Indonesia mampu membuktikan kepada dunia internasional bahwa negara yang mayoritas muslim dan merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan, melalui sistem politik demokratis, Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dalam aspek pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Melalui politik luar negeri yang bebas aktif yang diperankan oleh Presiden SBY, ketika itu, melalui prinsip “*a thousand friends and zero enemy*”, maka posisi Indonesia di mata internasional saat ini sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik internasional.

Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dengan dimensi global tersebut memiliki konsekuensi pada semakin banyaknya media massa, baik media cetak, media elektronik, media on line, dan media sosial (*facebook, twitter, path, instagram*), yang memberitakan dan menayangkan informasi dan berita yang bersifat lokal dan nasional, tetapi berdimensi dan terkait dengan dinamika regional dan global. Fenomena yang demikian tentunya patut untuk dikembangkan dan diberikan apresiasi mengingat nama Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat internasional.

Selain berkonsekuensi pada liputan media massa, juga berimplikasi akademis dalam konteks disiplin Ilmu Hubungan Internasional, yakni semakin banyak peminat masyarakat, khususnya siswa-siswa sekolah yang ingin melanjutkan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di berbagai perguruan tinggi yang ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Peningkatan minat studi hubungan internasional di era reformasi saat ini didorong pula oleh adanya arus globalisasi, pasar bebas, perdagangan bebas, perkembangan teknologi informasi, dan semakin meningkatnya mobilitas manusia, barang, dan jasa antar negara sehingga banyak masyarakat yang terdorong untuk memahami konteks global dan regional dari setiap permasalahan nasional dan lokal.

Namun demikian, bertambahnya peminat publik terhadap studi Hubungan Internasional tidak diimbangi dengan literatur-literatur hubungan internasional yang bersifat *text book* yang asli ditulis oleh orang yang berasal dari Indonesia sendiri. Artinya, masih terbatas buku-buku teks hubungan internasional yang dikarang oleh ilmuwan hubungan internasional yang berasal dari Indonesia. Sejauh pengamatan penulis, kebanyakan buku-buku teks dalam hubungan internasional merupakan buku yang ditulis oleh ilmuwan asing, khususnya dari negara-negara Barat. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi penulis dan menimbulkan motivasi dan semangat untuk menulis buku ini.

Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut, penulis memberanikan diri untuk menulis buku ini. Pada awalnya, buku ini adalah kumpulan catatan-catatan kecil yang dijadikan *hand out* oleh penulis dalam mengajar mata kuliah “Kapita Selekta Hubungan Internasional”, di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi. Dalam perkembangannya, *hand out* ini kemudian

“didesain” menjadi sebuah diktat kuliah yang menjadi pedoman dan pegangan bagi para mahasiswa selama penulis mengajar mata kuliah “Kapita Selekta Hubungan Internasional”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Sutejo Atmowasito, yang merupakan guru sekaligus sudah saya anggap sebagai “orang tua”, yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman kehidupan, dan motivasi tinggi dalam meniti karier dan kehidupan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat, saudara, dan sudah saya anggap sebagai keluarga, Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si. yang telah bersama-sama berjuang dalam suka maupun duka dalam mencari rezeki dan menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, penulis juga banyak mengucapkan terimakasih kepada komunitas saya, yang dikenal di Unjani dengan nama “empat sekawan”, yakni: Ir. Febrianto Adinugroho, M.M. (Wakil Rektor II Unjani), Susanto Sambasri, S.T., M.T. (Dekan Fakultas Teknik Unjani), dan Hernandi Sujono, S.Si., M.Si. (Dekan Fakultas MIPA Unjani), yang telah banyak sekali memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis untuk terus berkarya dalam dunia akademik.

Kepada para mahasiswa yang pernah menjadi peserta mata kuliah “Kapita Selekta Hubungan Internasional”, penulis mengucapkan terimakasih atas segala masukan, pertanyaan, dan “*sharing knowledge*” yang selama ini berlangsung di kelas, meskipun anda semuanya telah penulis jadikan sebagai “kelinci percobaan” dalam menguji validitas dan reliabilitas materi yang terdapat dalam naskah buku ini. Dalam pandangan penulis, anda semua adalah mahasiswa yang pintar, cerdas dan berpotensi, sehingga menjadi

penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, berbagai masukan, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan, penyempurnaan, dan pengayaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa, penstudi dan peminat masalah-masalah hubungan internasional. Terimakasih.

Cimahi, Januari 2016

Syarifudin Tippe  
Agus Subagyo (AS)

# DAFTAR ISI

Pengantar Penulis .....	v
Daftar Isi.....	xi

## **BAB I**

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
-------------------------	----------

## **BAB II**

<b>DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>8</b>
--	----------

A. Mengkerangkai Demokrasi .....	10
B. Hubungan Antara Demokrasi dan Pemilu .....	17
C. Pendekatan-pendekatan dalam Demokrasi .....	18
D. Sebab-sebab Munculnya Demokrasi.....	20
1. Struktur Sosial dan Demokrasi .....	21
2. Kapital dan Demokrasi.....	22
3. Elit Politik dan Demokrasi.....	23
4. Budaya Politik dan Demokrasi .....	23
5. Transisi dan Demokrasi .....	23
E. Demokrasi dan Politik Luar Negeri .....	24

## **BAB III**

<b>HAM DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>28</b>
--	-----------

A. Pengertian HAM.....	29
B. Sejarah Perkembangan HAM .....	31
C. Tiga Konsepsi tentang HAM .....	37
D. Empat Sudut Pandang tentang HAM .....	38
E. HAM Dalam Perspektif Hubungan Internasional.....	40
F. Kritik Terhadap <i>Autonomy of State</i> dan <i>Cosmopolitan Perspective</i> .....	42
1. Kritik terhadap <i>Autonomy of States</i> .....	42

2. Kritik terhadap <i>Cosmopolitan Perspective</i> .....	42
G. Kasus Pelanggaran HAM di Dunia .....	44
H. Perkembangan HAM di Indonesia .....	46
1. Produk Hukum Nasional tentang HAM .....	46
2. Pembentukan Komnas HAM .....	46
3. Pengadilan HAM .....	47
4. Ratifikasi Konvensi Internasional .....	49
5. Statuta Roma.....	50

## **BAB IV**

### ***GOOD GOVERNANCE***

<b>DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>51</b>
A. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	53
B. Karakteristik <i>Good Governance</i> .....	57
C. Perbedaan <i>Government</i> dan <i>Governance</i> .....	59

## **BAB V**

### **TERORISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL..... 62**

A. Definisi Terorisme .....	63
B. Tipologi Terorisme .....	66
C. Karakteristik Terorisme .....	68
D. Tujuan Terorisme .....	68
E. Sekilas Sejarah Munculnya Terorisme.....	69
F. Dampak Global & Regional Terorisme: Kasus WTC & Pentagon .....	71
G. Upaya Mencegah Praktik Terorisme .....	73

## **BAB VI**

### **GLOBALISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL .....**

A. Model Interaksi " <i>State Centrist</i> " .....	78
B. Model Interaksi " <i>Transnasional</i> " .....	80
C. Globalisasi .....	82

D. Beberapa Konseptualisasi Globalisasi .....	86
E. Faktor-faktor Pendorong Munculnya Globalisasi .....	88
F. Dua Pandangan Tentang Globalisasi.....	90
G. Implikasi Globalisasi.....	94

## **BAB VII**

### **GENDER DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL ..... 97**

A. Pengertian Gender.....	99
B. Perbedaan Sex dan Gender .....	100
C. Akar Kultural-Historis dari Keterbelakangan Perempuan .....	102
D. Perhatian Internasional terhadap Kedudukan, Status, dan Peranan Perempuan. ....	102
E. Sebab-sebab Munculnya Gender.....	104
F. Aliran-Aliran Pemikiran dalam Gender.....	107
G. Globalisasi dan Gerakan Feminisme .....	110
H. Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan Gender .....	114
I. Manfaat Pembangunan yang Berwawasan Gender .....	115

## **BAB VIII**

### **LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUBUNGAN**

### **INTERNASIONAL ..... 116**

A. Cakupan dan Signifikansi Lingkungan Hidup .....	117
B. Perhatian Dunia terhadap Masalah Lingkungan Hidup .....	119
C. Degradasi Lingkungan Hidup.....	121
D. Penyebab Degradasi Lingkungan Hidup .....	122
E. Perbedaan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Konvensional .....	124
F. Aliran Pemikiran dalam Lingkungan Hidup .....	125

## **BAB IX**

### **PARIWISATA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL..... 108**

A. Pengertian Pariwisata .....	128
B. John Naisbit dan Proyeksi Pariwisata .....	130
C. Pariwisata Ditinjau dari Perspektif Hubungan Internasional.....	131
D. Dampak dari Industri Pariwisata.....	134
E. Tinjauan Organisasi Pariwisata Dunia: PATA.....	136

## **BAB X**

### **NGO DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL..... 139**

A. NGO dan Ideologi Developmentalisme .....	139
B. NGO di Indonesia .....	143
C. Relasi NGO dan Orde Baru.....	145
D. NGO Pasca Perang Dingin.....	147

## **BAB XI**

### **HAKIKAT ANCAMAN DALAM PERSPEKTIF**

### **HUBUNGAN INTERNASIONAL..... 150**

A. Pengantar .....	150
B. Tipologi Ancaman.....	152
C. Dari “ <i>National Security</i> ” Menjadi “ <i>Human Security</i> ” .....	153
D. Ancaman Keamanan Manusia.....	158
E. Apa Solusi Penangkalnya?.....	161
F. Catatan Penutup .....	163

## **BAB XII**

### **“PERANG MODERN” DALAM PERSPEKTIF**

### **HUBUNGAN INTERNASIONAL..... 164**

A. Ancaman “Perang Modern” .....	166
B. Logika Munculnya “Perang Modern” .....	168
C. Definisi “Perang Modern” .....	174
D. Spektrum “Perang Modern” .....	178

E. Tahapan “Perang Modern” .....	179
F. Teori-teori Pendukung sebagai Instrumen Analisis.....	186
G. Dampak “Perang Modern” Terhadap Menurunnya Nasionalisme.....	191
H. Solusi Menghadapi “Perang Modern” .....	194
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>196</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>203</b>



## BAB I

---

### PENDAHULUAN

**M**emahami fenomena hubungan internasional merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah karena selain diperlukan kejelian dan ketelitian, dibutuhkan pula keahlian dan kiat-kiat khusus mulai dari pengumpulan informasi, pemilihan data dan analisa data. Dari proses ini, tentunya para penstudi politik internasional harus memiliki kegemaran untuk menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan fenomena politik internasional. Tidak berhenti di situ saja, literature yang telah diperoleh kemudian dibaca dan dipahami sehingga akan diperoleh pengetahuan tentang perkembangan hubungan internasional dari masa ke masa. Dengan kata lain, para penstudi hubungan internasional harus menguasai materi tentang perkembangan sejarah hubungan internasional dari jaman klasik sampai dengan kontemporer.

Mengapa mempelajari sejarah hubungan internasional? Karena pemahaman akan sejarah perkembangan politik internasional merupakan modal dasar dalam memasuki dan mempelajari hubungan internasional. Lalu bagaimana perkembangan sejarah hubungan internasional itu? Di bawah ini akan diuraikan secara singkat.

Berdasarkan literature hubungan internasional, sejarah perkembangan hubungan internasional dapat ditelusuri sampai dengan beberapa abad sebelum Masehi. Biasanya, untuk memudahkan dalam mempelajarinya, para penstudi politik internasional membagi secara kronologis sejarah perkembangan politik internasional menjadi enam bagian penting.

*Pertama*, pada masa dinasti Chou (1122-221 SM). Kisaran hubungan internasional yang terpusat di Cina ini memiliki beberapa ciri atau karakteristik seperti: (1) struktur kekuasaan bersifat hirarki, berjenjang bertahap; (2) sumber kekuasaan terkonsentrasi pada unit politik tingkat atas; (3) kuatnya subordinasi karena kebijakan *top-down* penguasa; (4) bersifat tertutup dan tidak berekspansi keluar.

*Kedua*, pada masa Yunani kuno (800-322 SM). Ketika itu, unit politik yang ada adalah negara kota (*polis, city state*) dengan karakteristik: (1) dominasi kuat polis Athena dan Sparta; (2) sumber kekuasaan dan pengaruh disebarakan secara merata di antara unit-unit politik yang berinteraksi; (3) bersifat terbuka sehingga banyak berinteraksi dengan Italia, Mediterania, negara-negara Eropa dan Babylonia.

*Ketiga*, sebelum Perang Dunia I (1914). Hubungan internasional pada masa ini sangat kental diwarnai perimbangan kekuasaan (*balance of power*) diantara negara-negara besar Eropa. Ciri dan karakteristiknya adalah sebagai berikut (1) terdapat pusat-pusat kekuasaan seperti Perancis, Prussia (sekarang Jerman) dan

Austria; (2) adanya negara yang selalu berperan sebagai *balancer* atau pengimbang; (3) teknologi militer belum memainkan peranan dominan; (4) setiap negara dapat berpindah-pindah dalam hubungannya dengan *power-center*.

*Keempat*, setelah Perang Dunia II (1945) atau pada masa Perang Dingin. Pada masa pasca Perang Dunia II ini, lebih terinci dibagi jadi tiga bagian penting yaitu: (1) *tight bipolar* atau bipolar ketat (1945-1955) dengan ciri dan karakteristik seperti: ada dua pola/ kekuasaan (AS dan US), teknologi senjata memainkan peran dominan, ideologi sangat dominatif, negara kecil dan besar tidak bebas berpindah-pindah keberpihakannya; (2) *loose bipolar* atau bipolar longgar (1955-1970). Artinya terjadi perubahan-perubahan dalam masing-masing blok sehingga menjadi longgar dan tidak solid dengan karakteristik: AS dan Eropa menjadi renggang karena adanya MNC dan pasar tunggal Eropa; Cina bermusuhan dengan US; Eropa Timur renggang dengan US; Jepang mulai menjadi blok ekonomi baru; (3) menuju ke arah *multipolar* (1970-1989) dikarenakan oleh adanya beberapa fakta seperti: munculnya RRC sebagai kekuatan baru, Jepang sebagai kekuatan ekonomi raksasa, Eropa Barat mengarah ke Uni Eropa, dan munculnya negara-negara Industri Baru di Asia Timur, seperti Korea, Taiwan, HongKong, dan Singapura.

*Kelima*, pasca Perang Dingin (1990-2001). Runtuhnya Uni Soviet, bersatunya Jerman karena runtuhnya Tembok Berlin, dan hancurnya ideologi sosialis-komunis telah mengubah politik internasional menjadi dua jenis, yaitu (1) secara politik-militer, politik internasional bersifat *unipolar* dimana AS sebagai satu-satunya aktor utama; (2) secara ekonomi, politik internasional bersifat *multipolar* karena terdapat aktor-aktor baru seperti Jepang, Cina, Eropa Barat, dan Jerman. Selain itu, muncul pula isu-isu baru yang mewarnai hubungan internasional, seperti hak asasi manusia,

demokrasi, *good governance*, *gender* dan lingkungan hidup. Isyu-isyu ini disebut dengan *low politics*.

*Keenam*, pasca tragedi WTC dan Pentagon, 11 September 2001. Serangan teroris internasional ke gedung WTC di New York dan gedung Pentagon di Washington yang menelan korban sipil lebih dari 3000 orang telah mengubah konstelasi hubungan internasional dari *low politics* menjadi *high politics* (*politico military security*). Isyu beralih menjadi isyu terorisme global dan langkah penanganannya. Sedangkan aktor utamanya adalah AS, Inggris, dan kelompok-kelompok teroris serta negara-negara yang melindungi terorisme global.

Perkembangan dan dinamika hubungan internasional yang kini telah memasuki dimensi-dimensi baru ini tentunya harus dideskripsikan dan dieksplanasikan secara komprehensif oleh para penstudi hubungan internasional. Dalam proses pendeskripsian dan pengeksplanasiannya, para penstudi hubungan internasional memerlukan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai. Berbeda dengan masa lalu dimana fenomena politik internasional didekati hanya sekadar sebagai kiat atas dasar pengetahuan jurnalistik dan teoritisasi konvensional, saat ini dibutuhkan kajian-kajian yang menitikberatkan pada perangkat teoritik dan kajian metodologi saintifik mengingat isyu yang berkembang saat ini jauh lebih kompleks dibanding isyu di masa lalu.

Buku ini sebenarnya berisi tentang berbagai perkembangan hubungan internasional yang menjadi isyu dominan pada masa setelah berakhirnya Perang Dingin dan awal abad 21. Penggambaran isyu-isyu yang berkembang dalam hubungan internasional ini hanya bersifat deskriptif dan tentunya hanya awal dari sebuah perkenalan dan pengantar.

Secara sistematika, buku ini terdiri dari dua belas bab. Bab pertama berisi pendahuluan. Bab kedua menguraikan tentang

pengertian dan teorisasi demokrasi. Berbagai pendekatan terhadap demokrasi dan kaitan demokrasi dengan politik luar negeri dibahas secara lugas dalam bab ini.

Bab ketiga memaparkan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perspektif Hubungan Internasional, dikenal dua perspektif tentang HAM, yakni *Autonomy of State* dan *Cosmopolitan Perspective*. Bab ini juga menelusuri sejarah perkembangan HAM dari jaman Yunani Kuno sampai dengan Jaman modern seperti sekarang ini.

Bab keempat menjelaskan tentang *good governance*, baik dari pengertiannya, unsur-unsurnya, sampai dengan karakteristik dan perbedaan antara *governance* dan *government*. Sedangkan bab kelima berupaya membedah hakikat terorisme, pengertian terorisme, tipologi terorisme sampai dengan upaya pencegahannya. Dampak global dan regional dari munculnya tragedi WTC dan Pentagon juga dibahas dalam bab ini.

Bab keenam berusaha menampilkan sebuah gambaran tentang fenomena globalisasi. Dimulai dari definisi globalisasi, kerangka "*state centrist*" dan "*transnasional*" dalam studi hubungan internasional untuk memahami globalisasi, dampak negatif dan positif globalisasi, sampai dengan gerakan anti globalisasi sebagai efek dari mewabahnya "*virus*" globalisasi.

Bab ketujuh ingin mencoba memperkenalkan perspektif gender dalam kajian hubungan internasional. Dimulai dari pengertian tentang gender, perbedaannya dengan "*sex*", perhatian dunia terhadap masalah gender, faktor yang melatarbelakangi munculnya gender, sampai dengan penelusuran berbagai aliran pemikiran dalam gender dan formulasi kebijakan pembangunan yang berwawasan gender.

Bab kedelapan menampilkan risalah tentang lingkungan hidup dalam konteks kajian hubungan internasional. Dalam bab ini ditunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan studi hubungan internasional sehingga para penstudi hubungan internasional senantiasa harus mempelajari seluk beluk tentang lingkungan hidup, *ecology*, *green politics* dan lain sebagainya.

Bab kesembilan mengusung tema pariwisata dalam tinjauan studi hubungan internasional. Bab ini menunjukkan bahwa di balik kegiatan pariwisata, tersimpan sebuah pola dan interaksi berbagai aktor dalam hubungan internasional, seperti individu dan perusahaan multinasional yang bergerak di sektor pariwisata. Menurut penulis, hal ini tentunya akan terjadi sebuah persentuhan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Atau bisa dikatakan antara *populer culture* dengan *rest culture*. Fenomena pariwisata ini sangat menarik bila dikaji dari studi hubungan internasional.

Bab kesepuluh mengemukakan tentang NGO dalam hubungan internasional. Sebagai aktor dalam hubungan internasional, NGO merupakan salah satu pemain yang sangat menentukan dalam dinamika politik internasional, sehingga keberadaan NGO dikupas dalam buku ini. Dimulai dari pembahasan tentang sejarah kemunculan NGO dan ideologi developmentalisme, NGO di masa Perang Dingin, NGO dan relasinya dengan Orde Baru, dan masa depan NGO di era globalisasi sekarang ini.

Bab kesebelas mencoba untuk membedah tentang hakikat ancaman dalam perspektif hubungan internasional. Dalam bab ini akan diperkenalkan konsep yang berkaitan dengan keamanan (*security*), yakni konsep *National Security* dan *Human Security*. Menurut penulis, ada perkembangan baru dari konsep keamanan.

Keamanan tidak hanya dimaknai dan diukur dari keamanan militer yang bersifat teritorial-fisik, melainkan telah berkembang menjadi lebih luas, meliputi keamanan psikis yang lebih bersifat individu-non fisik. Perspektif ancaman nasional bangsa pasca Perang Dingin telah bergeser dari *national security* menjadi *human security*, yang pada perkembangan selanjutnya kedua konsep ini saling melengkapi.

Bab kedubelas atau terakhir berupaya memperkenalkan konsepsi "Perang Modern" dalam perspektif Hubungan Internasional. Penulis menginginkan bahwa khalayak publik menyadari bahwa saat ini kita berada dalam kondisi perang. Namun perang yang terjadi adalah bukan perang dalam artian fisik, memakai senjata api dan peralatan militer lainnya, melainkan perang yang bersifat halus atau *soft*, yakni perang yang berdimensi luas dan kompleks. Mulai dari perang ideologi, perang pemikiran, perang ekonomi, perang *cyber* (perang dunia maya, *cyber warfare*), dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu pengenalan terhadap konsep ini secara lebih seksama dan komprehensif.

Mudah-mudahan dengan materi yang beraneka ragam tentang berbagai isu dalam hubungan internasional ini akan dapat memperkaya khazanah pustaka dalam studi hubungan internasional. Melalui uraian dalam bab-bab dalam buku ini, diharapkan akan dapat memberikan gambaran dasar kepada semua penstudi hubungan internasional tentang betapa luasnya ruang lingkup kajian hubungan internasional sehingga diperlukan wawasan yang luas, pembacaan yang komprehensif, dan pengetahuan yang mendalam dari para penstudi hubungan internasional ketika akan masuk untuk mempelajari, menganalisis, dan menelaah berbagai dinamika dan permasalahan hubungan internasional.

## BAB II

---

# DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Salah satu topik yang memperoleh tempat utama dalam agenda kajian Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional dalam satu dasawarsa terakhir adalah proses demokratisasi atau lebih tepatnya adalah proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang terjadi paling tidak sejak pertengahan dasawarsa 1970-an. Semenjak itu, apa yang dinamakan dengan “Demokrasi” menjadi “tujuan”(atau mungkin juga “alat”) bagi setiap negara, khususnya negara-negara berkembang yang baru merdeka, demi tercapainya penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan baik atau *clean and good governance*. Argumen pokoknya adalah bahwa demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang paling baik dibanding dengan sistem pemerintahan lainnya: monarki, oligarki dan komunisme.

Meskipun upaya pelaksanaan sistem demokrasi tidak sedikit memakan biaya sosial (*high social cost*), namun sistem ini, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, merupakan pilihan terbaik di antara yang terjelek.<sup>1</sup> Dan sampai saat ini belum ada pilihan sistem politik alternatif selain demokrasi. Oleh karena itu, wajar jika para negarawan dan pemimpin negara-negara di dunia mendambakan makhluk yang bernama demokrasi.

Dalam dinamika politik internasional, demokrasi adalah persoalan tersendiri yang mendapat perhatian serius, khususnya setelah Perang Dunia II dan Perang Dingin. Hal ini didorong oleh serangkaian “*the wind of change*” yang melanda lebih dari 30 puluh negara di dunia, termasuk Spanyol, Portugal, Turki, Brasil, Argentina, Chile, Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Thailand dan yang terjadi di Uni Soviet serta negara-negara satelitnya di Eropa Timur.<sup>2</sup> Saat ini angin perubahan ini sedang menjangkiti Indonesia, Meksiko, Peru, dan Yugoslavia.

Rangkaian gelombang demokratisasi yang menyapu secara *gradual* wilayah Eropa Timur, Amerika Latin, Afrika dan Asia telah memalingkan perhatian semua orang untuk menelaah dan mengkaji tentang proses demokratisasi. Banyak kajian tentang demokrasi hanya terbatas pada analisa historik empirik yang menekankan pada kasus-kasus riil yang terjadi diberbagai negara.

---

<sup>1</sup> Dikatakan demikian adanya kesadaran bahwa sistem pemerintahan apapun di dunia ini pasti akan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dalam demokrasipun sering terdengar istilah “tumbal” demokrasi atau “martir” demokrasi. Meskipun demikian, dibanding sistem politik lainnya, demokrasi dapat dikatakan memerlukan biaya yang sedikit atau minimal. Sekedar memperkuat argumentasi, naik dan berkuasanya pemerintahan otoriter Soeharto di Indonesia tahun 1966 memakan korban dan biaya sosial yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan Soekarno di masa Orde Lama. Satu contoh lagi adalah naiknya Salvador Allende menjadi presiden di Chile lebih sedikit memakan korban dibandingkan berkuasanya pemerintahan militer Jenderal August Pinochet. Walaupun terkesan menyederhanakan, pola dan karakteristik peristiwa di atas dapat dijadikan cerminan akan lebih baiknya demokrasi dibanding sistem politik lainnya.

<sup>2</sup> Lihat dalam Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terjemahan), (Jakarta: Grafiti Press, 1995).

Namun jarang sekali kajian tentang demokrasi ditinjau secara konseptual-teoritik. Karena itu, tulisan ini ingin melakukan “proyek” kecil-kecilan, yakni membedah dan mengelaborasi konseptualisasi dan teorisasi demokrasi.

Argumentasinya adalah teorisasi demokrasi memainkan peranan penting dalam usaha untuk memahami kehidupan demokratisasi secara riil. Dengan konseptualisasi dan teorisasi demokrasi, kita dibekali pemahaman yang lebih mendalam terhadap fakta yang ada di hadapan kita; jauh lebih mendalam dari seseorang yang tidak memahami dan menguasai demokrasi secara konseptual-teoritik.

Berdasarkan alur logika pemikiran di atas, tulisan ini hendak mengajak semua pihak untuk mengkaji demokrasi dipandang dari perspektif konseptual teoritik. Untuk keperluan ini dan untuk mendorong diskusi dalam bentuk wacana yang konstruktif dan edukatif, tulisan ini hendak mencari jawab atas pertanyaan: Apa yang dimaksud teorisasi demokrasi? Bagaimana cara “mendekati” demokrasi? Apakah ada “cara alternatif” untuk mendekati demokrasi? Kalau ada, apa dan bagaimana? Dan sejauh mana “cara alternatif” itu *feasibel* untuk mengkerangkai demokrasi? Karena terbatas hanya merangsang wacana, tulisan ini sadar tidak akan mampu secara komprehensif menguraikan jawaban atas pertanyaan itu.

## **A. Mengkerangkai Demokrasi**

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos/kratein*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian,

demokrasi adalah “rakyat berkuasa “atau “*government of rule by the people*”.<sup>3</sup>

Menurut Abraham Lincoln ketika berada di Gettysburg, Pennsylvania, Amerika Serikat, tahun 1863, demokrasi adalah “*government of the people, by the people, for the people*” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).<sup>4</sup>

Secara terminologi, demokrasi adalah mekanisme hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Hubungan antara dua pihak ini tentunya dilandasi oleh sebuah perjanjian atau “*kontrak*” yang disepakati masing-masing pihak melalui salah satunya mekanisme konstitusi. Untuk menjaga hubungan itu tetap harmonis, seimbang dan bertanggung jawab (*responsibility*) perlu suatu korespondensi atau jembatan yang mengkatalisasi kehendak rakyat dengan penguasa. Korespondensi ini dapat berujud sebuah lembaga yang berfungsi mengembangkan mekanisme “*check and balance*”.

Sistem politik yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat diasumsikan sedikit sama kuat, atau lebih kuat dari pada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah sistem otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi ini hanya merupakan *demokrasi pinjaman*. Bilamana kemudian pemerintah merasa kurang berkenan dengan demokrasi yang diberikan, dengan mudah bisa menariknya kembali.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 50.

<sup>4</sup> Dikutip dari Sutejo Atmowasito, “Demokrasi: Suatu Tinjauan Deskriptif dan Komparatif”, dalam *JISIP*, No. 1/Volume 1/April 1994, hlm. 4.

<sup>5</sup> Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan: Studi Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1992). Contoh tepat dari pernyataan di atas adalah pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang berkuasa dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat tapi kenyataannya tidak lebih dari kedaulatan penguasa. Oleh karena itu, momentum reformasi ini harus dijadikan “persiapan” agar kejadian itu tidak berulang lagi. Bagaimana agar tidak berulang ?. jawaban

Istilah demokrasi sendiri berasal dari abad ke-5 SM yang sesungguhnya pada waktu itu digunakan untuk menunjukkan masyarakat yang berkumpul di dalam sidang Dewan Eklesia atau Dewan Rakyat Yunani Kuno. Di Yunani Kuno, tepatnya di Polis Athena, pelaksanaan demokrasi bersifat langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Kecuali budak, wanita dan penduduk asing, semua orang di Polis (*city state*) Athena mempunyai hak pilih (*franchise*). Sifat langsung dari demokrasi Yunani Kuno ini dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, dan jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam *city state*). Terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, *operating principle* demokrasi Athena merupakan cikal bakal demokrasi modern sehingga perlu diletakkan dalam perspektif sejarah demokrasi modern itu sendiri. Demokrasi Athena itu perlu dipaparkan *in a nutshell*, karena memang dari sanalah benih-benih demokrasi modern dapat ditelusuri. Setelah jaman Athena itu, demokrasi sebagai suatu spesies politik lenyap sama sekali dan baru muncul kembali terbata-bata pada abad ke-18 meskipun dengan wajah dan manifestasi yang jauh berlainan, sesuai dengan perkembangan sejarah.<sup>6</sup>

Dalam demokrasi modern, wajah dan manifestasi demokrasi berubah menjadi bersifat tidak langsung (*indirect democracy*), atau orang banyak menyebut sebagai demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Sifat tidak langsung ini dapat

---

sementara yang dapat diutarakan adalah rekonsiliasi nasional antara berbagai kelompok reformis, termasuk penyamaan persepsi dan interpretasi akan hakekat demokrasi.

<sup>6</sup> Amien Rais, "Pengantar", kata pengantar dalam buku *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. Xii.

dipahami karena berlangsung dalam kondisi yang kompleks dan multidimensional, wilayahnya luas (meliputi negara bangsa/*nation state*), serta jumlah penduduk yang mencapai jutaan orang. Satu hal yang menarik dari perkembangan demokrasi modern adalah budak, wanita dan penduduk asing diberi hak pilih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, hanya laki-laki yang memiliki hak pilih dan terlibat aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan.

Melihat perkembangan demokrasi di Yunani Kuno (abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 SM) sampai dengan demokrasi modern (abad ke-18 sampai sekarang) terdapat paling tidak tiga pola transformasi sosial yang melingkupinya. *Pertama*, dari demokrasi langsung (*direct democracy*) beralih menjadi demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Artinya, jika dahulu rakyat secara keseluruhan berperan serta dalam pemerintahan (menjadi anggota dan pengurus Dewan Eklesia), namun sekarang ini, bentuk peran sertanya direpresentasikan pada wakil-wakilnya yang ditunjuk (lembaga parlemen/legislatif) yang dipilih dalam sebuah pemilihan umum.

*Kedua*, dari negara kota (*city state*) menjadi negara bangsa (*nation state*). Maksudnya, dalam demokrasi Yunani Kuno, pelaksanaan demokrasi terbatas hanya pada Polis Athena saja. Sedangkan polis-polis yang lain seperti Sparta dan Macedonia tidak mempraktikkannya. Demokrasi modern menerapkan sistem demokrasi dalam konteks yang lebih luas, yakni negara bangsa. Hal ini diilhami oleh Perjanjian Westphalia bahwa dalam satu negara hanya ada satu bangsa. Bahkan, demokrasi merupakan gejala umum dan seolah-olah merupakan suatu keharusan bagi setiap negara di dunia.

*Ketiga*, dari hak pilih laki-laki diperluas mencakup wanita, budak dan penduduk asing. Hal ini didorong oleh perhatian besar

terhadap hak asasi manusia yang mengandung unsur-unsur kebebasan, persamaan, dan kepemilikan. Inilah kemudian yang memunculkan istilah “*one man one vote*” atau satu orang satu suara.

Perkembangan sejarah di Eropa Barat pada abad ke-18 dan 19 dianggap sebagai tonggak awal dalam perkembangan gagasan demokrasi. Hal ini tidak berlebihan karena semenjak gagasan demokrasi Yunani Kuno boleh dikatakan hilang dari muka bumi, Eropa Barat mengalami masa kegelapan (Abad Pertengahan; 600-1400 M). Tidak ada perkembangan yang berarti dalam masa itu jika dilihat dari sudut demokrasi kecuali dokumen Magna Charta Tahun 1215. Timbulnya kembali gagasan demokrasi modern ditandai dengan berakhirnya abad Pertengahan yang kemudian didorong oleh sejumlah rentetan peristiwa besar yang berlangsung sampai akhir abad ke-20 ini.

*Pertama*, munculnya *Renaissance* (1350-1600 M) yang berpengaruh sangat kuat di Eropa Selatan seperti Italia, dan *Reformasi* (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti Jerman, Swiss dan Belanda. *Renaissance* bertujuan menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani Kuno yang selama abad Pertengahan disisihkan. Sedangkan *Reformasi* berhasil membebaskan manusia dari kungkungan penguasa Gereja. Kedua peristiwa inilah yang mengantarkan Eropa Barat pada masa “*Aufklärung*” (Abad Pencerahan) dan Rasionalisme. Serangkaian revolusi sosial inilah yang menjadikan manusia memahami nilai-nilai demokrasi.

*Kedua*, Revolusi Industri (1667) di Inggris yang sarat akan benuansa ekonomi dan Revolusi Perancis (1789) yang kental beraroma politik. Revolusi Industri dilatarbelakangi oleh serangkaian gerakan kaum borjuis yang ingin mendapatkan kebebasan berproduksi dan berkonsumsi atas barang dan kepemilikan. Mulailah kemudian industrialisasi secara massal.

Revolusi Perancis ditandai dengan runtuh dan hancurnya penjara Bastille, simbol kekuasaan raja Louis XVI. Revolusi ini tambah lengkap dengan terjadinya Revolusi Amerika tahun 1776 sebagai proses gerakan anti penjajahan Inggris. Ditinjau dari perspektif demokrasi, ketiga peristiwa sosial ini mengilhami gagasan demokrasi seperti nilai-nilai kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*), kepemilikan (*property*) dan persaudaraan (*fraternity*).

*Ketiga*, Perang Dunia I dan II. Perang Dunia I yang hanya terbatas di Eropa pada tahun 1914-1918 telah menghasilkan negara-negara Eropa Barat. Begitupun juga Perang Dunia II yang telah mengantarkan Italia, Jerman dan Jepang beralih dari ideologi politik fasisme ke demokrasi. Perkembangan pesat demokrasi ini juga diilhami oleh Perang Dingin dan sesudahnya yang telah melahirkan negara-negara merdeka dan berjuang untuk menerapkan demokrasi.

Dinamika teorisasi demokrasi yang muncul pada abad ke-18 sampai sekarang ini jika dilihat dari aspek historis-sosiologis merupakan suatu kemajuan dalam peradaban manusia. Kalangan teoritis modernisasi mengasumsikan adanya suatu model demokrasi yang didasarkan pada pengalaman Eropa Barat dan Amerika Utara. Model tersebut memiliki tiga ciri utama, yaitu: (1) Ekonomi yang makmur dan merata; (2) struktur sosial yang modern, mengenal diversifikasi dan didominasi kelas menengah yang independen; (3) budaya politik nasional yang secara implisit sudah demokratis, yaitu toleran terhadap perbedaan dan cenderung akomodatif.<sup>7</sup> Selain itu, demokrasi dapat juga tumbuh dalam suatu negara yang sedang kalah perang dan kemudian di desain oleh aktor internasional, seperti yang terjadi pada Jerman, Italia dan Jepang.

---

<sup>7</sup> Tentang hal ini lihat lebih mendalam dalam Mohtar Masoed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.

Namun demikian, dalam perkembangannya, hipotesis teoritis modernisasi yang mengaitkan modernisasi sosial ekonomi dengan demokratisasi politik sering dianggap gagal menghadapi uji verifikasi. Kenyataannya yang muncul pada tahun 1960-an menunjukkan hubungan yang sebaliknya, yaitu kemajuan sosial ekonomi malahan berkorelasi positif dengan perkembangan otoriterisme. Munculnya otoriterisme di Argentina, Brasil, Chile, Filipina, Korea Selatan, Nigeria, Pakistan, Thailand, Uruguay, dan sebagainya, pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an membuktikan hal itu. Fakta itu telah "memaksa" ilmuwan politik menggeser fokus perhatian dari persoalan demokrasi ke persoalan otoriterisme. Karena itu tidak mengherankan kalau teoritisasi demokrasi menghasilkan karya tulis yang sangat memperhitungkan faktor militer dalam kehidupan politik, terutama di Negara-negara Dunia Ketiga.

Demikianlah, dinamika konseptualisasi demokrasi mengalami fluktuasi alias pasang surut dan kadang-kadang keluar dari "pakem" yang ada. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi pada suatu negara tidak sama dengan demokrasi di negara lain. Terdapat variabel eksplanasi yang berbeda tergantung pada pola dan karakteristik struktur sosial ekonomi masyarakat tersebut. Ditambah pelik lagi dengan adanya variabel kultur internal sebagai pra kondisi tumbuhnya demokrasi. Dalam kasus tertentu aktor internasional merupakan variabel yang determinan. Agar supaya memudahkan upaya pemetaan dan pengintegrasian konseptualisasi dan teoritisasi demokrasi, bagian berikut ini akan diuraikan pendekatan-pendekatan dalam demokrasi.

## B. Hubungan Antara Demokrasi dan Pemilu

Paling tidak terdapat beberapa argumentasi penting yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara Demokrasi dan Pemilu. *Pertama*, Pemilu adalah ciri penting bagi suatu sistem politik yang memenuhi standar atau kriteria untuk disebut demokratis. Tidak ada negara yang disebut demokratis jika di negara itu tidak ada Pemilu yang bebas, jujur dan adil, yang dilaksanakan secara rutin untuk memilih wakil-wakil rakyat atau pemimpin politik.

*Kedua*, Pemilu sendiri merupakan produk dari proses demokratisasi, dimana Pemilu merupakan konsekuensi logis dari diperluasnya hak-hak politik rakyat untuk berperan serta dalam menentukan proses-proses pengambilan keputusan, baik pada level lokal maupun nasional. Untuk menampung partisipasi politik yang diperluas itulah diperlukan Pemilu dan sistem pemilihan, yang dapat menjamin partisipasi politik secara efektif dan efisien.

*Ketiga*, Pemilu merupakan alat untuk mengukur dan menentukan kualitas dan kuantitas demokrasi. Demokrasi akan memiliki kadar kualitas tinggi apabila proses Pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, transparan dan terbuka serta menghormati hak-hak politik rakyat ketika memilih. Selain itu, terjadi kompetisi antar aktor politik yang sehat dan kompetitif. Sedangkan demokrasi akan memiliki kadar kuantitas yang tinggi apabila proses Pemilu melibatkan seluruh rakyat dari segenap komponen dan level. Tidak adanya atau sedikitnya pihak yang memilih Golongan Putih (Golput) merupakan indikator keberhasilan Pemilu ditinjau dari aspek kuantitas.

*Keempat*, Demokrasi sendiri merupakan produk dari rasionalisasi kekuasaan politik. Ketika kekuasaan politik dipegang oleh rezim otoriter-totaliter, kekuasaan politik biasanya

disandarkan pada sejumlah sumber legitimasi religius yang bersifat adikodrati dan adiduniawi. Kekuasaan politik yang didasarkan pada legitimasi religius tidak mungkin dipersoalkan keabsahannya. Tetapi ketika penguasa politik kehilangan legitimasi adikodrati dan adiduniawi, maka timbul persoalan atas dasar apa wewenang penguasa memerintah masyarakat. Untuk menjawab itu maka penguasa membutuhkan sumber legitimasi baru berupa dukungan dari masyarakat. Kompetisi antar penguasa dan calon penguasa untuk membuktikan siapa yang mendapat dukungan rakyat paling besar itulah kemudian yang melahirkan fenomena "Pemilu". Dengan kata lain, Pemilu merupakan fenomena yang muncul sebagai akibat runtuhnya mitos-mitos di sekitar kekuasaan politik oleh rasionalisme. Karena itu, sudah selayaknya kalau Pemilu mencerminkan rasionalitas berpolitik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemilu dan Demokrasi merupakan ibarat "*dua sisi dari satu keping mata uang*" yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Suatu negara tidak bisa dikatakan demokratis kalau tidak ada dan melaksanakan pemilu. Sebaliknya, suatu negara tidak akan bisa melaksanakan Pemilu yang Demokratis jika negara tersebut tidak memiliki sistem politik yang demokratis.

### **C. Pendekatan-pendekatan dalam Demokrasi**

Mengamati kegiatan dan teorisasi demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, bergantung pada perspektif, pemahaman atau kerangka acuan yang dipakai.<sup>8</sup> Bagaimana cara mengamati

---

<sup>8</sup> Pemahaman terhadap konsep Demokrasi semakin beragam dan meluas tergantung dari pihak mana mengartikannya. Namun, secara umum, terdapat dua pemahaman *mainstream* tentang konsepsi Demokrasi. *Pertama*, Konsepsi Demokrasi menurut paham Barat (kapitalisme-liberalisme). *Kedua*, konsepsi Demokrasi menurut paham Timur (komunisme-sosialisme). Konsep Demokrasi dari Barat lebih menekankan kepada unsur-unsur prosedur. Berbeda dengan konsep

teorisasi demokrasi itu, dan dalam posisi apa kita menganalisis, akan mempengaruhi apa yang kita lihat tentang demokrasi. Vernon van Dyke mengatakan bahwa suatu “pendekatan” (*approach*) adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.<sup>9</sup> Dengan kata lain, pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah, dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data mana yang akan dikesampingkan.

Dalam sejarah perkembangannya, demokrasi telah mengenal dua pendekatan: Pendekatan Prosedural dan Pendekatan Substansial.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan pendekatan substansial adalah bahwa demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berwujud jiwa, kultur, atau ideologi demokratis yang mewarnai pengorganisasian internal Partai Politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun perkumpulan kemasyarakatan dan keagamaan. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka.<sup>11</sup> Demokrasi yang kuat bersumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan mencapai “kebaikan dan kemaslahatan bersama”. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.

Demokrasi substansial lebih cenderung rasional, utopian, dan ideal. Artinya, ia lebih menekankan pada variabel ideologis, kultur serta internalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Sikap-sikap seperti cenderung akomodatif, toleran terhadap perbedaan,

---

Demokrasi yang berasal dari penganut komunisme dimana Demokrasi lebih ditekankan pada unsur-unsur substansi.

<sup>9</sup> Vernon Van Dyke, *Political Science: A Philosophical Analysis*, (Stanford: Stanford University Press, 1960), hlm. 114.

<sup>10</sup> Lihat Mohtar Mas’oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 6 – 7.

<sup>11</sup> Seymour Martin Limest, *Political Man: Social Bases of Politics*, (New York: Anchor, 1963).

konsensual dan kompromistis merupakan prasyarat utama jika ingin mengembangkan demokrasi.

Berbeda dengan substansial, pemahaman demokrasi secara prosedural cenderung melihat demokrasi sebagai sebuah proses penciptaan prosedur dan tata cara pemerintahan serta proses pelembagaannya. Menurut pemahaman ini, demokrasi adalah bagaimana mengelola dan melembagakan seluruh infra struktur dalam masyarakat dengan menggunakan mekanisme aturan main yang mengatur sistem pemilu, pembatasan kekuasaan dan proses pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

Sampai disini dapat dikatakan bahwa: (1) jika konsepsi substansial lebih rasional, utopis dan idealis, maka konsepsi prosedural bersifat empirik, deskriptif dan institusional; (2) jika substansial menekankan aspek kualitas (kedalaman dan substansi) tentang demokrasi, maka prosedural lebih pada aspek kuantitas (keluasan dan jumlah) yang harus dipenuhi dalam demokrasi; (3) jika substansial cenderung melihat proses institusionalisasi nilai-nilai (jiwa, kultur, ideologi) yang melekat dalam masyarakat, maka prosedural banyak menaruh perhatian pada proses institusionalisasi infra struktur yang telah terbentuk dalam masyarakat, untuk selanjutnya dibuat aturan main dan prosedur.<sup>13</sup>

#### **D. Sebab-sebab Munculnya Demokrasi**

Bagaimana kondisi dan upaya yang harus dilakukan oleh sebuah negara agar supaya sistem politiknya demokratis? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena munculnya demokrasi tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal (*single factor*),

---

<sup>12</sup> Robert Dahl, *Polyarchy: Participations and Oppositions*, (New Heaven: Yale University Press, 1979).

<sup>13</sup> Mohtar Mas' oed, *Op. Cit.*

melainkan banyak faktor (*multiple factor*) yang melahirkan tatanan politik yang demokratis.

Berdasarkan tinjauan konseptual teoritik, ada beberapa teori tentang demokrasi yang dicetuskan oleh para ilmuwan Barat, antara lain:

## 1. Struktur Sosial dan Demokrasi

Menurut Barrington Moore,<sup>14</sup> demokrasi muncul dalam kondisi dimana segolongan borjuasi yang kuat dan independen muncul dengan kepentingan yang bertentangan dengan rezim masa lalu dan mampu menerapkan kontrol atas kebijakan nasional (sementara pada waktu yang bersamaan, suatu perimbangan kekuatan antara kelas atas pemilik tanah dengan negara tetap dipertahankan), dan dimana pengaruh petani lemah sama sekali atau bahkan tidak ada karena telah ditransformasikan atau dihancurkan oleh para tuan tanah dan pihak lain yang terlibat dalam proses komersialisasi pertanian. Inilah yang terjadi di Amerika Serikat dan Perancis.

Dengan kata lain, dapat ditafsirkan bahwa Moore ingin menjelaskan bahwa struktur dan pola sosial dalam masyarakat sangat menentukan lahir tidaknya demokrasi. Untuk lebih jelasnya, pola dan struktur sosial dimaksud adalah sebagai berikut:

- **MC + LC >< UC = Sistem Politik Demokrasi**
- **UP + MC >< LC = Sistem Politik Fasisme**
- **UP + LC >< MC = Sistem Politik Komunisme**

Keterangan:

*UP = Upper Class*

*MC = Middle Class*

*LC = Lower Class*

---

<sup>14</sup> Dikutip dari buku yang sangat terkenal dari Barrington Moore, *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, (Boston: Beacon Press, 1966).

## 2. Kapital dan Demokrasi

Menurut Therborn,<sup>15</sup> munculnya demokrasi sangat ditentukan oleh struktur kapital atau modal yang dimiliki oleh sebuah negara. Demokrasi tidak mungkin dapat muncul dalam sebuah negara yang memiliki modal atau kapital yang terbatas. Oleh karena itu, hanya negara-negara memprioritaskan kapital, yakni negara-negara kapitalis, yang akan berpotensi untuk menjadi demokratis. Hal ini didukung oleh fakta demokrasi di Jepang. Ketika Jepang masih menerapkan fasisme, Jepang menjadi negara yang otoriter dan totaliter. Tetapi, setelah Jepang menerapkan sistem kapitalisme pasca Perang Pasifik sambil dibantu AS, maka Jepang menjadi sebuah negara yang demokratis. Hal yang sama terjadi di Eropa Barat. Sistem Kapitalisme yang dibangun telah melahirkan tatanan politik demokrasi.

Senada dengan Therborn, Richard Robison,<sup>16</sup> mengatakan bahwa faktor kapital sangat menentukan tumbuh kembangnya demokrasi dalam sebuah negara. Lebih lanjut, Therborn menjelaskan bahwa kasus yang terjadi di negara-negara Asia Timur menguatkan argumentasi itu. Di negara-negara Asia Timur, seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Hongkong, demokrasi muncul dengan mudah. Hal ini menurut Robison disebabkan oleh struktur ekonomi mereka yang kapitalis mendukung terbentuknya struktur politik yang demokratis.

---

<sup>15</sup> Dikutip dalam David Potter, "The Democratizations of Third World States", dalam Tim Allen dan Thomas (ed.), *Poverty and Development in the 1900s*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 285.

<sup>16</sup> Richard Robison, "Authoritarian States, Capital-owning Classes, and the Politics of Newly Industrializing Countries: The Case of Indonesia", *World Politics*, Vol. 41, No. 1 (Oktober 1988).

### 3. Elit Politik dan Demokrasi

Menurut O'Donnell dan Schmitter,<sup>17</sup> demokrasi akan lahir karena disebabkan oleh sikap para elit, perhitungan-perhitungan dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya. Sikap elit politik umumnya menentukan apakah pembukaan terhadap demokrasi terjadi atau tidak.

Sementara itu, Diamond, Linz dan Lipset<sup>18</sup> menyatakan bahwa di seluruh dunia sedang berkembang, yang paling banyak menyumbangkan pada pengembangan demokrasi adalah gaya kepemimpinan yang fleksibel, akomodatif dan konsensual.

### 4. Budaya Politik dan Demokrasi

Menurut Almond dan Verba,<sup>19</sup> budaya politik dalam sebuah negara sangat menentukan sebuah negara akan menjadi demokratis atau tidak. Budaya politik yang partisipatif akan menjadi kondisi yang sangat potensial bagi terciptanya demokrasi pada sebuah negara. Sedangkan budaya politik yang subyek dan parokial hanya akan menghambat tumbuhnya demokrasi, karena kedua macam budaya politik ini sangat dekat dengan sistem politik yang otoriter dan bahkan feodal.

### 5. Transisi dan Demokrasi

Menurut Huntington,<sup>20</sup> munculnya demokrasi dari sebuah negara yang otoriter akan melahirkan suatu masa transisi. Masa

---

<sup>17</sup> Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter, *Transition From Authoritarian Rule: Prospect for Democracy*, (Baltimore, Md.: John Hopkins University Press, 1986), hlm. 19 dan 48

<sup>18</sup> Larry Diamond, Juan J. Linz dan Seymour Martin Lipset (ed.), *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences With Democracy*, (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1990), hlm. 15 – 16.

<sup>19</sup> Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terjemahan), (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

<sup>20</sup> Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratizations in the Late Twenty Century*, (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 113 -114. Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1995). Menurut Huntington, ada tiga gelombang demokrasi di dunia, yakni: Gelombang demokrasi pertama (1828

transisi adalah masa yang sangat menentukan karena sebuah negara bisa menjadi demokratis atau bahkan kembali menjadi otoriter, tergantung dari pola-pola yang diambil ketika transisi terjadi. Huntington mengatakan bahwa ada empat pola transisi, yaitu:

- a. Pola “Transformasi”. Artinya, elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi, seperti di Spanyol dan Brazil;
- b. Pola “Replacement”. Artinya, kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi, seperti di Athena, Jerman Timur, dan Portugal;
- c. Pola “Transplacement”. Artinya, demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi, dan “bargaining” antara pemerintah dengan kelompok oposisi, seperti di Polandia, Nikaragua, Bolivia dan Afrika Selatan;
- d. Pola “Intervensi”. Artinya, dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar, seperti di Grenada dan Panama.

## **E. Demokrasi dan Politik Luar Negeri**

Dalam studi hubungan internasional, demokrasi merupakan sebuah konsep yang sangat penting, karena dalam perkembangannya, demokrasi seringkali dijadikan alat bagi sebuah negara untuk menyerang dan menjatuhkan negara lain. Demokrasi sendiri bersifat universal, namun implementasi demokrasi sangat berbeda oleh masing-masing negara.

Sebagai negara yang dijuluki sebagai “kampiun” demokrasi, Amerika Serikat (AS) seringkali menjadikan demokrasi sebagai alat bagi politik liar negerinya. AS tidak jarang memberikan

---

– 1926); gelombang demokrasi kedua (1943 – 1962); gelombang demokrasi ketiga (1974 – 1990). Lihat hal. 16.

pernyataan yang kontroversial dan mengundang kecaman karena menuduh dan menetapkan negara lain sebagai negara yang tidak demokratis. Negara-negara Timur Tengah, seperti Irak, Iran, Suriah dan Libia selalu dikatakan oleh AS sebagai negara yang tidak demokratis alias otoriter.

Politik luar negeri AS terhadap negara-negara di dunia yang dianggap tidak demokratis dan melanggar demokrasi biasanya adalah sebagai berikut:

1. Di bidang politik.

AS akan melakukan intervensi, baik intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara yang menodai nilai-nilai demokrasi dan menerapkan sistem otoriterisme. Contoh terhadap pernyataan ini adalah invasi AS ke Irak dan Haiti

2. Di bidang ekonomi.

AS akan melakukan sebuah tindakan embargo ekonomi kepada negara-negara yang dianggap oleh AS membahayakan eksistensi demokrasi dan menyengsarakan rakyatnya. Contohnya adalah embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS terhadap Libia, Iran, dan Suriah. Selain itu, AS juga selalu menyarankan kepada pihak lembaga keuangan internasional, seperti IMF, WTO dan Bank Dunia untuk tidak memberikan pinjaman dana kepada negara-negara yang dipandang melanggar demokrasi

3. Di bidang militer.

AS akan mengambil tindakan embargo persenjataan kepada negara manapun yang dianggap tentara atau militernya melanggar nilai-nilai demokrasi dan menodai hak-hak asasi manusia. Contoh dari hal ini adalah Indonesia yang di embargo senjata sejak kasus Timtim sehingga menyebabkan militer Indonesia kesulitan dalam memenuhi suku cadang persenjataannya.

Dengan demikian, terlepas dari kelemahan dan keunggulannya, demokrasi dapat dijadikan senjata bagi sebuah negara untuk menembak negara lain yang menjadi musuhnya. Atas nama demokrasi, AS bertindak tanpa memperdulikan kedaulatan sebuah negara dan aturan hukum internasional. Atas nama penegakan dan penyebaran demokrasi di seluruh dunia, AS tidak segan-segan menghalalkan segala cara dengan merugikan negara lain. Padahal, cara-cara yang ditampilkan oleh AS untuk menyebarkan demokrasi tersebut sebenarnya dilakukan dengan tidak demokratis alias melanggar demokrasi itu sendiri.

Di satu sisi, AS akan mendukung sepenuhnya terhadap rezim pemerintahan di seluruh dunia yang dipandang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan akan berusaha semaksimal mungkin menggulingkan sebuah rezim yang dianggap otoriter.

Namun demikian, di sisi lain, kita akan menemukan realitas bahwa kerap kali AS mendukung rezim yang otoriter dan tirani represif, seperti misalnya pemerintahan Marcos di Filipina dan pemerintahan monarki di negara-negara Timur Tengah.

Ini yang kemudian memunculkan kebijakan luar negeri yang ambivalen/*double standard*/bermuka dua dari AS. Kenyataan ini memperjelas bahwa sebenarnya AS hanya menjadikan demokrasi sebagai kedok untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Demokrasi hanya dijadikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan anarkismenya terhadap negara lain.

Sikap AS yang demikian kemungkinan besar didorong oleh ideologi kapitalisme yang dianutnya. Menurut Francis Fukuyama<sup>21</sup>, peradaban manusia telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Oleh karena itu, AS hanya akan mengizinkan

---

<sup>21</sup> Lihat Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, (Yogyakarta: Qalam, 2001).

negara-negara lain untuk menerapkan demokrasi dalam model liberal Barat. Demokrasi model Barat, oleh AS, dijadikan standard bagi AS dalam menilai kriteria demokrasi sebuah negara.

Padahal, dalam implementasinya, demokrasi model Barat tidak semuanya sesuai dengan kondisi lokalitas di negara-negara lain. Pada umumnya, negara-negara lain menerapkan demokrasi dengan cara mengawinkannya dengan nilai-nilai budaya lokal yang ada di negaranya. Karena ada beberapa nilai demokrasi liberal Barat yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai lokal suatu negara. Nilai-nilai individualisme, misalnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah konsep yang sebenarnya bebas nilai dan bersifat universal. Namun demikian, demokrasi menjadi sarat nilai dan bermuka jamak, karena adanya penafsiran yang berbeda dan bermacam-macam dari negara-negara di dunia. Dalam konteks hubungan internasional, demokrasi telah menjadi sebuah alat yang sangat ampuh bagi sebuah negara adidaya untuk melaksanakan politik luar negerinya. Bahkan, lembaga-lembaga keuangan internasional pun selalu mempertanyakan implementasi demokrasi kepada negara yang ingin dibantu keuangannya.

## **BAB III**

---

# **HAK ASASI MANUSIA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**M**asalah Hak Asasi Manusia (HAM) kini mulai menjadi sorotan masyarakat internasional dan dipandang sebagai wacana global saat ini dan potensial sebagai salah satu isu internasional pada masa yang akan datang. Akibatnya, kepedulian dan perhatian publik dunia terhadap masalah tersebut akhir-akhir ini semakin meningkat tajam.

Dalam studi hubungan internasional, HAM menempati posisi utama dalam wacana global tentang kemanusiaan, peradaban dan kebudayaan. Wacana tentang HAM berkembang dan menguat ke permukaan pada dasawarsa tahun 1990-an atau pasca Perang Dingin, meskipun ide dan gagasan tentang HAM telah ada secara resmi sejak tahun 1948, dan bahkan cikal-bakalnya pun telah ada pada masa Yunani Kuno dan Romawi Kuno.

Berbagai tindak pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara, khususnya negara-negara Dunia Ketiga, seperti *genocide* dan *ethnics cleansing* telah menimbulkan berbagai perdebatan menyangkut pengadilan HAM internasional dan pengadilan kejahatan perang (*international tribunal*) sehingga menegangkan hubungan antar negara.

Selain itu, perbedaan masing-masing negara dalam menafsirkan HAM telah memicu perdebatan tentang HAM, khususnya antara negara-negara Barat dengan negara-negara Dunia Ketiga. Menariknya lagi, ada kecenderungan bahwa HAM dijadikan sebagai alat politik bagi suatu negara dalam menjalankan politik luar negerinya. Hal ini telah mendorong wacana tentang HAM menjadi semakin menarik untuk didiskusikan karena telah terjadi bias-bias dalam melihat HAM, terutama dalam konteks hubungan internasional.

Tulisan berikut ini akan menguraikan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan HAM? Bagaimana latar belakang sejarah munculnya wacana HAM? Apa konsepsi dan sudut pandang tentang HAM? Bagaimana implementasi HAM dalam hubungan internasional? Bagaimana penafsiran terhadap HAM? Dan dalam konteks Indonesia, sejauh mana perkembangannya dalam realitas kehidupan politik di Indonesia?. Mudah-mudahan uraian di bawah ini dapat menjawab semua pertanyaan tersebut.

## A. Pengertian HAM

1. Menurut *Jan Martenson*<sup>1</sup> (staf ahli Komisi HAM PBB), hak asasi manusia adalah "*human rights could be generally defined as those right which are inherent in our nature without which we cannot live as*

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti Budi Utama, 2003), hlm. 2.

*human being*". (hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpa hak tersebut, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).

2. Menurut *Miriam Budiardjo*<sup>2</sup>, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.
3. Menurut *Rozali Abdullah*<sup>3</sup>, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara atau hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Dengan demikian, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.
4. Menurut *Krisna Harahap*<sup>4</sup>, pengertian hak asasi manusia sangatlah luas. Namun demikian, yang melandasi lahirnya hak asasi manusia dapat digolongkan dalam tiga macam konsep, yaitu:

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 120.

<sup>3</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

<sup>4</sup> Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 2-4.

- a. Bersumber dari hukum kodrat (*natural law*). Berdasarkan konsep ini, hak asasi manusia ada karena sesuai dengan kodrat manusia. Artinya, sejak manusia lahir sudah memiliki sejumlah hak asasi, seperti hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk menganut suatu agama atau keyakinan tertentu.
- b. Merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, hak asasi yang ada pada manusia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Merupakan hak yang diatur dalam peraturan (*legal rights*). Dalam pada itu, kepustakaan tentang hak asasi manusia membaginya dalam hak-hak dasar, yaitu:
  1. Yang bersifat klasik (*de klassieke gronrechten*).
  2. Yang bersifat sosial (*de sociable gronrechten*).

## B. Sejarah Perkembangan HAM

Masalah hak asasi manusia sudah setua sejarah perkembangan masyarakat, terutama dalam memperjuangkan apa yang kini disebut sebagai demokrasi. Secara historis-empiris, tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan hak asasi manusia dapat dilacak kembali pada lahirnya beberapa piagam atau perjanjian berikut ini:<sup>5</sup>

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215). Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja John Lackland dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas

---

<sup>5</sup> Dirangkum dari Krisna Harahap, *ibid.*, hlm. 4 – 21; Mirriam Budiardjo, *Op. Cit.*,; Rozali Abdulah, *Op. Cit.*, hlm. 9 – 11,; Safrudin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), hlm. 10 – 14.

tuntutan mereka. Piagam Agung ini berisi maklumat bahwa penarikan pajak harus seizin *Great Council* yang anggotanya terdiri dari Kepala-kepala Daerah, orang bebas (*free man*) tidak ditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan atau pertimbangan hukum (tertulis). Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.

2. *Petition of Rights* (tahun 1628). *Petition of Rights* ini diajukan oleh Parlemen Inggris kepada Raja Charles. Pengajuan tersebut menimbulkan pertentangan dengan Raja Charles, yang kemudian dimenangkan oleh Parlemen. *Petition* tersebut antara lain berisi:
  - a. Pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan Parlemen.
  - b. Seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan sah dan beralasan; tentara tidak diperbolehkan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.
3. *Habeas Corpus Act* (tahun 1679). Undang-undang ini ditandatangani oleh Raja Charles II dari Inggris. Dalam Undang-undang ini, HAM dikembangkan lebih mendalam. Isi dari *Habeas Corpus Act* ini antara lain meliputi:
  - a. Alasan penahanan seseorang harus lengkap dan sah menurut hukum.
  - b. Pemeriksaan terhadap orang yang ditangkap harus dilakukan dalam dua hari setelah penangkapannya.
4. *The Glorious Revolution* (Undang-undang Hak, 1689). Suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*).

5. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, 1776). Bunyi dari deklarasi ini antara lain:

*“Kami percaya bahwa semua kebenaran ini adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, di antaranya adalah hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintah di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan izin yang diperintah”.*

6. *Declarations des droits de l’homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789). Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama. Muncul istilah *Liberte* (kebebasan), *equalite* (persamaan) dan *fraternite* (persaudaraan).
7. *Bill of Rights* (Undang-undang Hak, 1789). Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan yang menjadi bagian dari Undang-undang Dasar pada tahun 1791.
8. Pemikiran Trias Politika dan Kontrak Sosial. Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dalam bukunya *The Social Contract*. Namun, pemikiran atas HAM di atas masih terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih.
9. *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan, 1941 atau awal Perang Dunia II). Empat kebebasan ini dicetuskan pertama kali oleh Presiden AS, Franklin D. Roosevelt, pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang

menginjak-injak hak-hak manusia. Empat hak dimaksud adalah:

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of speech*);
  - b. Kebebasan beragama (*freedom of religion*);
  - c. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*);
  - d. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).
10. *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, 1948). Munculnya Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh dibentuknya Komisi HAM PBB yang menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948, komisi ini melahirkan Deklarasi HAM PBB yang terdiri dari 30 pasal. Dua diantaranya adalah:
- a. Setiap orang berhak akan hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya.
  - b. Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, tahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.
11. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya). Kedua Perjanjian yang lahir pada tahun 1966 ini merupakan penjabaran dari Deklarasi HAM PBB. Kedua Dokumen tentang HAM yang dikenal sebagai International Bill of Human Rights ini tidak mengikat. Namun, keduanya merupakan kodifikasi internasional pertama atas nilai-nilai HAM. Gagasan atau isi deklarasi dan kedua perjanjian tersebut telah dimasukkan ke dalam konstitusi banyak negara di dunia.

12. *Final Act of Helsinki* (Perjanjian Helsinki, 1975). Perjanjian Helsinki ditandatangani oleh negara-negara Amerika dan Eropa, baik yang tergabung dalam blok Uni Soviet maupun blok Barat. Secara prinsip, perjanjian ini menyatakan bahwa peredaan ketegangan Timur Barat dipengaruhi oleh adanya pengakuan dan penghormatan atas HAM oleh semua negara penanda tangan.
13. *African Charter on Human and Peoples Rights* (Piagam Afrika mengenai hak asasi manusia dan bangsa-bangsa, 1981). Piagam yang dihasilkan di Banjul ini tekanannya diberikan pada kolektivitas atau kelompok, kewajiban individu dan keharmonisan sosial. Selain merinci hak-hak individu, piagam ini juga menekankan adanya kewajiban individu, yakni terhadap keluarga, masyarakat, dan negara.
14. *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990). Deklarasi ini berisi bahwa semua hak dan kebebasan tunduk kepada syariah Islam. Hak untuk menyampaikan pendapat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan bahwa hak itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas syariah.
15. *Singapore White Paper on Shared Values* (Buku Putih mengenai Nilai Bersama, 11 Januari 1991). Buku putih ini berisi lima nilai yang mencerminkan kebudayaan masyarakat Singapura yang multi ras dan multi agama. Kelima nilai itu adalah:
  - a. *Nation before Community and Society above Self* (Kepentingan negara di atas kepentingan komunitas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi).
  - b. *Family as the Basic Unit of Society* (keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat). Keluarga dianggap sebagai batu bangunan (*building block*) yang bisa menjadi dasar untuk mendirikan bangunan sosial yang stabil.

- c. *Community Support and Respect for the Individual* (Dukungan komunitas serta respek untuk individu). Disini terlihat pentingnya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.
  - d. *Consensus, not Conflict* (Konsensus, bukan Konflik). Walaupun timbul pendapat yang berbeda-beda, harus dicarikan konsensus mengenai upaya-upaya yang didukung oleh mayoritas.
  - e. *Racial and Religious Harmony* (Harmoni Rasial dan religius). Harmoni seperti ini mutlak perlu dalam masyarakat multi ras dan agama.
16. *Bangkok Declaration* (Deklarasi Bangkok, April 1993). Deklarasi ini dicetuskan wakil-wakil negara-negara Asia di Bangkok yang antara lain berisi:
- a. *Universality*. Hak asasi bersifat universal.
  - b. *Indivisibility* dan *Interdependence*. Hak asasi tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah dan tergantung satu sama lain.
  - c. *Non Selectivity* dan *Objectivity*. Tidak memilih di antara beberapa kategori hak asasi dan jangan memakai standar ganda.
  - d. *Rights to development*. Hak atas pembangunan adalah hak asasi.
  - e. *Non-Conditionality*. Pelaksanaan hak asasi tidak boleh menjadi syarat untuk bantuan pembangunan.
  - f. *National and Regional Particularities*. Kekhasan nasional, regional, sejarah, budaya dan agama merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.
  - g. *Rights to Self-determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri).

## C. Tiga Konsepsi tentang HAM<sup>6</sup>

### 1. *Konsep HAM Paham Liberal*

Hak asasi manusia menurut paham liberal ini lebih ditekankan pada individualisme Barat. Hak asasi yang paling hakiki dan tidak dapat ditawar-tawar lagi adalah hak sipil dan politik. Individu harus diberi kebebasan yang besar sehingga akan tumbuh kreatifitas manusia. Pembatasan hak individu oleh negara atau penguasa akan menciptakan sebuah pemerintahan yang otoriter dan mematikan kreatifitas individu.

### 2. *Konsep HAM Paham Sosialis*

Hak asasi manusia menurut paham sosialis tidak menekankan pada hak terhadap masyarakat, tapi lebih menekankan pada kewajiban terhadap masyarakat. Konsep HAM paham sosialis ini lebih mendahulukan hak-hak ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil. Atau lebih mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan.

### 3. *Konsep HAM Paham Dunia Ketiga*

Di dalam kelompok Dunia Ketiga, terdapat tiga kelompok pandangan, yaitu: kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsep sosialis, Marxist. Kedua, yang dipengaruhi oleh konsep Barat. Dan yang ketiga, negara-negara yang karena filsafat hidupnya, ideologi dan latar belakang sejarahnya, merupakan suatu konsep tersendiri tentang hak asasi manusia.

---

<sup>6</sup> H. A. Masyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 18 – 23.

#### D. Empat Sudut Pandang tentang HAM

Kendati hak asasi manusia itu bersifat universal, permasalahannya tidaklah sama di seluruh kawasan dunia ini. Pemahamannya tergantung pula dari sudut pandang negara-negara maupun kelompok-kelompok yang bersifat non pemerintah. Paling sedikit, terdapat empat kelompok pandangan mengenai HAM tersebut, yaitu:<sup>7</sup>

1. Negara atau kelompok yang berpandangan *Universal-absolut*. Artinya, mereka melihat HAM sebagai nilai-nilai universal. Kelompok ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Yang berpandangan demikian terdiri dari negara-negara maju
2. Negara atau kelompok yang memandang HAM secara *Universal-relatif*. Mereka memandang HAM sebagai masalah universal tetapi asa-asis hukum internasional tetap diakui keberadaannya.
3. Negara atau kelompok yang berpandangan *Particularistic-absolut*, yang berpandangan bahwa HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa sehingga mereka menolak berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinist, egois, dan pasif terhadap HAM.
4. Negara atau kelompok yang berpandangan *particularistic-relatif*. Artinya, HAM selain dipandang sebagai masalah universal juga merupakan persoalan masing-masing negara. Berlakunya dokumen-dokumen internasional diselaraskan dan diserasikan dengan budaya bangsa.

---

<sup>7</sup> Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 18 – 20.

Berdasarkan ke empat sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aliran pemikiran mengenai HAM, yakni:<sup>8</sup>

1. Bersifat *inward-looking*. Kelompok yang merasa sudah mengenal HAM sejak dulu sehingga tidak perlu menghiraukan pendapat luar.
2. Bersifat *outward-looking*. Diwakili kelompok *human rights activities* yang sering mengacu pada perumusan persepsi dunia Barat. Kelompok ini berpendapat bahwa kita tidak mempunyai cukup waktu untuk mempelajari kebudayaan yang banyak macam ragamnya itu secara mendalam, padahal pelanggaran terhadap HAM berjalan terus.

Kedua aliran pemikiran di atas pada gilirannya melahirkan persepsi ganda yang terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Barat (*West*). Yang dipelopori Amerika Serikat dengan mengumandangkan *Universality of Human Rights*. Lebih menekankan pada hak sipil dan politik. Dipengaruhi oleh paham liberalisme-kapitalisme. **Dijuluki HAM Generasi I**
2. Timur (*Rest*). Yang dipelopori oleh Cina, Syria, dan Iran dengan mendeklarasikan *Cultural Relativism* dan menolak menggunakan standar peradaban Barat menjadi patokan satu-satunya atas nilai dan penerapan hak asasi untuk semua bangsa. Lebih menekankan pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dipengaruhi oleh paham sosialisme-komunisme. **Dijuluki HAM Generasi II**
3. Sudut pandang Barat terhadap HAM mendapat reaksi keras dari bangsa-bangsa Afrika. Mereka mendeklarasikan piagam *The Right of Human Rights*. Piagam ini berisi HAM untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 20 - 21

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 20; lihat pula dalam Martin Griffith dan Terry O' Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2002), hlm. 141 -144

pembangunan berupa konsepsi alternatif dan implementasi hak-hak rakyat atas pembangunan. **Dijuluki HAM generasi III**

## E. HAM Dalam Perspektif Hubungan Internasional<sup>10</sup>

Dalam konteks hubungan internasional, upaya implementasi HAM mengalami benturan dan perdebatan. Kisaran perdebatan terletak pada masalah bagaimana interaksi antara implementasi nilai HAM yang bersifat universal-internasional dengan kedaulatan negara. *Dimanakah domain masalah hak asasi, apakah ini merupakan masalah domestik suatu negara yang kedaulatannya tidak dapat diganggu gugat ataukah ia sebagai masalah yang melampaui batas-batas kedaulatan negara?* Setiap upaya implementasi HAM secara internasional akan berhadapan dengan persoalan di atas.

Secara garis besar, perdebatan itu dapat dirangkum dalam dua pandangan berikut.

### 1. *Autonomy of States.*

- a. Pandangan ini menekankan pada pengakuan atas prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional. Masalah yang muncul pada negara tertentu, termasuk masalah hak asasi, dilihat sebagai masalah domestik. Pandangan ini didasarkan pada prinsip tidak campur tangan (*non-intervention*) urusan dalam negara lain.
- b. Pandangan *Autonomy of States* bersumber dari pemikiran klasik Thomas Hobbes, yaitu bahwa dalam hubungan internasional, masing-masing negara mempunyai kedudukan

---

<sup>10</sup> Semua data tentang HAM dalam konteks Hubungan Internasional yang di dalamnya terdapat perspektif kosmopolitan dan perspektif *Autonomy of State* ini dirangkum dalam buku Edy Prasetyono, *Hak Asasi Manusia Dalam Hubungan Internasional*, (Jakarta: CSIS, 1992), hlm. 1–24. Ini sekaligus permohonan ijin bagi penulis untuk menyadur sebagian besar isi buku tersebut.

yang sama; dalam keadaan *states of nature*. Karena itu, kedaulatan negara tidak dapat disubordinasi terhadap hukum yang lebih tinggi; suatu hukum internasional. Karena asas kedaulatan negara, hubungan internasional harus menghormati hak-hak menentukan nasib sendiri (*the rights of self-determination*) suatu negara.

- c. Pandangan ini lebih banyak melihat atau mengklaim negara sebagai pemegang kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri warganya. Karenanya, pandangan *Autonomy of States* dalam praktiknya cenderung mereduksi dan mensubordinasi hak asasi dengan dalih kedaulatan negara dan prinsip tidak campur tangan.

## 2. *Cosmopolitan Perspective*.

- a. Pandangan ini bertumpu pada pengakuan HAM pada tingkat individu secara universal. Karena itu, masalah hak asasi pada hakikatnya melampaui batas-batas nasional negara bangsa.
- b. Kosmopolitanisme mempertanyakan asumsi-asumsi moral prinsip kedaulatan negara yang menutup kemungkinan campur tangan oleh negara lain karena adanya pelanggaran hak asasi. Apalagi jika prinsip kedaulatan negara tersebut dipakai di balik sistem politik tidak demokratis.
- c. Dalam dunia yang mengalami saling ketergantungan, tidak relevan membatasi prinsip keadilan dalam batas-batas nasional yang sempit. Dengan kata lain, intervensi politik dan ekonomi diperlukan untuk menciptakan keadilan dunia, termasuk di dalamnya HAM.
- d. Lebih ekstrem lagi, sebagian besar penganut kosmopolitan berpendapat akan mentolerir kemungkinan intervensi militer ke negara yang dianggap melanggar HAM atau yang pemerintahannya tidak absah (*illegitimate*) atau tidak demokratis.

## F. Kritik terhadap *Autonomy of States* dan *Cosmopolitan Perspective*.<sup>11</sup>

### 1. Kritik terhadap *Autonomy of States*

- a. Terlalu menekankan negara sebagai muara kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri, padahal tidak semua negara terbentuk melalui proses politik yang demokratis. Dengan kata lain, *Autonomy of States* dikritik karena kelemahannya dalam membedakan aspek kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri dengan aspek keabsahan (*legitimate*) suatu negara. Hak menentukan nasib sendiri dan kedaulatan bukanlah bermuara pada negara, melainkan pada individu-individu.
- b. Pemikiran yang dikembangkan oleh *autonomy of states* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan keabsahan umum pada prinsip tidak campur tangan. Lebih jauh dikemukakan, jika memang prinsip kedaulatan dan menentukan nasib sendiri adalah universal bagi semua negara, baik yang demokratis maupun yang tidak demokratis, maka dua prinsip di atas sebenarnya tidak bermuara pada negara, melainkan pada warga negara dan individu. Karenanya, hak asasi harus diletakkan pada individu dan bersifat universal, melampaui batas-batas nasional suatu negara.

### 2. Kritik terhadap *Cosmopolitan Perspective*

- a. Pandangan Kosmopolitan terlalu melihat masalah HAM atas dasar kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri pada tingkat individu. Padahal perwujudan HAM bisa saja dicapai melalui mekanisme lain; tidak harus semata-mata dilihat dari kebebasan individu. Dalam hubungan ini, kosmopolitanisme

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

dinilai gagal dalam menelaah proses terbentuknya kemauan sosial bersama (*collective atau social self-determination*) yang memberi keabsahan pada sistem politik negara tertentu.

- b. Pandangan ini juga dikritik karena kurang memperhatikan aspek keragaman budaya dalam arti luas, dan dengan demikian tidak memberikan telaah yang dalam tentang sistem sosial politik dimana di dalamnya terjadi interaksi antara faktor budaya tertentu dan hak-hak individu. Bisa saja interaksi antara faktor budaya tertentu dan hak-hak individu menghasilkan suatu sistem politik yang keabsahannya tidak dapat diukur dari standar nilai-nilai kosmopolitanisme.
- c. Kosmopolitanisme dinilai memberi peluang intervensi militer ke negara lain. Dalam hubungan internasional dewasa ini, dimana eskalasi konflik dapat terjadi dalam waktu dan skala yang intensif, intervensi apa pun alasannya sangat membahayakan keamanan dan stbilitas internasional.
- d. Berkaitan dengan hak-hak sosial-ekonomi, adalah siapa yang harus bertanggung jawab dan bersedia menanggung beban secara global untuk mewujudkan hak-hak tersebut yang oleh kosmopolitanisme dipandang sebagai hak universal? Ini pertanyaan paling praktis tapi sulit untuk menjawab, apalagi mewujudkannya.

Meskipun *Autonomy of States* dan *Cosmopolitan Perspective* saling bertolak belakang baik dilihat dari asumsi-asumsi yang mendasari maupun pemikiran yang dikembangkan, terdapat kesamaan yang mendasar, yakni keduanya mengklaim HAM sebagai masalah fundamental dari demokrasi. Ironisnya, kesamaan klaim ini tidak dapat mencegah pertentangan seputar pengaplikasian isu HAM secara internasional atau proses internasionalisasi HAM. Pertentangan ini kemudian menjalar pada

munculnya penafsiran-penafsiran yang terbuka tentang HAM, yakni:

1. Suatu penafsiran Skeptis, bahwa isu HAM adalah alat negara-negara besar (Barat) untuk mengejar kepentingan mereka; sebagai alat atau strategi dalam kebijakan luar negeri, yang mengabsahkan adanya intervensi ke negara lain.
2. Penafsiran Optimis, bahwa isu HAM merupakan isu tak terelakkan dalam hubungan sebagai hasil proses sejarah yang telah dimulai manusia ketika mereka memikirkan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dalam hubungan ini, upaya untuk menegakkan dan melaksanakan HAM dilihat sebagai tugas kesejarahan manusia, setelah untuk beberapa lama terhalang oleh sistem monarki absolut di berbagai belahan dunia.

## **G. Kasus Pelanggaran HAM di Dunia**

1. Kasus August Pinochet (2000). Ia adalah mantan presiden Chile yang berhasil menjadi presiden dengan cara melakukan kudeta militer terhadap pemerintahan sipil Salvador Allende. Pada masa pemerintahannya, ia menerapkan kebijakan represif-militeristik. Lebih dari satu juta jiwa rakyat kecil, aktivis pro demokrasi, kelompok oposisi, dan kalangan LSM mati karena dibunuh secara sadis oleh rezim Pinochet melalui tangan-tangan militernya. Setelah tidak menjadi presiden lagi, ia dituntut oleh masyarakat internasional karena telah dianggap melakukan pelanggaran HAM berat sehingga harus di proses secara hukum melalui pengadilan HAM internasional (*international tribunal*). Di sini terjadi benturan antara hukum nasional dan hukum internasional.

2. Kasus Slobodan Milosevic. Ia adalah bekas Presiden Federasi Yugoslavia yang telah dianggap melakukan pembersihan etnis pada tahun 1990 -1995 atau ketika terjadi Perang Balkan. Ribuan nyawa dari etnis Bosnia meninggal gara-gara kekejaman si tangan besi ini. Saat ini ia telah mendekap di penjara setelah diproses di pengadilan perang internasional di Den Haag. Di sini terjadi benturan antara hukum nasional dan hukum internasional.
3. Kasus Pol Pot. Mantan orang berkuasa di Kamboja tahun 1975-1979 ini didakwa telah melakukan pembunuhan massal atas rakyatnya sendiri. Sekitar 4 juta nyawa tewas akibat kebijakan komunis yang diterapkannya. Sebelum menjalani proses pengadilan kejahatan perang internasional, ia dikabarkan telah meninggal dunia. Di sini terjadi benturan antara hukum nasional dan hukum internasional.
4. Kasus Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat (Agustus 1999). Setelah jajak pendapat selesai dilaksanakan, terjadi kerusuhan dan huru-hara di Timor Leste ini. Diberitakan ribuan orang mati alias tewas atas insiden ini. Pihak internasional menuduh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI dan POLRI, sebagai dalang dari kerusuhan ini. Mereka kemudian menuntut agar para petinggi TNI dan POLRI yang disinyalir terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Leste pasca jajak pendapat di hukum di pengadilan internasional. Namun, Indonesia menolak hal tersebut dan ingin menyelesaikan masalah tersebut di dalam negeri Indonesia sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sini terjadi benturan antara hukum nasional dan hukum internasional.

## H. Perkembangan HAM di Indonesia

### 1. Produk Hukum Nasional tentang HAM

- a. Undang-undang Dasar RI 1945. Sebelum mengalami amandemen (perubahan), HAM sebenarnya telah mendapat tempat dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, yang bersifat klasik, di dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28 dan pasal 29 ayat (2). Sedangkan yang bersifat sosial di dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (2), pasal 29, dan pasal 34. Pasal 30 dapat diklasifikasikan bersifat *legal rights* karena timbul sebagai pengaruh hukum. Memasuki masa reformasi, terjadi amandemen UUD 1945. Amandemen terjadi empat kali. Sedang yang terkait dengan HAM adalah amandemen kedua, yakni pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam amandemen kedua ini masalah HAM ditempatkan dalam Bab Khusus, yakni Bab XA. Pasal 28 UUD 1945 kemudian mengalami perubahan menjadi pasal 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J.
- b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
- c. UU No. 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- d. UU no. 39/1999 tentang HAM.
- e. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
- f. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2002.

### 2. Pembentukan Komnas HAM

Upaya menegakkan HAM di Indonesia secara berencana dimulai pada tanggal 7 Juni 1993 yang ditandai dengan pembentukan Komisi Nasional (KOMNAS) HAM oleh pemerintah Indonesia dengan dasar hukum Keputusan Presiden (Kepres) No.

50 Tahun 1993. Kemudian status hukum KOMNAS HAM diperkuat lagi dengan UU No. 39 Tahun 1999. Dalam melaksanakan tugasnya, KOMNAS HAM bersifat independen atau mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.

Tujuan pembentukan KOMNAS HAM ini adalah:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KOMNAS HAM melaksanakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Pengkajian
- b. Fungsi Penelitian
- c. Fungsi Penyuluhan
- d. Fungsi Pemantauan
- e. Fungsi Mediasi tentang HAM

### **3. Pengadilan HAM**

Pada tanggal 23 November 2000, UU No. 26/2000 dinyatakan berlaku. Sejak saat itu, dunia peradilan Indonesia diperkaya lagi dengan lahirnya pengadilan HAM dalam lingkungan peradilan umum. Walaupun demikian, tidak semua pelanggaran HAM masuk yurisdiksinya. Menurut pasal 4 UU No.26/2000, lingkup kewenangan pengadilan HAM dibatasi hanya mengenai pelanggaran HAM yang berat. Pasal 4 tersebut selengkapnya berbunyi:

**“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat”**

Dengan demikian, pelanggaran HAM yang biasa atau tidak berat tidak diadili oleh pengadilan HAM, melainkan oleh pengadilan negeri biasa. Oleh karena itu, perlu diketahui mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat dan sebaliknya mana yang ringan.

Pasal 7 UU No. 26/2000 menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat, meliputi: (1) kejahatan genosida (lebih jelasnya terdapat dalam pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000); (2) kejahatan terhadap kemanusiaan (lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 9 UU No. 26/2000).

Berhubung Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Ham diundangkan, maka menurut ketentuan undang-undang ini dapat dibentuk pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc yang berada di lingkungan peradilan umum ini bisa dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tertentu dan diangkat dengan keputusan presiden. Pengadilan HAM ad hoc ini diberi wewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU No.26/2000.<sup>12</sup>

Pengadilan HAM memberikan alternatif penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan diluar pengadilan HAM. Menurut Pasal 47 UU No.26/2000, penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan oleh suatu komisi,

---

<sup>12</sup> Bab VIII Pasal 43 Ayat:

- (1) Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc;
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul DPR RI. Berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden;
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan umum.

yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini dibentuk dengan suatu Undang-Undang.

#### **4. Ratifikasi Konvensi Internasional**

Dalam rangka memperkuat perangkat hukum tentang HAM, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, diantaranya adalah:

- a. *International Convention Against Apartheid in Sport* (Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olah Raga). Diratifikasi dengan Kepres No. 48/1993, tanggal 26 Mei 1993.
- b. *International Convention on the Rights of Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989). Diratifikasi dengan Kepres No. 36/1990, tanggal 25 Agustus 1990.
- c. *International Convention on the Elimination all forms Discrimination Against Women* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979). Diratifikasi dengan Keputusan UU No. 7/1984, tanggal 24 Juli 1984.
- d. *International Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Wanita tahun 1953). Diratifikasi dengan UU No. 68/1998, tanggal 17 Juli 1998.
- e. *International Convention Against Torture and Other-Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Internasional menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya tahun 1984). Diratifikasi dengan UU No. 5, tanggal 28 September 1998.
- f. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). Diratifikasi dengan UU No. 29/1999, tanggal 25 Mei 1999.

## 5. Statuta Roma<sup>13</sup>

*International Criminal Court* (Pengadilan Pidana Internasional) mulai tanggal 1 Juli 2002 dinyatakan mulai beroperasi, setelah 60 negara meratifikasinya, sebagai salah satu syarat mulai berlakunya pengadilan tersebut.

Menurut Artikel Statuta Roma, yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) meliputi:

- a. *the crime of genocide* (kejahatan genosida)
- b. *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan)
- c. *war crime* (kejahatan perang)
- d. *the crime of aggression* (kejahatan agresi)

Tapi, ternyata Indonesia tidak termasuk di antara ke-60 negara yang telah meratifikasi statuta Roma tersebut. Kendati demikian, tidaklah berarti bahwa tidak ada kemungkinan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diadili oleh ICC, walaupun pelanggaran HAM berat tersebut lolos dari jangkauan pengadilan HAM ad hoc. Hal ini dapat terjadi seandainya DK PBB berhasil mengeluarkan resolusi yang menetapkan batas yurisdiksi ICC.

Seperti dimaklumi bahwa dalam UU No. 26/2000 hanya dikenal kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Walaupun pengadilan HAM tidak menangani kejahatan perang, tetapi UU No.26/2000, yakni pasal 42 ayat (1) mengatur pertanggungjawaban seorang komandan militer.

---

<sup>13</sup> Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 117.

## BAB IV

---

### ***GOOD GOVERNANCE***

### **DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**D**alam kajian hubungan internasional, konsep “*good governance*” merupakan sebuah konsep yang relatif baru. Masuk dalam agenda studi hubungan internasional pada awal berakhirnya Perang Dingin atau pada awal dasawarsa 1990-an. Pada awalnya, konsepsi *good governance* berasal dari disiplin ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan, kemudian menyebar ke berbagai disiplin studi ilmu sosial yang lain, termasuk studi hubungan internasional.

Konsep *good governance* pertama kali dicetuskan oleh sebuah badan dunia yang bernaung di bawah struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (*United Nations, UN*), yakni *United Nations Development Programme* (UNDP). Konsep ini kemudian disebarluaskan oleh UNDP ke seluruh negara di dunia

melalui lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF.

Kemudian Bank Dunia dan IMF memasukkan konsepsi *good governance* ini ke dalam SAP (*Structural Adjustment Programme*) mereka masing-masing. Ketika negara-negara di dunia, khususnya negara-negara sedang berkembang meminta bantuan dana kepada Bank Dunia dan IMF, maka kedua lembaga keuangan internasional ini menyodorkan syarat agar negara tersebut melaksanakan *good governance* dalam pemerintahannya. Jika negara tersebut mau menerapkan syarat tersebut, maka negara itu akan diberi bantuan dana. Akan tetapi bila negara tersebut tidak mau melaksanakan syarat itu, maka negara tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dana.

Mulailah kemudian negara-negara di dunia, khususnya negara-negara Dunia Ketiga yang meminta bantuan dana kepada IMF dan Bank Dunia melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pemerintahannya agar supaya dapat dikategorikan dan dicap sebagai negara yang melaksanakan *good governance* dengan harapan dapat memperoleh bantuan dana.

Sebagai konsep yang berasal dari Barat, tentunya konsep *good governance* tidak bebas nilai. Konsepsi *good governance* terkait dengan nilai-nilai liberal Barat dimana jika dilihat dari kacamata ideologi, ada pesan-pesan dan misi-misi tertentu yang ingin dibawa dan disampaikan oleh konsep tersebut, baik misi yang bersifat positif maupun misi yang bersifat negatif.

Oleh karena itu, tulisan di bawah ini akan menguraikan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan *good governance*? Apa perbedaannya dengan *government*? Bagaimana hubungan antara *good governance* dengan lembaga ekonomi & politik dunia?

dan Perspektif ideologi apa yang berada dibalik konsep *good governance*?

## A. Pengertian *Good Governance*

Menurut World Bank, yang dimaksud dengan konsep *governance* adalah:<sup>1</sup> *“The way state power is used in managing economic and social resources for development society”*. Dari definisi tersebut dapat diperoleh sebuah gambaran bahwa arti dari *governance* adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. “Cara” di sini lebih menunjukkan pada hal-hal yang bersifat teknis.

Senada dengan pendapat World Bank di atas, UNDP mengemukakan bahwa definisi *governance* adalah: *“The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels”*. Artinya, kata *governance* merujuk pada penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini tekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Berbicara tentang kewenangan berarti menyangkut domain sektor publik, bukan sektor privat.

Berdasarkan definisi UNDP di atas, *governance* mempunyai tiga kaki, yakni politik, ekonomi, dan administrasi, yakni:

1. *Economic Governance*. Artinya, tata pemerintahan yang meliputi semua proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara

---

<sup>1</sup> Tentang definisi, karakteristik dan komponen dari *good governance* ini di ambil dari United Nations Development Programme, *Participatory Local Governance, Technical Advisory Paper I*, Local Initiative Facility for Urban Environment (LIFE), (New York: 1997).

penyelenggara ekonomi. Sektor pemerintah diharapkan tidak terlalu tercampur tangan dalam sektor ekonomi dan pasar, karena intervensi pemerintah ke dalam pasar hanya akan menciptakan distorsi pasar.

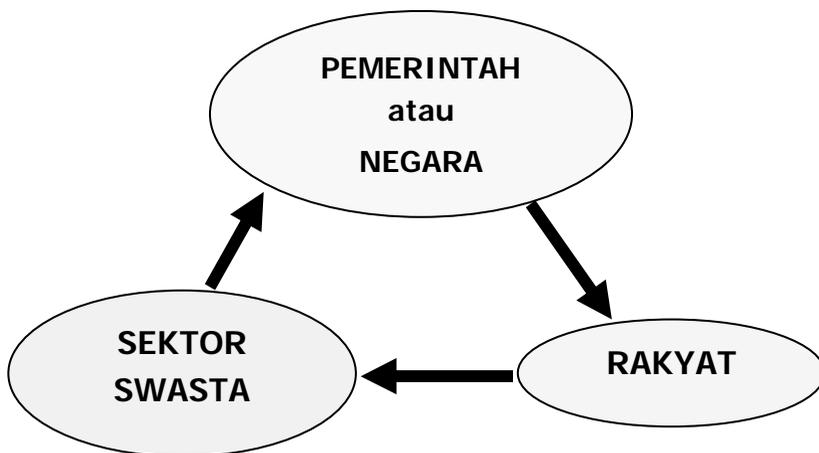
2. *Political Governance*. Artinya, tata pemerintahan yang meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh birokrasi maupun antara birokrasi dengan politisi. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tidak hanya pada tataran implementasi kebijakan saja, melainkan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
3. *Administrative Governance*. Artinya, tata pemerintahan yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik yang sah.

Masih berkaitan dengan hal di atas, menurut UNDP, *governance* memiliki tiga domain, yaitu (1) Negara atau Pemerintah (*state*); (2) Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*); (3) Masyarakat (*society*).

Ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Sektor pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, seperti pembuatan keputusan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan dengan menggerakkan aktifitas-aktifitas ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. Di sini sektor pemerintah menjadi subyek sekaligus obyek dari sektor

pemerintah dan sektor swasta.<sup>2</sup> Berikut ini adalah gambar hubungan antara ketiga sektor tersebut:

**Gambar 1**  
**Hubungan antara Negara, Swasta, dan Masyarakat**



Apabila proses *Governance* yang dijalankan oleh ketiga domain tersebut berlangsung selaras, serasi dan seimbang, maka *governance* tersebut masuk dalam kategori yang baik (*good*). Oleh karena itu, perpaduan antara konsep *good* dan konsep *governance* menciptakan sebuah konsep yang terkenal dewasa ini, yakni *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Arti *good* dalam *good governance* meliputi dua pemahaman sebagai berikut: *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan

---

<sup>2</sup> Menurut Taschereau dan Campos, *good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni Pemerintah (*government*), Rakyat (*citizen*), atau *civil society*, dan Usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Lihat Suzanne Taschereau dan Jose Edgardo L. Campos, *Building Government-Citizens-Business Partnerships*, (Ottawa, Canada: Institute of Governance, 1997).

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>3</sup>

Dengan demikian, tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi tersumbat.

Tata Pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan Lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Tata pemerintahan yang baik bukanlah satu hal yang baru. Nabi Muhammad S.A.W telah mempraktikkan tata pemerintahan semacam ini di Madinah. Di berbagai pelosok Nusantara, seperti di Sumatra Barat, Bali, dan banyak Daerah lainnya, Masyarakat tradisional telah menerapkan tata pemerintahan yang baik. Konsep yang kini dikemas dalam kata-kata modern ini semenjak dahulu sesungguhnya telah dijalankan di tingkat desa di hampir semua daerah di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Sedarmayanti, *Good governance (Tata Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar maju, 2003), hlm. 6.

## **B. Karakteristik *Good Governance***

Berdasarkan pada definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri, yakni:

### **1. Partisipasi**

Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### **2. Supremasi Hukum**

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

### **3. Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

### **4. Cepat Tanggap**

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

## **5. Membangun Konsensus**

Tata Pemerintahan Yang Baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok Masyarakat, dan bila mungkin, consensus dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur.

## **6. Kesetaraan**

Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

## **7. Efektif dan Efisien**

Proses-proses pemerintahan dan Lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga Masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

## **8. Bertanggung Jawab**

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sector swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada Masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

## **9. Visi Strategis**

Para pemimpin dan Masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan Pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menurut Denis Osborne, syarat bagi pencapaian *good governance* adalah sebagai berikut: (1) peningkatan partisipasi rakyat; (2) peningkatan akuntabilitas pemerintah; (3) pengurangan peran dan belanja militer.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Alexander Love, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menciptakan *good governance* adalah sebagai berikut: (1) Adanya aturan main hukum yang jelas dan pasti; (2) Peningkatan manajemen sektor publik; (3) Strategi pemberantasan Korupsi (strategi anti korupsi); (4) pengurangan belanja militer dan kontrol terhadap anggaran militer serta menciutkan jumlah personel militer.<sup>5</sup>

### C. Perbedaan *Government* dan *Governance*

Setelah mengetahui definisi *governance* dan *good governance* di atas, akan diuraikan pula tentang perbedaan antara *governance* dan *government*. Tabel 1 berikut ini akan menjelaskan secara jelas perbedaan di antara keduanya.

**Tabel 1**  
**Perbedaan antara *Governance* dan *Government***

No.	Unsur Perbandingan	<i>Government</i>	<i>Governance</i>
1	Pengertian	Dapat berarti badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu negara	Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan

<sup>4</sup> Denis Osborne, "Action For Better Government", A Role For Donors, *IDS Bulletin*, Vol. 24, No. 1 (1993).

<sup>5</sup> Alexander Love, *Development Cooperation*, (Paris: OECD, 1994), hlm. 30.

2	Sifat Hubungan	Hirarki, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah ada di bawah	Hierarki, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi
3	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu institusi, yaitu institusi pemerintahan	Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu: 1) Sektor publik 2) Sektor Swasta 3) Masyarakat
4	Pemegang peran yang dominan	Sektor Pemerintah	Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing
5	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat
7	Format dan Substansi ( <i>Format &amp; Substance</i> )	Berisi lembaga dan personil (Bentuk). Artinya, berisi lembaga-lembaga dan struktur-struktur politik, seperti legislatif,	Berisi Kegiatan dan proses pemerintahan (Isi). Artinya, berisi manajemen dan kualitas memerintah. Bukan struktur

		eksekutif, yudikatif; dan Pejabat-pejabat politik, seperti presiden, perdana menteri, dan menteri	pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektifitas penerapan kebijakan itu.
--	--	---	---

Sumber: Dikutip dari Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2002), hlm. 32; Mohtar Mas'oeed, *Ekonomi Politik Pembangunan*, Diktat Kuliah, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2001), hlm. 276-277.

## BAB V

---

# TERORISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

**A**wal abad ke-21 sekarang ini, dunia masih terus menyaksikan rentetan perubahan cepat dan mendasar yang pada gilirannya mempengaruhi proses transformasi pada konfigurasi politik dan ekonomi global. Secara politik, muncul gelombang demokrasi yang sarat akan nilai-nilai kebebasan dan persamaan. Secara ekonomi, timbul gejala globalisasi ekonomi pasar yang kental akan nuansa kapitalisme global dan perdagangan bebas. Perubahan politik dan ekonomi global tersebut telah menempatkan negara-bangsa pada pola hubungan saling ketergantungan (*inter-dependensi*) dan saling keterkaitan (*inter-linkage*).

Bersamaan dengan dinamika perubahan global ini, telah lahir pula isu lama tapi menjadi baru dan hangat lagi, yang sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan politik ekonomi global saat

ini. Isu ini adalah isu seputar masalah terorisme. Meskipun isu mengenai terorisme telah ada secara dominatif pada masa Perang Dingin dan sesudahnya, namun klimaks dari menguatnya gejala ini adalah meletusnya tragedi WTC dan Pentagon, AS, pada tanggal 11 September 2001 lalu. Tragedi kemanusiaan yang memakan korban ribuan orang ini telah menjadi titik tolak lahirnya isu terorisme menjadi isu global masa kini. Isu terorisme telah mampu menyamai dan mungkin juga menggeser isu-isu dalam agenda internasional sebelumnya, seperti masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter, demokratisasi, *good governance*, dan lingkungan hidup.

Konsekuensi dari mencuatnya isu terorisme ke permukaan ini adalah lahirnya teroris sebagai “aktor” yang sangat diperhitungkan di atas pentas internasional. Hal ini sejalan dengan kecenderungan dalam hubungan internasional bahwa aktor politik global tidak lagi terbatas pada negara (*nation state actor*) sebagaimana diasumsikan oleh *Perspektif Realis*, melainkan juga meliputi unsur-unsur non negara (*non state actor*), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM, NGO), Perusahaan Multinasional (PMN), Individu, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perjuangan Kemerdekaan, dan Organisasi Terorisme Internasional. Terorisme telah hadir secara nyata dalam kehidupan antar bangsa. Saat ini, setiap negara, terutama AS dan negara-negara Eropa Barat disibukkan oleh ulah para teroris yang siap mengancam kehidupan umat manusia di dunia.<sup>1</sup>

## A. Definisi Terorisme

Lebih dari seperempat abad, para sarjana politik dan hubungan internasional telah mencoba membuat definisi

---

<sup>1</sup> Agus Subagyo, “Terorisme Dalam Hubungan Internasional,” *Pikiran Rakyat*, 1 November 2002.

“Terorisme”, namun hingga kini belum ada yang berhasil mendefinisikannya secara lengkap dan obyektif sehingga dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat ilmiah (*Scientific Community*). PBB sendiri mengalami kesulitan mendefinisikan terorisme yang dapat diakui secara universal. Ketidakberhasilan ini telah menyebabkan keaburan dan ketidakpastian tentang definisi terorisme.<sup>2</sup> Berikut ini akan diuraikan berbagai definisi tentang terorisme.

1. Menurut “Oxford English Dictionary”, terorisme memiliki dua arti pokok, yaitu:
  - a. Pertama, sebagai suatu sistem dari teror, yaitu pemerintah yang menggunakan intimidasi yang ditunjukkan dan dilakukan oleh partai yang berkuasa di Perancis selama revolusi dari tahun 1789-1794.
  - b. Kedua, sebagai penerapan metode intimidasi, yaitu suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk dilaksanakan dengan teror oleh mereka terhadap siapa tindakan itu ditujukan.
2. Menurut Noam Chomsky,<sup>3</sup> terorisme sebenarnya adalah sebuah istilah yang merujuk kepada aksi kekerasan yang dilakukan oleh siapapun (negara atau bukan) untuk tujuan-tujuan politik tertentu.
3. Menurut Walter S. Jones<sup>4</sup>, terorisme adalah sebuah tindakan politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis nasional dan transnasional maupun negara sebagai sponsornya. Keterlibatan negara bisa berupa pendanaan hingga perlindungan hukum.

---

<sup>2</sup> Sutejo Atmowasito, “Terorisme Internasional: Pengertian, Bahaya, dan Pencegahannya,” *Honeste Vivere*, Jakarta: UKI, 1993, hlm. 11.

<sup>3</sup> Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, terjemahan dari *Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World*, pent. Hamid Basyaib, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 20.

<sup>4</sup> Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia Baru*, (terj.), (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 349 – 351.

4. Menurut James Adams<sup>5</sup>, terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.
5. Menurut Christopher Greenwood<sup>6</sup>, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang juga tindakan kriminal. Apapun pembenaran moral atau politik yang dikemukakan, namun semua bentuk kegiatan teroris selalu melibatkan tindakan kriminal: membunuh, menyerang, menyandera, membajak, membakar, sabotase, dan tindakan-tindakan lain yang keji. Semuanya itu merupakan perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. Sifat kriminal dari operasi teroris membedakannya dari operasi gerilya dan insurgensi yang masih dipandang sebagai aksi militer, kendati tidak diakui sebagai perang konvensional.

**Catatan:**

- Karena tidak adanya definisi yang jelas dan disepakati atau diakui secara universal, maka yang muncul kemudian adalah ketidakseragaman setiap negara dalam mengambil tindakan terhadap warga negaranya. Suatu negara akan menganggap

---

<sup>5</sup> James Adams, *The Financing of Terror: How the Group That Are Terrorizing the World Get the Money to Do It*, (New York: Simon & Schuster, 1986), hlm. 6.

<sup>6</sup> Christopher Greenwood, "The Concept of War in Modern International Law", *International and Comparative Law Quarterly*, No. 36, 1987, hlm. 283 – 306.

seorang itu teroris, sementara negara lain menganggap orang tersebut sebagai pejuang/pahlawan. Seperti bunyi sebuah ungkapan “one’s man terrorist is another man freedom fighter”. Karenanya, memang tidak mudah bagi suatu negara untuk mengambil tindakan terhadap seseorang atau organisasi tertentu yang dicurigai sebagai teroris sepanjang masih belum jelas ketentuannya.

- ❑ Sulit sekali membedakan antara organisasi terorisme dengan organisasi perjuangan kemerdekaan. Di sinilah perlu dibedakan antara aspek “Cara” dan aspek “Tujuan” dari definisi terorisme.

## B. Tipologi Terorisme<sup>7</sup>

1. Terorisme Negara. Menurut perspektif Weberian, negara dianggap sebagai unit politik yang memiliki legitimasi di dalam menggunakan teror atau kekerasan terhadap warga negaranya. Tindakan kekerasan dan teror ini dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya untuk menjamin ketaatannya.
2. Terorisme Non Negara. Artinya, terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar struktur pemerintahan. Biasanya, identifikasi teroris non negara ini sangat sulit karena sifatnya yang transnasional sehingga berimplikasi pula pada masalah hukum seperti status kewarganegaraan dan tempat kejadian yang berada pada negara-negara yang berbeda. Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus pembajakan pesawat terbang, yang pelaku, korban dan sasarannya berasal dari lain negara.

---

<sup>7</sup> Amir Tahery, *Holy Terror: The Inside Story of Islamic Terrorism*, (London: Sphere Books Limited, 1987), hlm. 4 – 5. Bandingkan dengan pendapat Martin Griffith dan Terry O’Calaghan, yang membagi terorisme menjadi 4 jenis, yakni: (1) *Transnational Organized Crime*; (2) *State-sponsored Terrorism*; (3) *Nationalistic Terrorism*; dan (4) *Ideological Terrorism*, dalam buku berjudul *International Relations: The Key Concepts*, (London: Roudlegde, 2002), hlm. 307 – 308.

Kelompok teroris bukan negara dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok.

- a. *Teroris Nasional*. Yaitu kelompok teroris yang wilayah aktivitasnya berada dalam suatu *nation state*. Contoh: IRA, Basque ETA, Kurdish, MILF di Filipina.
  - b. *Urban Guerrilla Group*. Yaitu kelompok teroris yang digambarkan sebagai kelompok bersenjata yang diasosiasikan sebagai unit polisi sebelumnya kelompoknya kalah atau diisolasi. Contoh: *The Red Brigades* (Italia), *Red Army Faction* (Jerman), *The Weatherman* (Amerika).
  - c. *Old Style Guerrilla*. Yaitu kelompok teroris di Amerika Latin yang menjadikan Marxisme dan Leninisme sebagai ideologi perjuangannya. Contoh: Sandinista.
  - d. *Publicity Seeking*. Yaitu kelompok teroris yang memiliki tujuan mencari publisitas dan perhatian dari masyarakat internasional. Contoh: PFLP (*People's Front for Liberation of Palestine*) yang menarik perhatian masyarakat dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina, dan ANC (*African National Congress*) pimpinan Nelson Mandela yang berusaha menarik perhatian terhadap ketidakmampuannya menghadapi rezim Apartheid di Afrika Selatan.
  - e. *Religiusm Terrorism*. Kelompok teroris ini memiliki perbedaan tegas dengan kelompok teroris lainnya. Terorisme ini memiliki ideologi yang berbeda dengan kelompok teroris lainnya. Mereka menyebut aksinya sebagai perang suci atau *holy war*, dimana tujuan akhirnya adalah kemenangan total, tanpa ada negosiasi ataupun konsesi.
3. Terorisme yang disponsori oleh negara. Artinya, negara membantu atau mendukung gerakan-gerakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris bukan negara. Bantuan dan dukungan ini berupa pendanaan keuangan,

fasilitas komunikasi dan informasi, dan fasilitas persenjataan militer. Menurut Charles Sterling<sup>8</sup>, AS dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin merupakan dua negara yang paling sering membantu kegiatan kelompok-kelompok teroris untuk kepentingan politik kedua negara. Libya, Kuba, Iran, Yaman, dan Korea Utara juga banyak disebut sebagai negara-negara yang banyak terlibat dalam aksi-aksi terorisme dunia.

### C. Karakteristik Terorisme<sup>9</sup>

1. Pengeksploitasian manusia secara sistemik. Artinya, kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan/kekejaman/ penganiayaan fisik.
2. Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik.
3. Adanya unsur pendadakan/kejutan.
4. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.
5. Sasaran pada umumnya non kombatan.
6. Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional

### D. Tujuan Terorisme<sup>10</sup>

1. Memperoleh konsesi-konsesi tertentu, seperti uang tebusan, pembebasan tahanan (politik), dan penyebarluasan pesan.
2. Memperoleh publisitas luas. Teroris ingin menarik perhatian masyarakat luas kepada aspirasi dan perjuangan dan pengakuan terhadap eksistensinya sebagai pihak yang bersengketa. Karena biasanya, kelompok teroris itu kecil, maka untuk maksud itu,

---

<sup>8</sup> Claire Sterling, *The Terror Network*, (Holt: Rinehart & Winston, 1981), hlm. 5 – 24.

<sup>9</sup> Alex Schmid, *Political Terrorism: A Research Guide*, (New Jersey: Trans Action Books, 1984), hlm. 88.

<sup>10</sup> Hasnan Habib, *Kapita Selektta Hubungan Internasional*, (Jakarta: CSIS, 1997), hlm. 569.

- aksi terorisme yang dilakukan haruslah cukup dramatik dan menggemparkan.
3. Menimbulkan kekacauan luas, demoralisasi, dan disfungsi sistem sosial. Ini adalah maksud tipikal dari kaum revolusioner, yakni kekacauan dan anarkis.
  4. Memancing kontrateror dari pemerintah sehingga menimbulkan situasi yang akan menguntungkan para teroris, yang akhirnya mungkin saja dapat menggulingkan pemerintah.
  5. Memaksakan kepatuhan dan ketaatan. Ini adalah maksud yang tipikal dari suatu pemerintah totaliter/fasis/diktator/monolitik. Teror yang dilakukan pemerintah (*state terrorism*) terhadap rakyatnya sendiri bertujuan untuk menancapkan kekuasaan mutlak pada rakyat.
  6. Menghukum yang bersalah atau dipandang sebagai simbol dari sesuatu yang jahat/salah.

#### **E. Sekilas Tentang Sejarah Munculnya Terorisme<sup>11</sup>**

1. Pada Masa Yunani Kuno (abad ke-4 SM). Terorisme dijadikan sebagai sarana perjuangan politik seperti ditunjukkan oleh ahli sejarah Yunani kuno, Xenophone (430-349), yang pernah mengulas tentang manfaat dan efektifitas perang urat syaraf untuk menakut-nakuti musuh dalam perang Athena-Sparta.
2. Pada zaman modern (abad ke-18), terorisme muncul seiring dengan pertumbuhan industrialisasi kapitalis dalam waktu mana terlihat semakin intensifnya konflik-konflik antar kelas dalam negara-negara kapitalis.
3. Pada masa kontemporer, terorisme semakin mendapatkan perhatian internasional sejak tahun 1960-an dan 1970-an ketika

---

<sup>11</sup> Yang Hui, "On Current International Terrorism and Struggle against It," *International Strategic Studies*, No. 1, (China Institutes for International Strategic Studies, January, 2002), hlm. 8.

dunia masih terbelah dalam Perang Dingin. Pada awal tahun 1970-an, terorisme telah secara resmi diakomodasi oleh PBB ketika sidang MU-PBB ke-27 tahun 1972 membentuk sebuah Komite Ad Hoc yang secara khusus menangani masalah terorisme.

4. Dari tahun 1960-an hingga 1980-an, menurut laporan badan *think tank* AS, *Rand Corporation* (1985), menyebutkan bahwa aksi terorisme meningkat tajam yang setiap tahunnya mencapai 10-15 persen. Peningkatan yang terjadi secara signifikan ini tidak hanya secara kuantitatif dalam cakupan negara yang terkena, tetapi juga secara kualitatif menyangkut metode yang digunakan yang semakin sulit dideteksi. Secara rinci dan berurutan, aksi terorisme telah memakan korban beberapa pemimpin dunia, seperti Presiden Mesir, Anwar Sadat, PM India, Indira Gandhi, PM Inggris, Margaret Thatcher dan PM India, Rajiv Gandhi.<sup>12</sup>
5. Pada masa pasca Perang Dingin, gerakan terorisme mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam tahun 1995 saja, setidaknya terdapat ada 56 organisasi teroris internasional yang aktif. Pada tahun 1999, sejumlah organisasi teroris internasional merekrut hampir 400 aktifitas teroris dalam berbagai bentuk dan kasus-kasus aksi teroris merebak menjadi 420 pada tahun 2000.
6. Peristiwa tanggal 11 September 2001. Hancurnya Gedung WTC dan Gedung Pentagon oleh teroris. Jumlah korban meninggal lebih dari 3 ribu orang. Menurut AS, pelakunya adalah Jaringan Al Qaeda.
7. Peristiwa tanggal 12 Oktober 2002. Pemboman Sary Club & Pady's Café oleh teroris yang menelan korban meninggal berjumlah 192 orang. Menurut pemerintah Indonesia, pelakunya adalah Jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

---

<sup>12</sup> Sutejo Atmowasito, *Op Cit.*

## F. Dampak Global & Regional Terorisme: Kasus WTC & Pentagon

### 1. Dampak Global

- a. Dalam konteks global, dunia telah terbelah menjadi dua bagian yang terpisahkan, yakni antara ikut kubu AS memerangi terorisme global atau ikut mendukung terorisme Global. Negara-negara di dunia dihadapkan pada pilihan itu dan mau tidak mau harus memilih di antara keduanya. Suasana politik yang demikian mengingatkan kita pada masa Perang Dingin dimana dunia terbelah menjadi dua blok: Komunis dan Kapitalis. Batas dan ukuran suatu negara dianggap teman atau musuh ditentukan oleh dua ideologi tersebut. Saat ini pun, hubungan antar bangsa dikondisikan pada batas-batas terorisme global. Hubungan internasional telah dipetakan dalam bentangan garis pembatas antara zona anti teroris dan zona teroris.
- b. Makna yang bisa diambil dari perubahan-perubahan besar politik dunia ini adalah terjadinya arus balik orientasi dan isu *high politics*, yang mencakup kajian militer, keamanan, dan perang. Pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin, orientasi dan isu *high politics* sangat menonjol. Namun, berakhirnya Perang Dingin bergeser menjadi *low politics* yang mencakup ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, hak asasi manusia, *good governance*, *civil society* dan demokrasi. Di awal abad ke-21 ini, kembali ke *high politics*. Hal ini dipicu oleh serangan teroris ke Gedung WTC dan Pentagon, AS.

#### **Catatan:**

- *High Politics*: sebenarnya sama substansinya dengan *Security Issues* dan *Conventional Issues*. Biasanya perspektif yang digunakan adalah perspektif realis.

- ❑ *Low Politics*: Sebenarnya sama substansinya dengan *Non Security Issues* dan *Non Conventional Issues*. Biasanya perspektif yang digunakan adalah perspektif pluralis.

## 2. Dampak Regional

Isu terorisme global yang menggema di hampir seluruh penjuru dunia telah menimbulkan stabilitas keamanan regional menjadi kacau dan tidak harmonis. Hal ini diperkuat lagi dengan tampilan politik luar negeri AS pasca tragedi WTC dan Pentagon yang sangat represif, ofensif dan reaktif terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan bagi perdamaian. Atas nama gerakan antiterorisme global, AS kerap kali menuduh, men-cap, dan menetapkan negara-negara, yang diduga secara sepihak, terlibat dalam jaringan terorisme global sebagai musuh yang harus diperangi. Ini bisa dilihat dari rentetan pernyataan Bush yang cenderung menyudutkan beberapa negara seperti Irak, Iran dan Korea Utara yang dituduh sebagai poros kejahatan, serta Russia, Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Libia dan Suriah yang dituduh telah mengembangkan senjata pemusnah massal. Akibat dari kampanye antiterorisme AS yang disertai tekanan-tekanan politik itu telah menciptakan ketidakharmonisan kawasan.

- a. Di Asia Tenggara, kehadiran pasukan AS di Philipina, pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, yang menuduh Indonesia sebagai sarang teroris, dan isu kehadiran pasukan AS di Indonesia telah memunculkan ketegangan-ketegangan baru di masing-masing negara.
- b. Di Asia Timur, proses reunifikasi dua Korea juga mengalami hambatan karena berbagai pernyataan Bush yang mendiskreditkan Korea Utara berkaitan dengan senjata pemusnah massal dan Korea Utara sebagai pendukung gerakan teroris. Jepang dan Korea Selatan pun menaruh curiga pada Korea Utara.

- c. Di Asia Selatan, penghancuran AS terhadap rezim Taliban di Afghanistan dan perubahan politik luar negerinya terhadap Pakistan dan India juga ikut meresahkan kawasan ini.
- d. Di Timur Tengah, invasi AS terhadap Irak atas nama perang global melawan terorisme, dan konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina yang penuh dengan aksi-aksi teror telah menciptakan keresahan di kawasan paling panas di dunia ini.
- e. Pendek kata, konfigurasi politik kawasan telah mengalami kegoncangan yang amat membahayakan. Masing-masing negara dalam kawasan saling curiga dan menuduh satu sama lain meskipun tidak ada bukti yang akurat. Solidaritas dan solidaritas telah terkoyak oleh isu terorisme global dan kampanye perang AS melawan terorisme global.

### **G. Upaya Mencegah Praktik Terorisme<sup>13</sup>**

1. Menciptakan sistem politik yang demokratis. Artinya, melibatkan semua pihak untuk terlibat atau mengikuti proses-proses politik, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan.
2. Penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum sebagai salah satu pengembangan sistem politik yang stabil dan dinamis perlu diperhatikan.
3. Menghindarkan munculnya pelapisan sosial. Ketimpangan pendapatan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan harus semaksimal mungkin dihilangkan. Pembangunan harus membebaskan hubungan antar negara dari pola relasi yang asimetris.
4. Kerjasama internasional dan regional. Karena lingkup dan gerakan terorisme adalah lintas batas antar negara atau bersifat

---

<sup>13</sup> Sutejo Atmowasito, *Ibid.*, hlm. 13.

global (*globalism Terrorism*), maka diperlukan penanganan secara bersama, baik ditingkat regional (Uni Eropa, ASEAN, NATO, Liga Arab, OKI, dll.), maupun internasional (PBB).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama masalah-masalah politik dan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya jurang pemisah yang dalam antara kelompok kaya dan kelompok miskin belum dapat ditanggulangi, teroris masih tetap bertahan. Selain itu, dominasi politik negara-negara barat dalam tatanan sistem internasional juga menjadi pemicu terorisme internasional, karena terorisme bukan aksi tapi reaksi, yang merefleksikan ketidakpuasan masyarakat atas situasi dan kondisi yang tengah dihadapi. Untuk mengatasi terorisme harus diketahui dan diselesaikan akar permasalahan yang sebenarnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sekarwarsini Djelantik, *Terorisme Internasional: Aktor Bukan Negara dalam Hubungan Internasional*, dalam Andre H. Pareira (ed.), *Perubahan Global dan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 193 – 194.

## BAB VI

---

# GLOBALISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

**D**alam kajian Hubungan Internasional, konsepsi globalisasi adalah sebuah konsep yang paling banyak mengundang diskusi dan perdebatan. Para negarawan, pengambil kebijakan, aktivis organisasi internasional, tokoh-tokoh NGO, pengusaha, politisi, dan teoritis Hubungan Internasional tidak segan-segan memperdebatkan globalisasi, baik di seminar, lokakarya, maupun dalam konferensi-konferensi dalam level nasional dan internasional.

Pada intinya perdebatan itu berkisar tentang hal-hal seputar konsekuensi globalisasi terhadap eksistensi negara (yang di dalamnya terdapat kedaulatan nasional) dan transnasionalisme sebagai wacana penggerak akselerasi globalisasi. Negara dan transnasionalisme adalah dua konsep yang harus mendapat

perhatian untuk dibahas sebelum membedah apa yang dinamakan dengan globalisasi.

Namun demikian, Sebelum membahas lebih jauh tentang konsepsi negara dan transnasionalisme, ada baiknya kalau kita simak sebuah cerita sebagai ilustrasi yang menggambarkan karakteristik dari globalisasi berikut ini:<sup>1</sup>

“Seorang pengusaha Taiwan pemegang paspor Amerika Serikat (AS) berangkat dari Frankfurt menuju Bangkok menggunakan pesawat Boeing 747 yang dibuat di Seattle, AS, dengan bendera penerbangan *Cathay Pacific Airways* yang bermarkas besar di Hongkong dengan pramugari dari Singapura, Philipina, India, Jepang, Indonesia, dan Thailand. Selama perjalanan di dalam pesawat, para penumpang disuguhkan program hiburan film-film Amerika, dan berita-berita dari BBC (penyiar berita TV yang bermarkas besar di London, Inggris) dan CNN (penyiar berita TV yang bermarkas besar di Atlanta, AS), serta suguhan hidangan dengan menu daging sapi New Zealand dan minuman Anggur merah buatan Perancis. Pengusaha Taiwan ini juga tidak lupa membeli jam tangan Swatch buatan Swiss yang ditawarkan melalui *in-flight duty free shopping*. Sampai di Bangkok, dari Airport dijemput oleh Limousine Service yang dikelola oleh Hertz, sebuah perusahaan lokal yang mendapat lisensi (*franchise*) dari AS dan mobil yang digunakan adalah Toyota. Di Bangkok, pengusaha ini menginap di Hotel Hilton (jaringan hotel AS) dan membayar hotel dengan menggunakan kartu kredit American Express. Pagi harinya, sebelum sarapan pagi membaca koran *International Herald Tribune* dan *Asian Wall Street Journal* dan melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dari kamar hotel yang

---

<sup>1</sup> Ilustrasi yang menggambarkan karakteristik globalisasi ini dikutip dari Laksamana Sukardi “Relasi Negara dan Pasar dalam Sistem Global”, *Jurnal Media Inovasi*, No. 2, Thn. X/2000, hlm. 22-23.

menyediakan pesawat telepon merek Gold Star buatan Korea Selatan. Keesokan harinya, pengusaha Taiwan ini terbang ke Singapura dan menginap di Hotel Crown Prince (jaringan hotel Jepang), karena telah diatur oleh sahabatnya yang seorang warga negara India yang bekerja di Citibank Singapura. Karena bosan di hotel, pada sore hari sambil menunggu teman yang akan datang, dia jalan-jalan ke Department Store Isetan (Jaringan Department Store Jepang) yang terletak tidak jauh dari hotel, di situ ia membeli sepasang sepatu tenis merek Reebok yang dibuat di Indonesia. Sekembalinya di hotel, ia mandi dan keramas dengan menggunakan shampoo merek Wella (buatan Jerman) yang disediakan hotel dan tidak lupa minum kopi instant Nestle (buatan Swiss). Pada malam harinya acara makan di restoran Italia yang diteruskan dengan acara karaoke di sebuah Pub dan menyanyikan lagu Pop Mandarin kesukaannya, menggunakan laser disc player merek Sony. Pakaian Musim dingin yang Anda temui di toko-toko di New York, mungkin telah melalui perjalanan yang lebih jauh dari Anda sendiri, yaitu dibuat dari tekstil yang dipintal di Korea Selatan dengan bahan baku Catton yang diimpor dari Azerbaizan, dan *finishing* di Taiwan, lalu dipotong dan dijahit di Thailand, lalu dikirim ke Milano, Italia, untuk diberikan label dan kemudian dikirim ke New York”.

Ilustrasi di atas merupakan karakteristik globalisasi. Dari cerita ini, seperti kita sadari pengusaha Taiwan yang dalam perjalanannya dari satu negara di Eropa ke Asia, ternyata mendapatkan dirinya berada di dalam suatu pasar global yang menjejakkan beraneka ragam barang dan jasa dari segala penjuru dunia. Lebih jauh lagi, produksi suatu barang, seperti contoh pakaian yang dijual di New York, ternyata juga melalui tahapan produksi yang dikerjakan secara berantai di beberapa negara.

Dalam hal ini, dapatkah kita mengatakan bahwa pakaian tersebut adalah buatan Italia, padahal hanya proses pemberian label yang dilaksanakan di Italia.

Di samping itu, cerita globalisasi di atas juga menunjukkan bahwa batas-batas negara-bangsa bukan menjadi penghalang bagi suatu produk dan jasa serta manusia untuk melintas batas negara secara bebas. Dunia yang sangat luas menjadi sebuah kampung yang sangat kecil sehingga setiap manusia dapat keliling dunia dalam waktu yang relatif singkat. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah “kampung global” / “*global village*”.

### **A. Model Interaksi “*State Centrist*”**

Dalam perspektif Hubungan Internasional, yang dimaksud model hubungan state centris adalah merujuk pada aktor negara (*nation state*) sebagai unit/pemain politik pertama dan utama dalam percaturan politik internasional.<sup>2</sup> Dengan perangkat yang dimilikinya, negara adalah penentu hitam putihnya gejala dan peristiwa yang terjadi dalam hubungan internasional.

Model interaksi State Centris ini muncul dan menguat semenjak abad ke-17 atau tepatnya ketika lahir Perjanjian Westphalia (1648) sehingga memunculkan konsepsi “*nation state*”. Perjanjian Westphalia adalah sebuah perjanjian antara negara-negara Eropa yang terjadi di Eropa yang pada awalnya dirancang untuk menciptakan perdamaian dan mencegah perang, khususnya perang agama (ada yang mengatakan perang saudara) selama 30 tahun (1618–1648), antara bangsa-bangsa di Eropa. Selain menghasilkan sebuah kesepakatan tentang konsepsi “*nation state*”, Perjanjian Westphalia sekaligus sebagai alat untuk mengakhiri

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 227.

perang yang memakan ribuan orang tewas dan menjadi tragedi bersejarah bagi masyarakat di kawasan benua Eropa.

Isu-isu yang berkembang dan menjadi kajian dalam model hubungan ini adalah isu-isu keamanan militer (*military security*). Artinya, para penganut model interaksi *state centrist* ini mempercayai bahwa sebenarnya hubungan internasional itu diwarnai oleh isu-isu atau wacana-wacana yang bersifat high politics (*politico military security*).

Isu-isu perlombaan senjata (baik senjata nuklir, kimia maupun biologi), perang konvensional, terorisme, dan konflik-konflik transnasional dianggap merupakan berbagai isu yang paling utama dan mendesak untuk diperhatikan oleh para penstudi hubungan internasional. Kaum *state centrist* meyakini bahwa isu-isu *high politics* akan sangat mendominasi hubungan internasional sampai kapanpun, karena masing-masing negara dalam interaksi globalnya selalu mengedepankan "*struggle for power*" dan "*the pursuits of national interest*". "*Conflict of Interest*" antar negara adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam dinamika hubungan internasional.

Para penganut dan pendukung model interaksi *state centrist* ini dikenal sebagai penganut pendekatan realis dengan tokohnya yang utama adalah Edward H. Carr, Hans J. Morgenthau, dan Kenneth Waltz. Pendekatan realis, dalam artian realis modern, muncul pada masa pasca Perang Dunia II sebagai reaksi terhadap pendekatan idealis yang dianggap gagal dalam memelihara perdamaian dan mencegah perdamaian dengan bukti pecahnya Perang Dunia II yang dipicu oleh munculnya negara-negara agresor, seperti Jerman, Jepang dan Italia, dengan ideologi fasismenya.

Dalam konteks globalisasi, pendekatan realis, yang di dalamnya terdapat model *state centrist*, menolak argumentasi

globalisasi. Bagi kaum realis, globalisasi dianggap sebagai hal yang tidak melahirkan sesuatu yang penting dalam politik dunia. Dalam hal ini, negara adalah sesuatu yang memiliki dan selalu mengagung-agungkan kedaulatan, dan globalisasi bukanlah sesuatu yang bisa menghentikan *struggle for power* dari negara bangsa. Intinya, globalisasi mungkin hanya akan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi dari umat manusia, akan tetapi tidak berarti akan mentransmisi sistem politik internasional dari negara bangsa.<sup>3</sup>

## **B. Model Interaksi “Transnasional”**

Dalam perspektif HI, yang dimaksud model hubungan transnasional adalah merujuk pada aktor-aktor non negara sebagai unit/pemain politik penting dalam politik global. Aktor Negara dianggap telah tergeser oleh aktor non negara dalam dinamika hubungan internasional.<sup>4</sup>

Aktor-aktor non negara yang dimaksud adalah Perusahaan Multinasional, LSM, Organisasi terorisme, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perjuangan Kemerdekaan, Individu dan lain-lain.

Latar belakang munculnya model hubungan transnasional ini sebenarnya adalah kritik terhadap model hubungan *state centrist*. Fenomena interdependensi ekonomi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan maraknya blok-blok ekonomi regional dimana perpindahan atau mobilitas barang, jasa, modal, informasi, dan nilai-nilai budaya melintas batas wilayah nasional tanpa bisa dikendalikan secara langsung oleh aktor negara, merupakan faktor pendorong munculnya transnasional.

---

<sup>3</sup> I Nyoman Sudira, “Globalisasi dan Studi Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar Pemahaman Politik Dunia Kontemporer”, *Jurnal Pacis*, Tahun 1 / Juni 2003, hlm. 6.

<sup>4</sup> *Op. Cit.* hlm. 230

Isu-isu yang berkembang dan melingkupi dinamika hubungan transnasional ini adalah isu-isu ekonomi (*low politics*). Wacana yang berkembang dan dominan dalam hubungan internasional menurut kaum transnasionalis adalah wacana tentang integrasi ekonomi melalui media pasar bebas dan perdagangan bebas di bawah payung globalisasi ekonomi.

Para penganut model transnasional sering disebut dengan penganut pendekatan pluralis, seperti Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, dan Richard Mansbach.<sup>5</sup> Pendekatan Pluralis muncul dan berkembang dalam studi hubungan internasional sebagai reaksi terhadap pendekatan realis yang dianggap telah gagal dalam memahami dan menjelaskan dinamika hubungan internasional pasca Perang Dunia dan Perang Dingin.

Menurut pendekatan pluralis, pendekatan realis telah gagal dalam menjelaskan fenomena modernisasi ekonomi, integrasi ekonomi, interdependensi ekonomi, dan terbentuknya regim internasional dalam perkembangan hubungan internasional pada dasawarsa 1990-an.

Dalam konteks globalisasi, para penganut pendekatan pluralis merupakan penganjur utama diberlakukannya globalisasi. Globalisasi yang memunculkan aktor-aktor non negara dan isu-isu yang bersifat ekonomi akan menjadi bukti ketidakmampuan pendekatan realis untuk berkolaborasi dengan konstelasi politik dunia yang sangat menunjukkan bahwa *nation state* tidak lagi menjadi aktor utama dalam kancah politik dunia.

Globalisasi, menurut kaum pluralis, lambat laun akan mengikis dan menggerogoti sendi-sendi kedaulatan negara bangsa hingga negara bangsa tidak mampu lagi menahan dan membatasi

---

<sup>5</sup> Untuk mengetahui lebih jauh tentang Pendekatan Pluralis, lihat dalam Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, and Globalism*, (London: Maxwell Macmillan, 1987), hlm. 192 – 220.

aktor-aktor negara, seperti Perusahaan Multinasional misalnya, dalam melakukan ekspansi usaha yang melintas batas wilayah negara bangsa. Bahkan, banyak kasus membuktikan bahwa aktor-aktor non negara seringkali berhasil mempengaruhi perilaku negara melalui penetrasinya dalam mekanisme pengambilan keputusan sebuah negara.

Akhirnya, pendekatan pluralis percaya bahwa, dalam jangka panjang, globalisasi akan menciptakan sebuah tatanan tertib dunia yang universal, yang mungkin berwujud sebuah "pemerintahan dunia" (*world government*). Dengan terciptanya sebuah pemerintahan dunia tersebut, perdamaian dunia akan tercapai dan perang dapat dicegah. Setelah itu, dunia akan mengalami kemakmuran ekonomi dan keadilan politik di bawah norma-norma demokrasi dan HAM versi liberalisme-kapitalisme.

### **C. Globalisasi**

Kata "globalisasi" menjadi sangat populer dan mengemuka di mata masyarakat internasional terutama sejak awal tahun 1980-an. Globalisasi telah menjadi perbendaharaan kata yang tidak hanya dipakai oleh para penstudi hubungan internasional semata, melainkan telah menjadi konsepsi umum yang dipakai oleh para akademisi, politisi, negarawan, jurnalis, pengusaha, manajer, aktivis LSM dan kaum agamawan.

Globalisasi adalah sebuah kata yang selalu keluar masuk ruangan baik ruangan hotel atau ruangan kuliah untuk didiskusikan dan diseminarkan. Tidak bosan-bosan para peneliti dan penulis mengutip kata globalisasi sebagai referensi. Sampai-sampai ada perasaan kurang absah kalau dalam setiap penelitian dan penulisan ilmiah lainnya tidak menyebut kata globalisasi.

Sampai di sini, kita pantas bertanya, makhluk apakah yang bernama globalisasi itu? Globalisasi bukanlah sebuah makhluk manusia atau hewan. Globalisasi adalah sebuah konsepsi yang menggambarkan sebuah dunia yang terintegrasi baik secara politik maupun ekonomi. Globalisasi lahir bukan melalui proses alamiah (*natural process*), melainkan melalui proses yang dirancang secara terencana (*design process*) oleh manusia.

Dalam istilah bahasa, globalisasi disebut dalam istilah yang bervariasi dalam berbagai bahasa, seperti “*Globalization*” dalam bahasa Inggris, “*Quan Qui Hua*” dalam bahasa Cina, “*Globalizzazione*” dalam bahasa Italia, “*Jatyanthareekaranaya*” dalam bahasa Sinhalese dan “globalisasi” dalam bahasa Indonesia.<sup>6</sup>

Globalisasi adalah proses mengglobalnya atau mendunia-nya “sesuatu” yang melintasi batas wilayah negara bangsa. Sesuatu yang dimaksud adalah bisa berupa aktor non negara (seperti PMN, LSM, Terorisme dan Individu) maupun berupa barang, jasa, modal, informasi, nilai budaya, gaya hidup, dan hak milik intelektual.

Ciri utama dari globalisasi adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan global. Proses ini sering diistilahkan sebagai transnasionalisasi dimana semakin sedikit perusahaan transnasional yang mampu meraih pangsa pasar besar atau peningkatan proporsi secara cepat dari pembagian sumber daya ekonomi, produksi dan pangsa pasar. Jika dulu perusahaan multinasional mendominasi pasar dari sebuah produk tunggal, saat ini perusahaan transnasional yang besar secara khusus memproduksi dan menjual berbagai produk, pelayanan dan bidang-bidang lain yang kian beragam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> I Nyoman Sudira, *Op Cit.*, hlm. 1.

<sup>7</sup> Dikutip dari Martin Khor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan* (terjemahan), Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2002), hlm. 12.

Munculnya globalisasi bukannya lahir begitu saja (proses alamiah) melainkan merupakan sebuah rancangan atau di desain secara sistematis oleh negara-negara maju. Dimulai dari Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 yang berlangsung di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, yang menghasilkan dua lembaga Bretton Woods dan satu lembaga yang masih dalam proses negosiasi, yakni: (1) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), yang kemudian dikenal dengan nama World Bank (Bank Dunia); (2) International Monetary Fund (IMF); (3) General Agreement on Trade and Tariff (GAAT).

James Petras & Henry Veltmeyer (2001)<sup>8</sup> menyebut bahwa globalisasi adalah sebuah wacana yang dijadikan oleh aktor-aktor kapital global sebagai alat untuk memberikan payung bagi pergerakan dan penyebaran ideologi kapitalisme ke seluruh penjuru dunia. Melalui wacana globalisasi, ditumbuhkan mitos-mitos pembangunan, modernisasi, dan industrialisasi. Disebarkan keyakinan bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari karena timbul dari proses-proses alamiah.

Namun demikian, jika dilihat secara detail, wacana globalisasi merupakan sebuah rancangan global yang dibuat untuk menyatukan bangsa-bangsa di dunia di bawah panji-panji kapitalisme global. Menurut Petras & Veltmeyer, cikal bakal rancangan global ini berpangkal pada sistem Bretton Woods (diberlakukan mulai tahun 1944) yang ingin menciptakan tatanan dunia baru. Bank Dunia, IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI) serta perusahaan-perusahaan transnasional tidak hanya menjadi penyangga tatanan imperial global, melainkan sebagai “jaringan keuangan global”.

---

<sup>8</sup> Banyak dikutip dari Jame Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21 (terjemahan)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003).

Tatanan dunia baru ini juga disangga oleh Forum Perencanaan dan Kebijakan Strategis Global seperti Kelompok Tujuh (G-7), Komisi Trilateral (TC), Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-negara Maju (OECD). Agen-agen lokal kapitalisme global (*comprador class*) yang terdapat di Negara-negara Dunia Ketiga juga dirancang untuk melayani dan berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan modal global. Kesatuan lembaga-lembaga yang dirancang hingga menjadi suatu sistem ini menjadi bagian integral dari imperialisme baru, yakni "sistem pemerintahan global" baru dalam sebuah bingkai globalisasi. Wacana globalisasi juga membangun mitos bahwa kapitalisme global akan mendorong tumbuhnya sistem politik yang demokratis sebagaimana yang dinubuatkan oleh Seymour Martin Lipset. Asumsinya, sebuah negara yang menerapkan kapitalisme global akan melahirkan kelompok atau kelas menengah yang mampu secara ekonomi-politik menjembatani korespondensi antara penguasa dan rakyatnya. Kelas menengah di desain untuk menjadi katalisator, dinamisator dan stabilisator mekanisme relasi ekonomi-politik dari pemerintah dan rakyatnya. Mitos-mitos yang lahir dari wacana globalisasi telah membuai negara-negara di dunia sehingga mereka tidak menyadari konsekuensi negatif atas realitas empirik yang terjadi.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah sebuah produk dari ideologi liberalisme-kapitalisme. Karena merupakan produk dari sebuah ideologi, maka globalisasi tentunya sarat akan nilai (*value loaded*). Banyak kalangan berpendapat bahwa globalisasi berwajah ganda. Di satu sisi, menampilkan wajah positif, dengan menjanjikan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keadilan politik. Namun di sisi lain, globalisasi menunjukkan wajah yang menyeramkan karena implikasi negatif yang

---

<sup>9</sup> Agus Subagyo, "Menelanjangi Kapitalisme Global", *Pikiran Rakyat*, 21 November 2003.

menyertainya, seperti kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan sosial.<sup>10</sup>

#### D. Beberapa Konseptualisasi Tentang Globalisasi

NO	Kategori	Unsur/Proses Utama
1	Globalisasi keuangan dan pemilikan kapital	Deregulasi pasar finansial, mobilitas kapital, melintas batas nasional, munculnya “merger” dan akuisisi. Tahapan awalnya ditandai dengan globalisasi pemilikan saham.
2	Globalisasi pasar dan strategi perusahaan, terutama penekanan pada kemampuan bersaing.	Pengintegrasian kegiatan bisnis dalam skala dunia, penciptaan operasi terintegrasi di luar negeri (termasuk Litbang dan pendanaan), pencarian komponen ke seluruh dunia pembentukan aliansi strategis.
3	Globalisasi difusi teknologi berikut LitBang dan ilmu pengetahuan yang terkait.	Difusi teknologi, sebagai katalisator primer: Munculnya teknologi informasi dan telekomunikasi memungkinkan terbentuknya jaringan global di dalam perusahaan yang sama, dan

<sup>10</sup> Bukti dari adanya kesenjangan ekonomi dunia ini dapat dilihat dalam Laporan The United Nations Human Development Report, tahun 1999, yang menyatakan bahwa seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa pelayanan, sedangkan seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1% lebih sedikit. Seperlima yang terkaya itu juga menikmati 82% perdagangan ekspor dan 68% investasi asing langsung (FDI). Sedangkan seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1% lebih sedikit. Dikutip dari International Forum On Globalization, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, (terjemahan)*, (Yogyakarta: Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. 31.

		di antara perusahaan-perusahaan yang berbeda. Misalnya, globalisasi "Toyotism", yaitu proses universalisasi cara kerja yang semula dikembangkan dan hanya diterapkan di Toyota
4	Globalisasi gaya hidup dan pola konsumsi; globalisasi budaya.	Pengalihan dan transplantasi gaya hidup dominan. Penyamaan pola konsumsi. Peran media massa. Transformasi budaya ke arah "cultural product" yang dipasarkan ke seluruh dunia. Aturan main GATT yang baru juga dikenakan pada arus pertukaran produk budaya.
5	Globalisasi kemampuan regulatori dan "governance"	Pengurangan peran pemerintah dan parlemen nasional dalam merancang aturan main "global governance". Peran itu diambil alih oleh lembaga global, seperti Round Uruguay GATT dan berbagai konferensi yang berpuncak pada "social summit" di Kopenhagen.
6	Globalisasi sebagai unifikasi politik dunia	Pengintegrasian masyarakat-masyarakat seluruh dunia ke dalam suatu sistem politik dan ekonomi global di bawah pimpinan satu negara inti.
7	Globalisasi persepsi dan kesadaran	Proses sosio-kultural yang memusat pada "satu bumi".

		Gerakan sosial “globalis”. Manusia dipandang sebagai warga planet bumi.
--	--	---

Sumber: Dikutip dari Mohtar Masoed, *Ekonomi Politik Pembangunan, Diktat Kuliah*, (Yogyakarta: Pascasarjana FISIPOL UGM, 2002), hlm. 171.

## E. Faktor-faktor Pendorong Munculnya Globalisasi

### 1. Faktor Ekonomi

- a. *Over Productions*/Produksi yang berlebihan. NIM yang melakukan industrialisasi dengan kemampuan produksi besar-besaran ingin menjual hasil produksinya ke luar negeri karena pasar dalam negeri tidak mampu menyerap lagi. Kemampuan produksi secara massal ini telah dimulai sejak revolusi industri di Inggris dimana pekerjaan pembuatan barang yang pada awalnya hanya bisa dilakukan dengan tangan manusia (secara manual), mulai digantikan dengan mesin-mesin berteknologi tinggi (secara digital). Efek dari produksi massal ini adalah produk-produk yang banyak sehingga tidak mampu dikonsumsi oleh konsumen domestik. Karena itu, menjual produk keluar negeri (mengglobalkan produk) adalah alternatif yang dianggap bisa menyelesaikan masalah produksi massal ini.
- b. Perluasan Pasar. NIM ingin memperluas *range* atau jangkauan pasar mereka tidak hanya di dalam negeri, melainkan ingin menguasai pasar luar negeri sehingga produk-produk mereka dikenal di pasaran negara lain. Ekspansi pasar dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk memperluas usaha dan meningkatkan penjualan produk-produk manufaktur. Pasar domestik dianggap terlalu sempit dan terbatas bagi produk-produknya. Karena itu, perluasan pasar ke luar negeri layak dipikirkan agar

supaya produk-produk manufaktur mereka dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat seluruh dunia, tidak hanya konsumen negeri mereka saja.

- c. Pembagian Kerja Secara Internasional atau *comparative advantage* atau spesialisasi produksi.<sup>11</sup> Globalisasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas ekonomi dunia melalui spesialisasi produksi dimana Negara Dunia ketiga (NDK) dirancang memproduksi hasil pertanian dan bahan mentah lainnya, sedangkan Negara Industri Maju (NIM) dirancang untuk memproduksi industri berat dan elektronik canggih.

## 2. Faktor Politik

- a. Pencegahan Perang. Dengan peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan, diharapkan peperangan tidak akan terjadi lagi di dunia. Sebagian besar negara-negara Barat trauma dengan Perang Dunia I & II yang menelan jutaan jiwa manusia. Asumsinya, masing-masing negara akan berfikir seratus kali untuk menyatakan perang dengan pihak lain karena taruhan resiko ekonomi yang sangat besar sebagai akibat dari peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dengan globalisasi, perdamaian bisa diciptakan dan perang bisa dicegah karena yang menjadi fokus utama dalam globalisasi adalah kerjasama (*cooperation*), bukan konflik (*conflict*).
- b. Hal ini sejalan dengan proposisi kaum pluralis yang mengatakan bahwa “semakin besarnya tingkat integrasi dan interdependensi

---

<sup>11</sup> Teori keunggulan Komparatif ini diperkenalkan pertama kali oleh David Ricardo, seorang ilmuwan ekonomi pelopor liberalisme-kapitalisme. Berkaitan dengan teorinya, David Ricardo memberikan contoh tentang Portugal yang mengkhususkan diri pada produksi Anggur dan Inggris yang memfokuskan diri pada produksi bahan pakaian Wol. Kedua negara ini (Portugal dan Inggris) saling mempertukarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional. Dengan pembagian kerja semacam ini, kedua negara akan diuntungkan, karena harga Anggur dan Pakaian Wol menjadi murah bagi kedua negara itu.

Dikutip Dari Paul-Heinz Koesters, *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 38 – 39.

ekonomi dunia, semakin kecil peluang suatu negara melakukan perang karena resiko ekonomi yang ditanggungnya". Kerjasama di bidang perdagangan akan menciptakan saling kepercayaan dan menumbuhkan pemahaman bersama antar negara. Suatu tertib dunia yang berupa pemerintahan dunia yang dapat terbentuk karena didorong oleh globalisasi akan melahirkan sebuah perdamaian abadi di dunia ini.

## **F. Dua Pandangan tentang Globalisasi**

### **1. Pandangan Positif**

- a. Globalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan (*unavoidable*) dan akan membawa negara-negara di dunia pada kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial, khususnya di Negara Dunia Ketiga (NDK). Globalisasi adalah jawaban bagi negara-negara di dunia yang mendambakan kemajuan pembangunan dan peningkatan perdamaian. Globalisasi adalah resep bagi setiap negara, khususnya negara-negara yang mengalami kemiskinan dan pengangguran, untuk membuka diri pada dunia luar dan menghapuskan sifat proteksionismenya pada dunia luar. Politik isolasionisme dan kebijakan proteksionisme harus dihapuskan dan diganti dengan politik pintu terbuka. Dengan begitu, negara-negara di dunia akan dapat berjalan bersama-sama menuju kemakmuran dan perdamaian.
- b. Globalisasi yang mensyaratkan pembagian kerja internasional akan menciptakan efisiensi ekonomi karena adanya spesialisasi produksi demi lancarnya perdagangan global. Globalisasi telah mampu memberikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan perdagangan antar negara dengan resep keunggulan

komparatifnya. Spesialisasi produksi masing-masing negara dapat menghindarkan kedua negara atau lebih bertabrakan dan bahkan bisa berkonflik, karena produk jualan mereka yang sama sehingga bisa merugikan kedua belah pihak. Globalisasi berhasil memetakan dan membagi setiap negara untuk memfokuskan diri pada keunggulannya masing-masing sehingga produk unggulannya tidak sama dengan negara lainnya.

- c. Globalisasi akan mengarah pada terciptanya blok-blok ekonomi regional sebagai persiapan awal berlakunya pasar bebas dan perdagangan bebas ditingkat global. Dimulai dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang berubah menjadi Uni Eropa, Asia Pacific Economic Cooperations (APEC), Asean Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA), sampai dengan Latin America Free Trade Area (LAFTA). Dalam jangka panjang, blok-blok perdagangan ini dirancang akan menyatu dan terintegrasi dalam sebuah blok ekonomi raksasa dunia.
- d. Bank Dunia, IMF, dan WTO merupakan lembaga yang akan berfungsi positif dan penting di dalam membantu pembangunan ekonomi NDK. Selain itu, motor penggerak utama bagi pencaanangan proyek globalisasi dunia ini adalah sebuah forum yang dinamakan dengan World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia (FED). WEF adalah perkumpulan negara-negara pendukung globalisasi yang berdiri sejak tahun 1971 yang berpusat di Davos, Swiss.

## **2. Pandangan Kritis**

- a. Globalisasi telah menciptakan keretakan dunia menjadi dua bagian yang berbeda, yakni Utara dan Selatan, Centre dan Periphery, Negara Industri Maju (NIM) dan Negara Sedang Berkembang.

- b. Globalisasi dijadikan alat oleh negara-negara Barat untuk menyebarkan ideologi kapitalisme-liberalisme ke seluruh dunia dengan tujuan menciptakan imperialisme baru (neo imperialisme).
- c. Globalisasi akan menciptakan ketergantungan NDK terhadap NIM dan eksploitasi sumber daya alam yang berakibat pada kemiskinan, ketergantungan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan lingkungan hidup.
- d. Bank Dunia, IMF, WTO merupakan agen-agen kapitalisme global yang senantiasa menghisap dan memperdayai NDK dengan aturan-aturan imperialnya, di bawah bendera globalisasi.
- e. Lenin (1963), seorang pelopor utama sosialisme, pernah berkata bahwa imperialisme adalah tahap tertinggi dari kapitalisme (*Imperialism is The Stages of Capitalism*). Ujung-ujung dari menyebarnya kapitalisme adalah imperialisme. Imperialisme merupakan tujuan dari negara-negara kapitalis untuk menguasai negara-negara lain melalui cara-cara yang tidak langsung alias non fisik. Hal ini dilakukan mengingat praktik-praktik kolonialisme sudah ditasbihkan oleh masyarakat dunia untuk dihapuskan. Kapitalisme global merupakan alat baru untuk menguasai negara-negara lain di dunia. Pernyataan Lenin ini didukung oleh Bill Warren (1980) yang mengatakan bahwa imperialisme adalah pelopor kapitalisme.
- f. Karena sifatnya yang imperialistis, kapitalisme global secara empirik membawa implikasi negatif yang bertentangan dengan mitos-mitos yang digembar-gemborkannya. Ada kecenderungan di Negara-negara Dunia Ketiga yang memakai model kapitalisme sebagai pijakan sistem ekonomi-politik yang mengalami kondisi yang memprihatinkan, seperti

kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, ketimpangan, kerusakan lingkungan, pelecehan seksual, pelanggaran hak asasi manusia, dan akhir dasawarsa 1990-an muncul krisis ekonomi yang menimpa negara-negara Asia seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan.

- g. Semua kenyataan di atas disinyalir akibat proses pembangunan yang bersifat kapitalistis tanpa memprioritaskan kepada aspek-aspek kemanusiaan dan lingkungan. Pembangunan kapitalistis hanya memahami dimensi pembangunan secara materialistis tanpa mengindahkan konsepsi pembangunan yang membebaskan manusia. Dengan kata lain, pembangunan telah mengungkung kebebasan manusia dalam menjalankan hak-haknya. Contoh tepat dari hal ini adalah pembangunan *ala* rezim Orde Baru yang tidak memberikan manfaat bagi rakyatnya tapi malah merampas, mengungkung, dan merepresi hak-hak rakyatnya.
- h. Kapitalisme global juga membawa nilai-nilai liberal Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Tentang hal ini, Anthony Giddens<sup>12</sup> mensinyalir bahwa kapitalisme global telah merombak tatanan kehidupan masyarakat. Perombakan ini tidak hanya pada dataran relasi kelompok sosial, melainkan telah merasuk pada perombakan tradisi dan nilai-nilai keluarga, termasuk persoalan seksualitas dan perkawinan. Di level nasional, kapitalisme global telah melunturkan kedaulatan sebuah bangsa karena munculnya blok-blok ekonomi regional yang siap melaksanakan proyek pasar bebas sebagaimana disinyalir oleh Kenichi Ohmae (1996).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Anthony Giddens, *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, (terjemahan), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 33 - 49

<sup>13</sup> Kenichi Ohmae, *Borderless World*, (New York: 1995).

- i. Sebenarnya, jika dilihat jauh ke belakang, berbagai kelemahan dan kritikan terhadap meluasnya ideologi kapitalisme global yang dibungkus dalam sebuah wacana globalisasi telah mengemuka sejak pertengahan tahun 1970-an, dimana sekelompok pemikir ekonomi-politik dari Amerika Latin mendeklarasikan sebuah teori strukturalis (dependensi, ketergantungan) sebagai *counter* terhadap teori modernisasi.<sup>14</sup> Asumsi inti dari pemikiran strukturalis ini mengatakan bahwa keterbelakangan dan ketergantungan yang dialami oleh Negara Dunia Ketiga saat ini adalah adanya penetrasi asing yang mendistorsi sektor perdagangan-ekonomi internal dan distorsi yang mengarah pada konflik sosiopolitik. Inilah awal dari munculnya neo imperialisme di Negara Dunia Ketiga, di bawah slogan globalisasi.

## G. Implikasi Globalisasi

Penyesuaian yang diberlakukan oleh negara-negara di dunia. Di Indonesia, dibuat Undang-undang, peraturan-peraturan, dan paket kebijakan deregulasi, privatisasi, serta liberalisasi yang intinya senafas dengan perkembangan global sehingga investor asing mau dan mudah menanamkan investasinya di sektor ekonomi-industri. kebijakan-kebijakan negara di dunia ini dipandu oleh apa yang dinamakan dengan “Washington Consensus”. Resep ekonomi neo liberal yang diproduksi oleh Bank Dunia ini menganjurkan kepada setiap negara di dunia untuk masuk dalam lingkaran globalisasi dan memakai ideologi kapitalisme global sebagai dasar pengambilan kebijakan.

---

<sup>14</sup> Tentang perdebatan antara Teori Modernisasi dan Teori Dependensi ini dapat dipelajari secara mendalam pada Alvin Y. So dan Suwarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994); Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).

Pembentukan World Social Forum (WSF) sebagai tandingan dari World Economic Forum (WEF). WSF lahir tahun 2000 atas usulan yang datang dari komunitas warga Brazil di bawah Partai Buruh (LP) yang menguasai Porto Alegre dan Rio Raya bagian Selatan (Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva adalah pendiri LP). WSF merupakan forum untuk mendiskusikan pilihan-pilihan di luar sistem ekonomi neo liberal dan merancang strategi-strategi alternatif menghadapi globalisasi. Slogan yang diusungnya adalah "Another World is Possible". WSF dikenal luas sebagai forum gerakan radikal anti globalisasi dan gerakan militan anti kapitalis.

Pada tanggal 16-21 Januari 2004 lalu, diselenggarakan pertemuan keempat WSF di Mumbai, India, yang diikuti oleh kurang lebih 100 ribu orang aktivis dari seluruh dunia. Pertemuan yang pertama kali diselenggarakan di luar wilayah negara berdirinya WSF, yakni Porto Alegre, ini mendiskusikan tentang upaya-upaya untuk membendung gerakan-gerakan perluasan globalisasi yang dimotori oleh negara-negara Barat yang tergabung dalam WEF.

Munculnya Gerakan Anti globalisasi di berbagai negara, antara lain: (1) gerakan anti globalisasi menentang NAFTA (Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara, ditandatangani tahun 1992 antara Meksiko, AS, dan Kanada); (2) Gerakan Zapatista pada tahun 1997 menggerakkan ribuan aktivis serikat buruh, organisasi HAM, Lingkungan Hidup, dan Perempuan menentang WTO, yang dianggap menjadi alat atau simbol globalisasi kemiskinan. Dari sini terbentuk PGA (People's Global Action Against Free Trade and the WTO); (3) Pada tanggal 18 Juni 1998, PGA melancarkan aksi global menentang lembaga-lembaga keuangan dunia. Sekitar 100 kota di 40 negara dilanda aksi protes, mulai dari Australia sampai Zimbabwe, Swedia, sampai Korea Selatan, Chile, dan Republik Ceko; (4) Aksi protes yang

mengejutkan dilakukan sekitar 30.000 aktivis dalam pertemuan WTO di Seattle, AS, November 1999. mereka secara radikal menuntut agar WTO dibubarkan karena senantiasa membuat aturan perdagangan yang merugikan dan menyengsarakan negara berkembang. Aksi anti globalisasi yang dilakukan aktivis jaringan LSM dunia ini sampai saat ini masih berkobar menyertai berbagai pertemuan dan konferensi WTO, IMF, Bank Dunia, WEF, dan G-8.

## BAB VII

---

# GENDER DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, eksistensi kaum perempuan kurang mendapat perhatian dalam proses-proses politik maupun ekonomi. Hal ini bisa ditelusuri dari zaman Yunani Kuno, dimana kaum perempuan dan budak tidak memiliki hak pilih. Kenyataan ini berlangsung bahkan sampai akhir abad ke-19. Kaum perempuan dipandang sebagai warga kelas dua.

Dominasi laki-laki terhadap perempuan (budaya Patriarki) yang berupa *subordinasi, double burden, marginalisasi, stereotyping dan domestifikasi*. Bahkan, akhir-akhir ini marak tindakan kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan, seperti pemerkosaan

(termasuk pemerkosaan dalam perkawinan/*marital rape*)<sup>1</sup>, pemukulan, penyiksaan (khususnya terhadap alat kelamin perempuan, seperti penyunatan atau sirkumsisi bagi perempuan mulai dengan klitoridektomi sampai dengan penghilangan labia minora dan labia majora)<sup>2</sup>, pornografi, dan *sexual harassment*.

Kondisi yang demikian tentunya sangat bertentangan dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kesetaraan, keserasian, dan keseimbangan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, masalah eksistensi kaum perempuan ini banyak mendapat perhatian internasional.

Padahal, selama ini, arti penting perempuan dalam konteks hubungan internasional sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari studi yang dilakukan oleh dua orang ilmuwan wanita penggerak gerakan gender, yakni Amy Swerdlow dan Cynthia Enloe.

Amy Swerdlow dalam bukunya *Motherhood and The Subversion of The Military State: Women Strike for Peace Confronts The House Committee on Un-American Activities*, tahun 1990, menyatakan bahwa gerakan *Women Strike for Peace* (WSP) di AS awal 1960-an yang menyebut dirinya sebagai *istri-istri dan ibu-ibu yang tidak puas* berhasil membujuk Presiden Kennedy untuk membuat perjanjian pembatasan senjata nuklir dengan Uni Soviet.

Cynthia Enloe, dalam bukunya *The Morning After: Sexual Politics at The End of The Cold War*, tahun 1994, menyatakan bahwa penarikan dukungan ibu-ibu kepada prajurit Uni Soviet sebagai akibat perang di Afghanistan menyumbang pada delegitimasi pemerintah komunis dan membantu mengakhiri Perang Dingin.

---

<sup>1</sup> Valerie Bryson, *Feminist Debates Issues of Theory and Political Practice*, (London: Macmillan, 1999), hlm. 82

<sup>2</sup> Munawar Ahmad Annes, *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, (Bandung: Mizan, 1991), terutama bab 2.

Oleh karena itu, tulisan berikut ini akan memaparkan tentang definisi atau pengertian tentang Gender, perbedaan antara Gender dengan sex, akar kultural-historis dari keterbelakangan perempuan, perhatian internasional terhadap status, kedudukan, dan peranan kaum perempuan, sebab-sebab munculnya Gender dan berbagai kebijakan yang berwawasan Gender.

## A. Pengertian Gender

Dalam kamus “The Merriam Webster Dictionary”, yang dimaksud dengan Gender adalah sama dengan Sex.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Victoria Neufeldt, Gender adalah “*The apparent disparity between man and women in values and behavior*”.<sup>4</sup>

Gender sebenarnya merupakan sebuah konstruksi sosial (*social construct*) yang menentukan dan mengatur hubungan antara pria dan wanita. Melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai sosial, masyarakat menentukan apa yang patut dilakukan oleh pria maupun apa yang patut dilakukan oleh perempuan.<sup>5</sup>

Gender merupakan sifat yang “dilekatkan” kepada laki-laki atau perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sementara perempuan itu dikenal lemah, lembut, emosional, dan keibuan.<sup>6</sup> Padahal, atribut-atribut seperti itu bisa saling dipertukarkan, tergantung pada konstruksi sosial dan kulturalnya.

---

<sup>3</sup> *The Merriam Webster Dictionary*, (New York: Merriam Webster Inc., 1994), hlm. 314

<sup>4</sup> Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster New World Cleveland, 1984), hlm. 561.

<sup>5</sup> Dikutip dari Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59 – 75.

<sup>6</sup> Dalam konteks hubungan internasional, batas-batas Gender secara eksplisit dijelaskan oleh Jacqui True, Feminism, dalam Scoot Burchill dan Andrew Linklater (ed.), *Theories of International Relations*, (London: Macmillan Press Ltd, 1996), hlm. 213 – 216.

Dengan demikian, sifat gender adalah *culture specific* dan dinamis. Artinya, bervariasi dari satu lingkungan sosial-kultural ke lingkungan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain.

Tujuan gender adalah tuntutan persamaan hak ekonomi dan politik antara kaum laki-laki dan perempuan. Seringkali terjadi kerancuan pemahaman bahwa atribut gender disamakan dengan atribut biologis (sex). Para penganut dan pejuang gender tidak hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki.

## B. Perbedaan Sex dan Gender

Masyarakat internasional mulai menyadari bahwa apa yang harus dilakukan adalah peningkatan peranan perempuan dalam konteks “gender”. Hal ini mempunyai implikasi fundamental karena kita beralih dari upaya-upaya mengintervensi karakteristik manusia yang termasuk dalam domain “*biological sphere*” menuju karakteristik manusia dalam domain “*socio cultural sphere*”.

Fenomena seksual adalah fenomena biologis yang bersifat kodrati yang membedakan pria dan wanita yang sifatnya secara relatif tidak bisa diubah. Perbedaan seksual antara pria dan perempuan ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

NO	Determinan Sexual	Jenis Kelamin	
		Wanita	Pria
1	Fungsi reproduksi	Kelamin Wanita	Kelamin Pria
2	Hormone	Estrogen/proges terone	Endrogen/testos teron
3	Chromosome/Gen	XX	XY

Sumber: Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 69.

Yang dimaksud bahwa fenomena seksual fenomena biologis bahwa makhluk hidup ini telah “diprogramkan” atau “*preceded*” dalam masing-masing *chromosome* yang pada akhirnya mempengaruhi fungsi-fungsi kodratinya. Perempuan misalnya mempunyai fungsi kodrati reproduktif mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagainya.

Namun, dalam proses kehidupan masyarakat, konsep “gender” kemudian melestarikannya. Masyarakat menentukan apa yang patut dilakukan oleh pria maupun apa yang patut dilakukan oleh perempuan. Melalui proses sosialisasi dan internalisasi sosial nilai yang terbentuk mulai interaksi, masyarakat mengembangkan mitos-mitos tentang gender, apa yang wajib dilakukan oleh pria dan apa yang wajib dilakukan oleh perempuan.

Dengan demikian, Gender merupakan “*social construct*” yang menentukan dan mengatur hubungan antara pria dan perempuan. Oleh karena itu, kita dapat menarik perbedaan antara *sex* (yang bersifat kodrati) dan gender (yang bersifat sosial kultural) sebagai berikut:

NO	Sex/kodrati	Gender/kultural
1	Relatif konstan/tidak dapat berubah	Dapat dipertukarkan ( <i>interchangeable</i> )
2	Dikotominya: Pria dan wanita	Dikotominya: Feminin dan maskulin, yaitu “gender role standard” yang tidak ada kaitannya dengan sex

Sumber: Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 70.

### C. Akar Kultural-Historis dari Keterbelakangan Perempuan

Perkembangan sejarah manusia pada masa lampau telah menciptakan mitos-mitos hubungan antara pria dan wanita, yang pada akhirnya cenderung menempatkan wanita pada posisi terbelakang atau *underprivileged*. Keterbelakangan ini, secara kultural-historis, disebabkan oleh:<sup>7</sup>

1. Adanya dikotomi maskulin/feminin peran manusia sebagai akibat dari determinisme biologis, seringkali mengakibatkan proses marginalisasi wanita.
2. Adanya dikotomi peran publik/peran domestik yang berakar dari sindroma bahwa “peran wanita adalah rumah”, pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara pria dan wanita.
3. Adanya konsep “beban kerja ganda” (*double burden*) yang melestarikan wawasan bahwa tugas wanita terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung menghalangi proses aktualisasi potensi wanita secara utuh.
4. Adanya sindroma subordinasi dan peran marginal wanita telah melestarikan wawasan bahwa peran dan fungsi wanita dalam masyarakat adalah bersifat sekunder.

### D. Perhatian Internasional terhadap Kedudukan, Status, dan Peranan Perempuan<sup>8</sup>

1. Resolusi ECOSOC (*Economic-Social Commission*) No. 861 F (XXVI) tertanggal 12 Juli 1963. Isi dari resolusi badan internasional tersebut adalah merekomendasikan kepada negara-negara

---

<sup>7</sup> Moeljarto Tjokrowinoto, *Op Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

- anggotanya untuk membentuk komisi nasional yang bertugas memonitor status dan kedudukan wanita.
2. *Declaration of Mexico on the Equality of Women and their Contribution to Development and Peace* (Mexico, 1975). Deklarasi ini lahir dari sebuah *World Conference on International Year of Women* yang diselenggarakan di Mexico City pada tahun 1975. Deklarasi ini menggarisbawahi pula Resolusi Majelis Umum PBB (3010/XXVII) yang menggariskan bahwa tahun wanita internasional 1975 diperuntukkan bagi peningkatan kegiatan yang mendorong persamaan antara pria dan wanita, pengintegrasian wanita dalam keseluruhan kegiatan pembangunan, dan peningkatan sumbangan wanita bagi perdamaian. Konferensi menyetujui rencana kegiatan dunia untuk mencapai tujuan tahun wanita internasional (*World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of International Women's Year*).
  3. *United Nation Decade for Women (1975-1985)* yang dicanangkan secara global dengan tema "*equality, development, and Peace*" yang pada hakikatnya merupakan realisasi dari *World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of International Women's Year*.
  4. *World Conference on the United Nations Mid Decade of Women* yang diselenggarakan di Copenhagen pada tanggal 14-30 Juli 1980, yang dihadiri oleh 145 negara termasuk Indonesia. Agenda utama dari konferensi ini adalah *me-review* pelaksanaan *United Nations Decade for Women*.
  5. *World Conference to Review and Appraise the Achievement of the United Nations Decade for Women*, yang diselenggarakan di Nairobi pada tanggal 15-26 Juli 1985. konferensi yang agendanya adalah untuk menilai hasil-hasil dasawarsa wanita PBB ini dihadiri oleh 157 negara dimana Indonesia terpilih sebagai salah

satu Wakil Presiden konferensi diantara 29 Wakil Presiden yang lain. Konferensi menghasilkan dokumen yang amat penting, yaitu “strategi Jangka Panjang Peningkatan Peranan Wanita Menjelang Tahun 2000” atau lebih dikenal dengan *Nairobi Forward Looking Strategic for the Advancement of Women (FLS)*.

6. Sidang ke-34, “Commission on the Status of Women” yang diselenggarakan di Vienna tanggal 26 Februari -9 Maret 1990. Sidang ini membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang tema-tema berikut ini:
  - a. *Equality*: Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang persamaan dalam partisipasi politik dan proses pengambilan keputusan.
  - b. *Development*: Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang Efek negatif kondisi ekonomi internasional dalam proses peningkatan status wanita.
  - c. *Peace*: Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang kondisi perempuan yang terkena dampak dari konflik bersenjata, intervensi asing, dominasi kolonial asing, dan pendudukan asing.

## **E. Sebab-sebab Munculnya Gender**

### **1. Faktor Ekonomi**

- a. Sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi cukup besar. Secara Rasio; satu di antara empat karyawan industri, dan empat di antara sepuluh pekerja di bidang pertanian dan jasa adalah wanita.
- b. Wanita memberikan 66 persen dari jam kerjanya, akan tetapi hanya mendapatkan 10 persen dari upahnya. Wanita bertanggung jawab terhadap 50 persen produksi pangan

dunia, akan tetapi hanya menguasai 1 persen dari *material goods* yang ada.

- c. Wanita menikmati lebih sedikit dari pria sebagai hasil kontribusinya pada produksi nasional: rata-rata upah per-jam nya lebih rendah dari pria, perlindungan hukum bagi mereka sangat kurang dari pria, wanita terbatas pada buruh kasar dengan bayaran rendah, akses kepada sumber-sumber produksi lebih kecil dari pria.
- d. Peterson dan Runyan memberikan contoh misalnya:<sup>9</sup>
  - Wanita memiliki 1% kekayaan dunia dan kurang dari 5% yang menjabat sebagai kepala negara dan menteri;
  - Wanita menangani 60% jam kerja, mendapat hasil hanya 10% dari seluruh pendapatan yang ada;
  - Terdapat sekitar 60% wanita yang belum melek huruf dan sekitar 80% dari seluruh pengungsi adalah wanita beserta anak-anak.

## 2. Faktor Politik

- a. Relatif sedikit kaum perempuan yang terlibat dalam proses-proses politik dan pemerintahan, khususnya dalam menempati jabatan-jabatan tertinggi, seperti Presiden, Perdana Menteri, Ketua Partai, dan lain-lain.
- b. Adanya negara-negara tertentu yang membatasi hak-hak politik kaum perempuan, khususnya di negara-negara Arab (*Iran?*).

---

<sup>9</sup> Georg Sorensen dan Robert Jackson, *Introductions of International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 1999). hlm. 257 – 262.

### 3. Faktor Budaya

- a. Struktur sosial budaya masyarakat yang memang mengkondisikan kaum perempuan dicitrakan sebagai warga lapisan kedua. *Ex: Di Jawa, "Konco Wingking": Mitra di belakang/dapur.*
- b. Struktur sosial budaya masyarakat yang mengharuskan kaum perempuan bekerja ekstra keras menghidupi keluarga. *Ex: Di Bali, Kaum Perempuan bekerja mencari nafkah, sedangkan kaum laki-laki bermain sabung ayam.*

### 4. Faktor Bahasa

Banyak sekali penggunaan bahasa Inggris yang merujuk pada artian: "Orang" atau "manusia" ditulis dengan kata "Man". Padahal, "Man" mempunyai arti "laki-laki" atau "pria". Penggunaan kata "Man" ini dapat dilihat dalam buku-buku politik berikut ini:

- a. Seymour M. Lipset, *Political Man: Social Bases of Politics*, (New York: Anchor, 1963).
- b. Kenneth N. Waltz, *Man, The State, and War: A Theoretical Analysis*, (New York: Columbia University Press, 1959).
- c. Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (Penguin Book: 1992).

Di samping itu, dalam penyebutan terhadap Tuhan pun mengalami kecenderungan maskulinitas. Meskipun ajaran agama tidak sedikitpun memberikan atribut yang jelas tentang "jenis kelamin" Tuhan, namun diakui atau tidak, terdapat tafsiran bahwa Tuhan itu "laki-laki". Kata Alaihim (artinya: Kepada-Nya), misalnya, akhiran "him" menunjukkan maskulinitas Tuhan. Demikian pula dalam bahasa Inggris yang menyebut God dan Goddess (artinya: Dewa dan Dewi), sehingga ketika God disebut

sendirian, mengesankan berjenis laki-laki. Kata tunjuknya juga “to Him” yang sama dengan penunjuk bagi manusia berjenis kelamin laki-laki.

## F. Aliran-aliran Pemikiran dalam Gender

Dalam studi hubungan internasional, ada minimal tiga perspektif atau aliran pemikiran dominan tentang Gender, yakni:<sup>10</sup>

### 1. Aliran Liberal

Berasumsi bahwa keterbelakangan dan ketidakmampuan perempuan bersaing dengan kaum laki-laki disebabkan oleh kelemahan mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas dan bahwa perempuan sebenarnya adalah makhluk rasional juga. Sikap emosional hanyalah milik peradaban tradisional. Maka mereka mengagungkan modernitas, dan mempercayai modernitas dan industrialisasi sebagai peluang bagi perempuan untuk meningkatkan statusnya.

Hak wanita dan laki-laki sederajat, kebebasan dan kebahagiaan sebagai individu ditekankan, hak hidup, kemerdekaan dan hak kekayaan belum disetarakan antara laki-laki dan wanita; Mary Wallstonecraft dalam buku *A Vindication of The Rights of Women*, tahun 1792, menyatakan bahwa wanita dan pria harus punya akses yang sama di bidang ekonomi dan pendidikan;

---

<sup>10</sup> Mengenai aliran pemikiran tentang Gender ini dirangkum dari Buku D. Bouchier, *The Feminist Challenge: The Movement for Women's Liberations in Britain and The United States*, (London: Macmillan, 1983), hlm. 63 – 92; Georg Sorensen dan Robert Jackson, *Introductions of International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 1999). Bandingkan pula dengan pendapat Valerie Bryson yang membagi aliran-aliran Gender menjadi empat, yakni: Liberal, Radikal, Marxism, dan Sosialis, dalam bukunya yang berjudul *Feminist Political Theory: An Introductions*, (London: Macmillan, 1992), hlm. 159 – 260.

Gerakan ini menuntut wanita lebih prominent (menonjol) dalam politik internasional, menghilangkan ketidaksetaraan menuju kekuasaan dan pengaruh pria dan wanita, dan untuk mendapatkan kesetaraan hak pria dan wanita;

Menurut Keohane, teori-teori semacam ini dapat digunakan untuk menelusuri HI dari bawah yaitu, dari standpoint dimana hal-hal gender sering dikesampingkan dari kekuasaan. Teori Feminist ini membantu dalam mengubah visi dalam HI dan menekankan bagaimana institusi-institusi dapat mempromosikan kerjasama antar organisasi, negara-negara atau sejenisnya agar masalah gender ini tidak disubordinasikan.

## **2. Aliran Radikal**

Berasumsi bahwa penindasan terhadap kaum perempuan semula berasal dari dominasi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan radikal, revolusi terjadi pada setiap individu perempuan dan dapat terjadi hanya pada perempuan yang mengambil sikap aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri. Urusan penindasan perempuan adalah masalah subyektif mereka sendiri.

*Radical Feminism*, menolak segala bentuk kerjasama. Paham ini ingin untuk mengembangkan analisis yang lebih murni dan bebas sehingga dapat menghindarkan subordinasi gender pada agenda-agenda tradisional dalam HI. Dengan cara ini dapat melaksanakan tahap-tahap teoritis dan praktis untuk mengembangkan analisis gender dalam HI.

Konsep inti dalam HI seperti kekerasan, keamanan, power, kedaulatan harus didefinisikan kembali. Misalnya:

- a. Kekerasan tidak hanya internasional, tetapi termasuk domestik terhadap wanita dan kekerasan struktural terhadap perempuan yaitu penekanan dan kesulitan sehingga wanita menderita dari

- struktural politik dan ekonomi sehingga posisi perempuan dan laki-laki tidak setara;
- b. Konsep kekerasan ini memerlukan konsep baru dari konsep-konsep yang tradisional;
  - c. Teori-teori baru diperlukan untuk menempatkan hirarki gender dan persoalan-persoalan hak-hak perempuan dan statusnya dalam konstitusi yang jelas;
  - d. Fokus gender akan membuka kepada sesuatu yang luas dari tradisi dari teori sosial yang berhubungan dengan studi kekuatan sosial dan emansipasi manusia;
  - e. Akhirnya studi gender dalam HI akan mendorong atau bila perlu menggerakkan metodologi dari hal-hal positivist yang menghubungkan dengan neorealisme dan neoliberalisme menuju pada posisi post-positivism.

### 3. Aliran Marxist

Menolak gagasan kaum radikal dan melihat bahwa masalah penindasan kaum perempuan adalah masalah obyektif, yakni bagian dari eksploitasi kelas dalam hubungan produksi. Menurut, Engel, status perempuan menurun sejak terjadinya perpindahan pola mata pencaharian dari berburu menjadi beternak dan bercocok tanam yang menimbulkan surplus. Surplus menghasilkan *property* dan kapital, dan perempuan mulai dianggap sebagai bagian dari *property* juga. Mulai saat itulah laki-laki mendominasi kaum perempuan. Bagi kaum Marxist, perubahan status perempuan harus ditempuh dengan jalan revolusi dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik (rumah tangga).

Kaum Marxist menganggap bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi di kelas manapun. Mereka mengkritik asumsi umum bahwa terdapat hubungan antara partisipasi kaum perempuan dalam produksi dengan status hubungan antara

partisipasi kaum perempuan dalam ekonomi memang perlu, namun tidak otomatis selalu menaikkan status perempuan. Memang ada korelasi antara status dengan pekerjaan, namun keterlibatan perempuan justru mengakibatkan nya dijadikan budak.

Engels membagi kerja pria di pabrik yang produktif dan dibayar, dan pekerjaan wanita yang invisible di lingkungan privat di rumah dan tak dibayar.

Wanita menjadi warga negara kelas dua dan penganut teori Marxist Feminist yang melihat teori-teori Patriarchy Centrist sebagai akibat tekanan dari sistem kapitalis.

## **G. Globalisasi dan Gerakan Feminisme**

Arus globalisasi yang menyebar diseluruh aspek kehidupan umat manusia dan menjadi "*trends*" dunia saat ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana posisi perempuan dalam proses globalisasi? Apakah perempuan diuntungkan oleh globalisasi atau malah dirugikan? Dan apa pula tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminisme ketika dihadapkan pada proses tersebut? Tulisan sederhana dan singkat ini ingin mengkaji masalah tersebut.

Jika kita mendengar istilah "globalisasi", maka bayangan kita akan tertuju pada hal-hal yang bersifat Barat seperti *westernisasi, modernisasi, industrialisasi, dan konsumerisme*. Globalisasi sendiri secara lugas dapat dikatakan sebagai sebuah proses mengglobal nya sesuatu dalam kehidupan masyarakat tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Ia hadir tanpa mengenal batas-batas negara. Salah satu jenis globalisasi itu adalah globalisasi ekonomi, disamping globalisasi politik, sosial dan budaya.

Globalisasi ekonomi yang sangat kental akan nuansa-nuansa proses produksi, distribusi, dan konsumsi telah menjadikan

masyarakat menjadi berpola pikir materialistis. Dalam tatanan masyarakat seperti itu, perempuan adalah pihak yang sangat dirugikan. Betapa tidak, perempuan yang dikenal sangat telaten dan terampil dalam melakukan pekerjaan dieksploitatif secara besar-besaran oleh pola-pola produksi, distribusi, dan konsumsi demi proyek-proyek industrialisasi kapitalis.

Di dalam proses produksi, sebagian besar orang yang bekerja untuk membuat suatu produk dalam sebuah perusahaan atau pabrik adalah perempuan. Lihat saja misalnya, buruh-buruh pada pabrik textile, garmen, dan rokok. Kesemua pekerjaannya adalah sebagian besar perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki keahlian, keterampilan, dan ketelatenan yang jauh lebih baik dari laki-laki untuk pekerjaan tersebut. Akan tetapi, hasil yang dipetik dari pekerjaan itu tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan mereka. Karena itu, kesejahteraan mereka menjadi sangat menyedihkan. Padahal, mereka adalah komponen utama dalam operasionalisasi perusahaan atau pabrik.

Dalam proses distribusi, perempuan telah dijadikan alat yang sangat ampuh untuk mendistribusikan, memasarkan, dan mempromosikan suatu produk. Lihat saja misalnya, iklan-iklan di TV yang sebagian besar diperankan oleh perempuan. Disamping itu, ada juga SPG (*Sales Promotion Girl*) yang berlalu lalang di mal-mal sibuk mempromosikan suatu produk tertentu. Nampaknya, pemasaran suatu produk tidak akan menarik dan tidak akan laku kalau tidak “memanfaatkan” perempuan.

Dalam perilaku konsumsi, perempuan juga menempati urutan teratas sebagai pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Budaya konsumerisme telah menghinggapi dan menjangkiti kaum perempuan. Perempuan modern sekarang ini sangat menyukai aktivitas yang berkaitan dengan *shopping* atau belanja. Lihat saja misalnya, di mal-mal atau pusat perbelanjaan, dominasi perempuan

dalam hal belanja sangat besar. Mereka tidak sadar bahwa kegiatan yang dilakukan secara berlebihan tersebut dapat mengeksploitasi mereka dalam jebakan-jebakan globalisasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan di sini bahwa posisi perempuan, sadar atau tidak sadar, sangat dieksploitir atau tereksplotasi, oleh proses-proses produksi, distribusi dan konsumsi suatu produk dalam konteks kapitalisme global. Mereka telah dijadikan alat sekaligus tujuan atau sasaran dari arus industrialisasi. Mereka telah dimasukkan dalam komponen utama industrialisasi dan globalisasi, tapi timbal balik dari itu semua sangat tidak setimpal. perempuan telah dieksploitir oleh globalisasi. Celaknya lagi, mereka masih dibebani oleh persoalan-persoalan domestik rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak dan mencuci.

Setidaknya terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminisme modern. *Pertama*, tantangan internal yang ada pada sifat dan perilaku perempuan itu sendiri, seperti perilaku *hedonisme, glamour dan materialistis*. Belum begitu banyaknya perempuan yang sadar dan memahami akan arti dan makna gerakan feminisme sehingga mereka hanya memikirkan hal-hal yang hedonis. Hedonisme perempuan inilah yang sangat merugikan perempuan itu sendiri dan gerakan feminisme kontemporer. Mereka lebih mengidentifikasi diri sebagai kaum yang lemah dan lembut.

Di samping itu, di dalam perempuan itu sendiri terdapat fenomena "*women women lupus*". Artinya, terjadi pertarungan antar wanita untuk memperoleh posisi yang lebih baik di mata laki-laki. Perempuan-perempuan semacam ini ingin mendapat popularitas, ketenaran, dan dambaan dari setiap laki-laki dengan mengorbankan perempuan atau kaum sejenisnya. Mereka memosisikan diri sebagai obyek, bukan subyek. Oleh karena itu, gerakan feminisme

di era globalisasi ini harus menyadarkan perempuan-perempuan dalam kategori ini.

*Kedua*, gerakan feminisme yang bertujuan menyadarkan kaum perempuan akan hak-haknya yang telah dirampas oleh kaum laki-laki dihadapkan pada nilai-nilai, norma-norma, budaya atau kultur, dan tradisi-tradisi lokal. Dalam tradisi sosiologis dari daerah atau masyarakat tertentu, perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dianggap biasa saja dan tidak menimbulkan masalah. Sebagai contoh adalah masyarakat Bali, dimana ada nilai yang berkembang bahwa perempuan adalah bekerja mencari nafkah keluarga, sedangkan laki-laki malah main sabung ayam. Tapi, itu tidak dipersoalkan dan perempuan disana menerima itu sebagai kultur, bukan penindasan. Sekali lagi ini adalah masalah nilai-nilai sosiologis.

Kendati demikian, arus globalisasi dan industrialisasi mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya lokal dan semakin terserapnya budaya-budaya global. Sekarang ini, telah muncul "*trends*" di kalangan perempuan Indonesia untuk melepaskan dan membebaskan diri dari norma dan tradisi yang dianutnya. Oleh karena itu, gerakan feminisme yang sekarang sedang tumbuh harus memperhatikan hal itu secara kritis. Selain itu, globalisasi telah menyadarkan kaum perempuan dari tradisi dan nilai sosiologis yang mengungkung hak-haknya.

Dengan demikian, fenomena globalisasi harus disikapi secara arif dan bijaksana. Artinya, gerakan feminisme harus pandai-pandai mengambil dan memanfaatkan segala dampak ikutan dari proses globalisasi. Gerakan feminisme tidak boleh *apriori* dan *antipati* terhadap globalisasi, namun juga tidak boleh hanyut dalam arus globalisasi. Sebagai kata akhir, "ada asap pasti ada api". Gerakan feminisme akan terus ada jika terjadi penindasan terhadap perempuan dan tidak akan ada jika tidak terjadi penindasan

terhadap perempuan. Marilah kita berpikir dan bertindak dari pepatah sederhana itu.

## H. Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan Gender

Untuk dapat melakukan perencanaan yang berwawasan gender, perlu dipenuhi persyaratan kelembagaan tertentu, khususnya dari departemen sektoral, yakni: Adanya kehendak politik. Terwujudnya jaringan kelembagaan di dalam konteks struktural yang ada untuk dapat melaksanakan “gender responsive plan”, Meng-*up-date*/merevisi data statistik yang mendukung proses perencanaan, Skala prioritas, Alokasi berbagai sumber.

Tabel Matriks Perencanaan berwawasan Gender

No	Program	Proses	Organisasi
1	Peningkatan perencanaan berwawasan gender	Konsultasi	Bappenas, UPW, Departemen sektoral
2	Pembentukan focal point	Tim inti dalam departemen yang memberikan dukungan manajemen dan petunjuk teknis	UPW, Departemen Sektoral
3	Gender Development Information system	Peningkatan data pengumpulan data dan diseminasi data	BPS, Kantor Statistik, UPW, Sektoral PSW
4	Keterampilan	Pelatihan Modul dan TOT	UPW, Departemen Sektoral

5	Networking (pembentukan jaringan)	Koordinasi dengan sektor-sektor dan pemerintah daerah	Pemda dan LSM
---	--------------------------------------	---	---------------

Sumber: Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 75.

## I. Manfaat Pembangunan yang Berwawasan Gender

1. Terwujudnya kebijakan pembangunan yang lebih realistis, karena akan mengungkap realitas partisipasi, akses dan kontrol terhadap sumber dan manfaat.
2. Terwujud kebijakan pembangunan yang lebih efektif, karena dapat mengidentifikasi kelompok sasaran secara lebih tepat sehingga pemanfaatan sumber-sumber pembangunan akan lebih efisien.
3. Timbulnya kebijakan pembangunan secara lebih *equitable* karena memperhitungkan distribusi "cost and benefit" serta dapat mengungkap *policy gaps* dan kelemahan-kelemahan dari perspektif kelompok sosial tertentu, yaitu wanita relatif terhadap pria.

## BAB VIII

---

# LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam studi Hubungan Internasional, isu lingkungan hidup mulai muncul dan menguat ke permukaan pada dekade tahun 1970-an. Mengglobalnya isu lingkungan hidup dilatarbelakangi oleh fenomena degradasi lingkungan hidup, seperti perusakan hutan, polusi, kerusakan tanah (*soil depletion*), erosi, rusaknya lapisan ozon, dan pemanasan global (*global warming*).

Degradasi Lingkungan Hidup yang mengarah pada krisis lingkungan hidup ini telah memalingkan perhatian masyarakat internasional untuk mencari sebab-sebab terjadinya krisis lingkungan hidup dan upaya mencari jalan keluarnya. Langkah dan strategi global diperlukan karena krisis lingkungan ini tidak hanya berdampak pada satu negara saja, tapi seluruh dunia.

Rangkaian pertemuan tingkat dunia digelar oleh berbagai negara untuk membahas tentang permasalahan lingkungan hidup. Inti dari digelarnya pertemuan-pertemuan dan konferensi-konferensi dunia tersebut adalah untuk mencari jalan keluar dan solusi alternatif terhadap fenomena rusaknya lingkungan hidup dunia dari ancaman kerusakan dan perusakan, baik oleh aktifitas industrialisasi maupun eksperimentasi.

Berbagai aksi dan gerakan lingkungan hidup juga digelar oleh berbagai aktifitas NGO berskala internasional, seperti Green Peace, guna menyadarkan masyarakat dunia akan ancaman dunia dari kerusakan lingkungan hidup. Program penyadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup ini difokuskan pada dunia agar supaya sadar bahwa masalah lingkungan hidup bukan menjadi persoalan satu atau beberapa negara saja, melainkan harus menjadi perhatian semua negara karena semua negara hidup dalam satu bumi, sehingga apabila bumi tempat kita berpijak hancur, maka semua umat manusia akan mengalami kehancuran.

Tulisan ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang: (1) cakupan dan signifikansi lingkungan hidup; (2) penggambaran degradasi dan krisis lingkungan hidup global; (3) perhatian dunia terhadap masalah Lingkungan hidup; (4) konsepsi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup; (5) Tinjauan terhadap NGO berskala internasional yang bergerak di dalam lingkungan hidup, yakni Green Peace.

## **A. Cakupan dan Signifikansi Lingkungan Hidup**

### **1. Cakupan Lingkungan Hidup**

- a. Tanah/Daratan. Artinya berbagai makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di bumi ini.

- b. Air. Berupa lautan, danau, sungai, mata air yang di dalamnya terdapat ikan, rumput laut, plankton dan lain-lain.
- c. Udara. Yang mencakup atmosfer yang mendukung proses kehidupan di Bumi.

## 2. Signifikansi Lingkungan Hidup

Pada dasarnya, lingkungan hidup memiliki signifikansi atau arti penting politis melalui tiga fungsi utamanya yang bernilai ekonomis, yakni:<sup>1</sup>

- a. Sebagai barang konsumsi (*as a consumption goods*).
- b. Sebagai penyedia sumber daya atau bahan baku bagi proses produksi (*as a supplier of resources*).
- c. Sebagai penyerap berbagai limbah industri pada khususnya dan aktifitas manusia pada umumnya (*as a receptacle of wastes*).

Kemudian secara politik, Lingkungan Hidup memiliki tiga fungsi strategis:<sup>2</sup>

- a. Lingkungan Hidup sebagai sumber konflik antar negara, ex: air di Timur Tengah.
- b. Lingkungan Hidup sebagai sumber konflik domestik suatu negara, ex: erosi, populasi, migrasi, polusi.
- c. Degradasi dan Polusi Lingkungan Hidup sebagai bahaya khusus yang memerlukan kerjasama internasional, ex: regim untuk menjaga lingkungan global.

---

<sup>1</sup> Nurul Isnaeni, Bank Dunia, Indonesia, dan Politik Lingkungan Global: Mencermati Agenda Pembangunan Berkelanjutan, dalam *Jurnal Global*, Vol. 1, No. 7 Tahun 2001, hlm. 45.

<sup>2</sup> Georg Sorensen dan Robert Jackson, *Introductions of International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 255.

## B. Perhatian Dunia terhadap Masalah Lingkungan Hidup

Ada beberapa konferensi dan pertemuan berskala internasional yang dapat menjadi bukti normatif gagasan dan kepedulian masyarakat dunia terhadap permasalahan lingkungan hidup, yaitu:<sup>3</sup>

1. *Stockholm Conference on Human Environment/SCHE* (Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm tahun 1972). Konferensi yang diprakarsai oleh PBB ini telah menandai dimulainya upaya internasional yang terorganisir untuk menetapkan agenda komprehensif bagi perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan ekonomi. Konferensi ini berhasil membentuk *United Nations Environmental Programme/UNEP* (Program PBB bagi Lingkungan Hidup) sebagai lembaga permanen, yang memonitor kecenderungan lingkungan global, melaksanakan pertemuan internasional dan negosiasi perjanjian internasional.
2. *World Commission on Environment and Development/WCED* (Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan, 1987).

Dalam publikasi hasil studinya tahun 1987 yang berjudul "*Our Common Future*", Komisi Dunia ini melansir adanya relasi yang kuat antara masalah kelaparan, kemiskinan, hutang luar negeri, stagnasi pertumbuhan ekonomi dengan masalah lingkungan hidup. Studi kritis Komisi Dunia yang juga dikenal dengan *The Brunt Land Commission* ini dianggap sebagai terobosan penting karena menggunakan pendekatan integral antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan

---

<sup>3</sup> Dirangkum dari Makarim Wibisono, *World Summit On Sustainable Development: Jawaban Atas Permasalahan Dunia? Perspektif Dunia*, dalam *Jurnal Global*, Vol. 5, No. 1, November 2002, hlm. 65 – 70.

perlindungan lingkungan sehingga menghasilkan suatu konsep pembangunan baru, yakni *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan).

Definisi Pembangunan Berkelanjutan:

*“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.*

3. *The Earth Summit* (KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, 1992).

KTT Bumi juga dikenal dengan *The United Nations Conferences on Environment and Development*. KTT Bumi diselenggarakan untuk menindaklanjuti dan memformulasikan mekanisme yang tepat untuk menangani perlindungan lingkungan akibat proses pembangunan. KTT Bumi menghasilkan dua konvensi penting mengenai masalah lingkungan global, yakni:

- a. *Convention on Bio-diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati)
- b. *Convention on Climate Change* (Konvensi perubahan Iklim)

KTT Bumi juga telah mengeluarkan agenda 21 sebagai *global action of plan* yang menjadi dasar rujukan bagi implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, PBB membentuk sebuah lembaga, yakni *Commission on Sustainable Development* (CSD) sebagai komisi yang berfungsi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).

4. Penyelenggaraan sidang khusus Majelis Umum (MU) PBB tahun 1997 di New York yang bertujuan mengkaji pelaksanaan butir-butir KTT Bumi selama lima tahun. Sidang khusus ini kemudian lazim dikenal dengan pertemuan Rio + 5. hasil dari sidang ini adalah pengesahan “Programme for Further Implementation of Agenda 21”.

5. Pertemuan Komite Persiapan (*Preparatory Committee-PrepCom*) dalam menghadapi KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 25 Agustus - 6 September 2002. *PrepCom* ini dilangsungkan 4 kali, yakni:
  - a. *PrepCom* 1 di New York tanggal 30 April-2 Mei 2001
  - b. *PrepCom* II di New York tanggal 28 Januari-8 Februari 2002
  - c. *PrepCom* III di New York tanggal 5 Maret-5 April 2002
  - d. *PrepCom* IV di Bali tanggal 27 Mei-7 Juni 2002.
6. *World Summit on Sustainable Development/WSSD* (KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, tahun 2002). Landasan diselenggarakannya WSSD ini adalah keputusan MU PBB untuk melaksanakan WSSD melalui *Resolusi A/Res/55/199*. KTT WSSD menghasilkan tiga dokumen penting, yakni:
  - a. *Johannesburgh Declaration on Sustainable Development*
  - b. *Johannesburgh Plan of Implementation*
  - c. Program aksi dengan target waktu dan sarana implementasi yang tegas dan peluncuran inisiatif kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.

### **C. Degradasi Lingkungan Hidup**

Sampai dengan tahun 2002, terdapat beberapa data dan indikator yang menunjukkan adanya degradasi lingkungan di muka bumi ini, yakni:<sup>4</sup>

1. Hanya dalam kurun waktu 30 tahun, telah terjadi degradasi tanah seluas 22 milyar atau 15% tanah bumi sebagai akibat aktifitas manusia.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

2. Setengah dari sungai dunia terpolusi secara serius. 80 negara (40% populasi dunia) mengalami kesulitan air yang serius; 1,1 milyar manusia masih tidak memiliki akses terhadap air minum dan 2,4 milyar manusia, terutama di Asia dan Afrika, tidak memiliki akses terhadap sanitasi.
3. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dunia telah kehilangan 2,4% (3.866 juta hektar) hutan yang berakibat signifikan pada hilangnya keanekaragaman hayati.
4. Pada bulan September 2000, lubang ozon di atas antartika telah mencapai rekor tertinggi, yakni 28 juta km persegi.
5. Hanya lebih dari setengah persediaan air bersih saat ini terpakai manusia setiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2015, setidaknya 40% penduduk dunia akan hidup di negara-negara yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
6. Kita telah menghancurkan ekonomi alam dimana ekonomi pasar bergantung, contohnya badak bercula satu dan penyu bergaris tiga yang hidup di Cina Selatan sudah hilang dan tidak mungkin diteruskan kembali. Sebagai akibatnya, kita mungkin akan memusnahkan setengah dari spesies tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di bumi pada akhir abad ke-21 bila membiarkan keadaan seperti ini terus berlangsung.

#### **D. Penyebab Degradasi Lingkungan Hidup**

Degradasi lingkungan hidup sebenarnya disebabkan oleh interpretasi yang salah dalam memahami dan menerapkan konsepsi pembangunan. Pembangunan neo liberal yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi tanpa mengindahkan faktor perlindungan lingkungan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi udara dan rusaknya

lapisan ozon. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi kontributor rusaknya lingkungan hidup, yakni:<sup>5</sup>

## 1. Industrialisasi

Proses industrialisasi yang ditandai dengan pendirian pabrik-pabrik telah menyebabkan gundulnya hutan dan persawahan karena dipakai sebagai lokasi pabrik. Belum lagi limbah industri yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan tercemarnya air dalam sungai dan danau. Lapisan ozon juga robek akibat zat karbon yang dikeluarkan dari cerobong pabrik.

Tingkat Polusi Gas Karbon Beberapa Negara (1950-1990, dalam satuan Megaton)

Negara	Emisi Gas Karbon (dalam Megaton)	Prosentase Terhadap Total Emisi Gas Karbon Dunia (%)
Amerika Serikat	37. 284	30,1
Jerman	9. 123	7,4
Inggris	5. 922	4,8
Jepang	6. 924	5,6
Rusia	22. 039	17,8
Korea Selatan	584	0,5
Cina	8. 448	6,8
India	2. 184	1,8
Indonesia	419	0,3

Sumber: Bob S. Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 212.

## 2. Revolusi Hijau

Sejak pertengahan dekade 1960-an, para perancang pembangunan melakukan upaya besar-besaran untuk meningkat-

---

<sup>5</sup> Bob S. Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 211 - 216.

kan output produk pertanian di negara sedang berkembang dengan cara pengenalan teknik mekanisasi, penggunaan pupuk dan pestisida, metode pengairan dengan sistem bendungan serta pengembangan bibit unggul. Proyek yang kemudian dikenal dengan nama “Revolusi Hijau”. Di samping manfaat positif yang besar, revolusi pertanian juga berdampak negatif, yakni:

- a. Mekanisasi pertanian dapat merusak struktur tanah.
- b. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan merusak struktur tanah.
- c. Pembangunan sistem irigasi modern dapat mengganggu keseimbangan ekologis.

#### **E. Perbedaan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Konvensional**

<b>No</b>	<b>Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Pembangunan Konvensional</b>
1	Pembangunan berkelanjutan cenderung menganggap bahwa satu-satunya faktor yang membatasi produksi adalah keterbatasan persediaan sumber-sumber alam	Pembangunan konvensional menganggap bahwa faktor yang membatasi produksi hanyalah persediaan modal (modal).
2	Pembangunan berkelanjutan mendasarkan pada moralitas bahwa sumber-sumber alam perlu untuk dipertahankan kelestariannya agar dapat dikonsumsi oleh generasi-generasi selanjutnya.	Pembangunan konvensional cenderung melihat pembangunan dalam lingkup satu generasi saja
3	Pembangunan berkelanjutan berpendapat bahwa prosedur akunting pembangunan seharusnya memasukkan	Pembangunan konvensional tidak sedikit pun memasukkan faktor lingkungan ke dalam kalkulasinya.

	faktor kerusakan lingkungan sebagai bagian dari biaya-biaya sosial yang harus dipikul oleh para pelaku ekonomi.	
4	Pembangunan berkelanjutan menganggap bahwa keterbatasan kapasitas alam dalam menyerap limbah industri harus diperhitungkan oleh para pelaku bisnis untuk secara sukarela mengurangi pembuangan limbah (terutama yang beracun)	Pembangunan konvensional merasa optimis bahwa alam dapat dengan sendirinya mengatasi persoalan limbah.

Sumber: Bob S. Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 218.

## F. Aliran Pemikiran dalam Lingkungan Hidup

Dalam studi hubungan internasional, ada dua aliran dominan yang saling berdebat dan sulit untuk dipertemukan dalam melihat fenomena lingkungan hidup, yakni: aliran pemikiran modernis dan ecoradikal. Perbedaan singkat terkait asumsi dasar dari dua aliran ini disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	Modernis	Ecoradikal
1	Lingkungan Hidup bukan masalah serius. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat digunakan untuk melindungi lingkungan hidup.	Lingkungan hidup adalah masalah yang serius. Perubahan cepat dalam gaya hidup ditambah kontrol terhadap populasi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah keharusan.
2	Ketika manusia berupaya meningkatkan pendapatan maka ia dihadapkan pada	Hanya dengan teori politik hijau ecosentris yang dapat memberikan kerangka

	<p>masalah. Masalah yang tentunya akan memberikan peluang dan solusi. Solusi akan ditemukan dengan sendirinya.</p>	<p>komprehensif yang diperlukan dalam mengatasi krisis lingkungan hidup.</p>
--	--	--

Sumber: Georg Sorensen dan Robert Jackson, *Introductions of International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 253.

Dalam perkembangannya, masalah lingkungan hidup telah memunculkan sebuah teori baru dalam Hubungan Internasional, yakni Green Politics. Green Politics muncul sebagai kekuatan yang signifikan di banyak negara pada pertengahan tahun 1970-an. Karenanya, banyak istilah dalam hubungan internasional yang dipengaruhi oleh teori green politics, seperti ecology global, egosentrisme, global environment *governance*.

## BAB IX

---

# PARIWISATA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Fenomena yang sangat menarik dalam hubungan internasional pada paruh kedua abad ini adalah arus perjalanan manusia di seluruh dunia yang meningkat luar biasa sebagai akibat dari peningkatan perjalanan antar negara untuk keperluan bisnis, pariwisata, belajar ke luar negeri, maupun perpindahan pengungsi yang menghindari kekacauan politik di negerinya sendiri.

Akibatnya, manusia modern abad 20 ini mau tidak mau menjadi partisipan dalam jaringan sosial yang jumlahnya jauh lebih banyak dan yang kegiatannya jauh lebih meluas di banding generasi manapun di abad-abad lalu. Banyak diantara manusia modern sekarang menjadi “pemotong garis perbatasan antar negara”, yaitu orang yang melakukan perjalanan kesana kemari di

dunia ini secara bebas, seolah-olah tidak ada perbatasan antar negara.

Para penstudi Hubungan Internasional perlu memahami sektor pariwisata dengan alasan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis dan melintas batas negara bangsa. Kegiatan pariwisata melibatkan aktor-aktor besar selain negara, seperti Operator Wisata, Biro perjalanan lintas negara, dan jaringan fasilitas penunjang pariwisata, seperti Hotel, Pesawat Terbang, dan lain-lain.

Tulisan ini akan menguraikan tentang pengertian pariwisata, pariwisata dalam konteks hubungan internasional, dampak positif dan negatif sektor pariwisata dan gambaran umum tentang organisasi pariwisata dunia, yakni *The Pacific Asian Travel Association* (PATA).

## **A. Pengertian Pariwisata**

Secara etimologis, kata Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "Pari" dan "Wisata". Pari: banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan Wisata: perjalanan, bepergian, pelancongan (dalam bahasa Inggris disebut dengan "travel"). Oleh karena itu, pariwisata biasanya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain (dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "tour" atau "tourism").

Menurut Herman V. Schulalard, seorang ekonom Austria, Pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang terkait dengan

perekonomian, oleh satu atau lebih orang yang keluar masuk suatu kota, daerah/wilayah, atau negara tertentu.<sup>1</sup>

Menurut E. Guyer Freuler, pariwisata adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan.<sup>2</sup>

Menurut Hunzieker dan K. Krapf, Pariwisata adalah seluruh gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu.<sup>3</sup>

Menurut Saleh Sahab, dalam buku "Pengantar Ilmu Pariwisata", Pariwisata adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri. (di luar negeri) meliputi pendiaman orang dari daerah lain untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.<sup>4</sup>

Sementara itu, di Indonesia, istilah "pariwisata" baru populer setelah diselenggarakan "Musyawarah Nasional Tourism II". Sebelum itu, istilah Pariwisata ditulis dan digunakan dengan istilah "*tourism*". Hal ini terlihat dalam pemakaian Tourism dalam

---

<sup>1</sup> Dikutip dalam Oka A. Yuti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1983), hlm. 105.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dikutip dalam *Annual Report of the ASEAN Standing Committee*, 1983-1984, hlm. 80

<sup>4</sup> Saleh Sahab, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Refika Aditama, 1982). hlm. 23

lembaga pemerintah di sektor Pariwisata, yakni Dewan Tourism Indonesia, yang kemudian diganti menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (Depari) pada tahun 1960.

## **B. John Naisbit dan Proyeksi Pariwisata**

Dalam bukunya yang berjudul *Global Paradox* edisi 1994<sup>5</sup>, Naisbit mengatakan bahwa 204 juta penduduk dunia bekerja di bidang pariwisata atau 1 dari setiap 9 pekerja atau 10,6 persen dari angkatan kerja dunia. Bahwa 10,2 persen produk nasional bruto (GNP) dunia berasal dari turisme. Bahwa dengan output 3,4 trilyun dollars AS, turisme merupakan industri terbesar di dunia. Bahwa konsumsi turisme sedunia merupakan 10,7 persen dari seluruh konsumerisme dunia. bahwa investasi turisme sedunia merupakan 10,7 persen dari seluruh dunia.

Tentang masa depan turisme, Naisbit mengatakan bahwa antara tahun 1994-2005, atau dalam jangka waktu 11 tahun, lapangan kerja bidang pariwisata terhitung 144 juta. Dari jumlah itu, 125 juta lapangan kerja merekah di wilayah Asia Pasifik, yang perkembangannya pesat sekali. (Tentu saja, perkiraan dan perhitungan itu meleset. Tidak akan sebesar itu. Bahkan, dewasa ini turisme dunia terpukul mundur oleh aksi terorisme, perang dan wabah penyakit).

Munculnya aksi terorisme yang ditandai dengan tragedi WTC dan Pentagon, 11 September 2001, dan kemudian disusul dengan tragedi Bom Bali, 12 Oktober 2002, serta rangkaian bom yang meledak di hampir seluruh pelosok dunia telah menciptakan sebuah ketakutan global sehingga berdampak pada sektor pariwisata dunia. Negara-negara besar, terutama AS, seringkali menerapkan kebijakan "*travel warning*" kepada warga negaranya

---

<sup>5</sup> John Nasibit, *Global Paradox* (terjemahan), (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).

yang ingin bepergian ke luar negeri untuk tujuan pariwisata. Hal itu dilakukan untuk keselamatan warga negaranya dari ancaman bom yang dilakukan oleh kelompok terorisme.

Wabah penyakit yang melanda berbagai negara dunia juga menambah lesunya dunia pariwisata. Wabah penyakit SARS yang melanda sebagian besar negara-negara Asia, khususnya Cina, Taiwan dan Hongkong, yang timbul pada tahun pertengahan 2003 telah memukul bisnis pariwisata karena masing-masing negara sangat selektif dalam menerima warga negara asing, takut wilayahnya termasuki oleh virus SARS yang mematikan dan konon katanya belum ada obatnya ini.

Ditambah lagi dengan munculnya virus flu burung yang muncul pada awal tahun 2004-an ini. Virus flu burung yang melanda negara-negara Asia telah menjadikan para pelaku usaha, khususnya di Bali dan Yogyakarta merasa resah karena para pelancong domestik dan turisme asing enggan untuk pergi berpariwisata.

Melihat kenyataan di atas, sektor pariwisata dunia pada masa mendatang akan mengalami berbagai hambatan dan kendala, meskipun itu semua tidak mengganggu kegiatan industri pariwisata secara keseluruhan. Industri pariwisata akan mengalami peningkatan, meskipun di bawah ancaman, khususnya ancaman terorisme yang diprediksikan akan terus menggejala.

### **C. Pariwisata Ditinjau dari Perspektif Hubungan Internasional**

Sampai saat ini, sangat terbatas tinjauan fenomena pariwisata dari sudut pandang ilmu yang jarang sekali dilibatkan dalam pembahasan semacam ini, yakni ilmu Hubungan Internasional. Pertanyaannya, Bagaimana ilmuwan hubungan

internasional memahami fenomena ini?. Literature hubungan internasional menyediakan dua konsep.<sup>6</sup>

Pertama, "hubungan transnasional", yang menyatakan bahwa hubungan yang bermakna bukan hanya yang terjadi antar negara bangsa, tetapi juga yang melibatkan mereka dengan swasta, seperti perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat, maupun individu.

Kedua, "ekonomi politik internasional", yang menekankan bahwa pemahaman yang lengkap mengenai hubungan internasional mengharuskan kita untuk melihat fenomena domestik-internasional dan ekonomi-politik dari satu perspektif.

Masalah pertama yang harus diperhatikan adalah siapa aktor yang berpengaruh penting dalam industri pariwisata. Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa pariwisata sebenarnya adalah bisnis yang didominasi oleh aktor-aktor dominan, yakni perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju. Industri pariwisata meliputi perusahaan penerbangan dengan jadwal tetap (seperti JAL, KLM, Lufthansa, Qantas), perusahaan penerbangan carteran (seperti Laker, Donaldson, Condor), jaringan perhotelan (seperti Hilton, Sheraton, Holliday Inn, Hyatt, Regents), operator wisata (seperti Neckerman, American Express, Thomsons), perusahaan persewaan mobil (seperti Avis, Hertz), operator kapal wisata (seperti Holland America, Cunard, P&O), dan berbagai perusahaan kecil yang terlibat dalam kegiatan penunjang seperti perusahaan pembuat alat ski, carter Yacht atau pengiriman lewat udara buah-buahan segar untuk hotel.

---

<sup>6</sup> Semua data ini dirangkum dari buku Mohtar Mas'oe, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 109 – 123, khususnya pada Bab 7 tentang Ekonomi Politik Pariwisata. Sekaligus penulis ingin minta ijin atas semua kutipan yang ada dalam buku ini.

Akibatnya, sebagian besar uang yang dibelanjakan oleh para wisatawan asing di dunia ketiga pada akhirnya kembali juga ke negara-negara pemilik perusahaan-perusahaan itu. Menurut penelitian Turner, negara tujuan wisata pada akhirnya hanya menerima 10% dari uang yang dibelanjakan wisatawan asing itu. Misalnya, Turis Jerman mengunjungi Nepal dan membelanjakan uangnya sebesar \$2.000 selama dua minggu kunjungan di sana. Karena biasanya perjalanan ke Nepal ditaruh dalam satu paket dengan wisata ke India dan Thailand, ekonomi Nepal mungkin hanya menerima 10% dari jumlah itu.

Hal ini bisa dijelaskan dengan menunjukkan bahwa semakin panjang jarak yang harus ditempuh dalam suatu paket wisata, semakin komponen ongkos transport dalam penentuan harga paket wisata itu. Belum lagi kalau kita melihat berbagai kemungkinan lain kembalinya devisa itu ke negeri aslinya. Hotel-hotel kita dibangun dengan materiel canggih yang teknologinya sebagian besar diimpor; misalnya lift, eskalator, AC sentral dan lain-lain. Makanan yang disajikan dalam hotel-hotel itu juga banyak yang diimpor; misalnya daging untuk "steak", dan buah-buahan mewah. Penyelenggara wisata kita juga suka menggelar produk-produk impor, seperti Coca-cola, Kentucky Fried Chicken, Mac Donald, dan Pizza Hut.

Dominasi aktor-aktor dari negara-negara industri maju dalam bisnis wisata ini juga tampak dalam segi politik. Dalam jajaran industri internasional, industrialis yang menangani pariwisata sangat istimewa. Misalnya, IFTO (International Federation of tour Operators) atau TOSG (Tour Operators Study Group) seringkali berusaha mengatur perilaku pemerintah negara sasaran kunjungan wisata dan seringkali mereka berhasil. Misalnya, mereka telah berhasil menuntut pemerintah Tanzania untuk membenahi sarana wisatanya yang merosot; pemerintah Yunani

untuk menurunkan pajak hotel; pemerintah Tunisia untuk membatalkan keharusan terus untuk menyebutkan uang yang dibawanya; pemerintah Spanyol agar membatalkan upaya pribumisasi operator wisata.

Wewenang pemerintah negara-negara sasaran wisata itu juga semakin terganggu oleh fenomena ‘tengkulak’ dalam bisnis ini. Posisi pemerintah sasaran tujuan wisata dalam hubungan dengan operator wisata dan perusahaan penerbangan internasional tidak jauh beda dengan posisi produsen makanan dengan toko pengecer seperti “Golden truly” yang menjualkan produknya.

Dengan demikian, kekuatan perusahaan penerbangan dan operator wisata, sebagai aktor industri wisata, semakin meningkat karena ia bisa memanfaatkan posisi sentralnya dalam pasar untuk melakukan diversifikasi secara vertikal dan dengan demikian memperketat cengkeraman mereka dalam bisnis itu dari awal sampai akhir. Begitulah perusahaan penerbangan membangun jaringan hotel untuk melayani penumpangnya (Pan Am memiliki Inter-Continental Hotel, JAL memiliki Niko Hotel dimana-mana, dan TWA memiliki Hilton International). Dan sebaliknya, operator wisata membangun perusahaan penerbangannya sendiri.

## **D. Dampak dari Industri Pariwisata**

### **1. Dampak Positif**

- a. Menambah Devisa negara. Data tahun 1997 menyebutkan bahwa sektor pariwisata mampu melesat dan menempatkan posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga setelah Migas dan tekstil dengan nilai penerimaan sebesar 5,4 milyar dollar AS. Penerimaan devisa tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar 9,61% terhadap PDB Nasional serta

menyerap angkatan kerja nasional 8% atau sebesar 6,6 juta tenaga kerja.

- b. Industri pariwisata memicu dan mendorong terciptanya dampak multiganda (*multiplier effect*) yang besar, melalui tumbuhnya sektor-sektor usaha skala kecil dan menengah yang akan banyak memasok kebutuhan barang dan jasa pelayanan yang sangat luas dan beragam jenisnya bagi industri pariwisata.
  - c. Industri pariwisata sebagai agen dan instrumen pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pariwisata bisa juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Logikanya adalah bahwa masyarakat yang berada di lokasi-lokasi pariwisata biasanya akan mengalami keuntungan dari aktifitas di sektor industri pariwisata, khususnya para pengusaha hotel, pengusaha makanan, dan pengusaha transportasi.
2. Dampak Negatif
- a. Gaya Hidup dan Pola Hidup. Masuknya wisatawan asing ke suatu negara akan mempengaruhi gaya hidup dari penduduk di negara tersebut. Di Indonesia, keberadaan wisatawan asing mempengaruhi pandangan dan perilaku penduduk Indonesia. Sebagai contoh, mereka sebagian besar meniru pola hidup yang melekat pada wisatawan asing yang kebanyakan berasal dari Barat. Mulai dari cara berpakaian, makan-minum, cara berbicara, potongan rambut, sampai dengan pola pesta dan foya-foya.
  - b. Proyek-proyek Pariwisata seringkali tidak mengindahkan aspek lingkungan yang ada di sekitarnya. Kadangkala pemerintah membangun sebuah situs pariwisata, tapi tidak memperhatikan faktor AMDAL (analisis dampak

lingkungan) sehingga seringkali merugikan masyarakat domestik yang ada di sekitar lokasi pariwisata.

- c. Industri pariwisata biasanya menggusur nilai-nilai lokal yang melekat dalam suatu wilayah tertentu. Wisatawan asing yang biasanya membawa nilai-nilai kultural Barat mudah sekali melakukan penetrasi terhadap nilai kultural domestik sehingga mengalahkan pranata-pranata sosial yang dianut oleh masyarakat setempat.
- d. Ada stigma umum yang telah menjadi kenyataan atau realitas dalam masyarakat bahwa dalam setiap obyek wisata, baik yang bertaraf internasional, nasional maupun lokal, terdapat praktik-praktik prostitusi yang amoral dan asusila karena melanggar norma-norma kultural setempat.

#### **E. Tinjauan Organisasi Pariwisata Dunia: PATA**

PATA adalah singkatan dari *The Pacific Asian Travel Association*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Asosiasi Perjalanan Wisata Asia Pasifik. Sesuai dengan namanya, PATA merupakan organisasi perjalanan wisata yang di dalamnya terdiri dari Biro-biro perjalanan wisata atau semua yang terkait dengan pergerakan pariwisata untuk kawasan Asia Pasifik, yang meliputi antara Amerika Utara sampai dengan India, dan antara kutub Utara sampai kutub Selatan.

Organisasi ini berdiri pada tanggal 12 Januari 1952 di Honolulu, Amerika Serikat. Sejarah berdirinya PATA adalah prakarsa dari Lorin P. Thurston, ketua Hawaii Visitors Bureau, yang melontarkan gagasan bahwa diperlukan prinsip-prinsip dasar untuk mengembangkan wilayah Asia Pasifik, termasuk di dalamnya Hawaii. Selanjutnya, diselenggarakan konferensi pertama di Honolulu, Hawaii, pada tahun 1952, yang selain menghasilkan

peraturan, struktur, keanggotaan dan langkah-langkah kebijakan lainnya, konferensi ini juga menghasilkan kesepakatan bahwa Kota San Francisco, Amerika Serikat, sebagai kantor pusat dari PATA.

Indonesia masuk menjadi anggota PATA sejak Januari 1957 yang saat itu masih diwakili oleh satu badan semi pemerintah, yakni Dewan Turisme Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Pariwisata berdasarkan Kepres No. 44 dan 45 tahun 1974.

Latar belakang pembentukan PATA adalah keinginan dari negara-negara di Asia Pasifik untuk mempromosikan dan memasarkan kawasan Asia Pasifik sebagai daerah tujuan wisata sehingga dapat menarik devisa yang besar bagi negara-negara yang ada di wilayah Asia Pasifik.

Jumlah anggota PATA sampai dengan tahun 1998 berjumlah 2.100 anggota yang terdiri dari organisasi industri pariwisata. Selain itu, terdapat lebih dari 17.000 anggota perorangan PATA yang terkenal dengan sebutan PATA Chapter.

Fungsi utama PATA adalah mempromosikan tempat-tempat pariwisata beserta produk dan jasanya yang terdapat pada negara-negara anggotanya melalui networking, pemasaran, promosi, serta *travel mart/trade show*. Di samping itu, PATA juga berfungsi sebagai pusat informasi riset, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di sektor industri pariwisata.

Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, PATA melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
2. Melakukan *up dating* data terkait dengan informasi mutakhir tentang industri pariwisata di Asia Pasifik.

3. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, promosi, dan penyebaran pamflet-pamflet dan leaflet-leaflet seputar informasi pariwisata di Asia Pasifik.
4. Menyelenggarakan forum pertemuan sebagai wadah dialog dan diskusi antara para *stakeholders* pariwisata di kawasan Asia Pasifik.

## **BAB X**

---

# **NGO DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

### **A. NGO dan Ideologi Developmentalisme**

Berakhirnya perang Dunia II membawa perubahan fundamental pada konstelasi politik internasional. Hancurnya perekonomian negara-negara Eropa Barat, munculnya negara-negara kecil menemukan kemerdekaannya sehingga sering disebut sebagai Negara Dunia Ketiga (selanjutnya disebut NDK), dan lahirnya dua kekuatan adidaya dunia, yakni Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS) dan Uni Soviet (selanjutnya disebut US) merupakan rentetan perubahan besar yang membawa dunia ke dalam babak baru.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tentang proses perubahan besar-besaran dalam tatanan politik global pasca perang Dunia II dan implikasi ikutannya dapat dibaca lebih lanjut dalam Walter S. Jones, *Logika Hubungan*

Babak baru ini ditandai dengan adanya kebutuhan dari masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian, mencegah perang, dan menanggulangi kemiskinan.<sup>2</sup> Sebagai negara adidaya, AS berkepentingan untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat yang hancur akibat perang Dunia II.<sup>3</sup> Melalui program “*Marshal Plan*” dan didukung oleh formula ekonomi makro yang dirumuskan oleh John Maynard Keynes, AS berhasil membangkitkan kembali Eropa Barat sebagai blok perekonomian dunia hanya dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun. Keberhasilan AS ini menumbuhkan keyakinan di kalangan ilmuwan Barat bahwa resep pembangunan ekonomi yang di dalamnya terdapat anjuran intervensi pemerintah dan keterlibatan lembaga internasional, memang mujarab.

Perasaan percaya diri seperti itulah yang menumbuhkan gagasan untuk menerapkan resep pembangunan itu ke wilayah-wilayah terbelakang yang baru saja merdeka atau NDK. Pada dasawarsa 1950-an, gagasan seperti itu berkembang menjadi wacana dominan di universitas-universitas ternama di AS, seperti

---

*Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 47 – 54.

<sup>2</sup> Dalam kaitan itu, 44 negara berkumpul pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, AS untuk meletakkan secara bersama landasan ekonomi global bagi kemakmuran dunia. Hasilnya, lahirlah dua lembaga internasional yang sekarang dikenal dengan nama Bank Dunia (dulunya IBRD, International Bank for Reconstruction Development) dan Dana Moneter Internasional (IMF, *International Monetary Fund*). Dengan adanya kedua lembaga dunia itu, diharapkan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan perang dapat dihindari. Lahirnya Bank Dunia dan IMF merupakan babak baru dalam sejarah umat manusia dimana pembangunan negara-negara juga menjadi urusan negara-negara lain di dunia ini. Pembangunan bukan lagi merupakan masalah nasional saja, tapi global. Usaha untuk mengentaskan kemiskinan bukan lagi hanya merupakan proyek pemerintah saja, tapi juga proyek badan-badan internasional. Dikutip dalam Arief Budiman, “pengaturan kembali Kerjasama Internasional: Menuju ke Sosialisme”, kata pengantar buku Martin Khor Kok Peng, *Hubungan Utara-Selatan: Konflik atau Kerjasama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 993), hlm. xi –xiii.

<sup>3</sup> Tindakan AS yang membantu secara besar-besaran terhadap pemulihan perekonomian Eropa Barat ini dapat dipahami mengingat negara-negara Eropa Barat adalah sekutunya dan sangat rawan apabila disusupi oleh pengaruh sosialisme Soviet di Eropa Timur. Lihat Mohtar Mas’oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Harvard University. Wacana ini tidak hanya diperbincangkan oleh kalangan ahli ekonomi saja, melainkan juga di kalangan ilmuwan sosial, seperti antropologi, sosiologi, dan ilmu politik. Mereka inilah yang kemudian menggelar banyak proyek penelitian mengenai kemiskinan, kelaparan, pengangguran dan keterbelakangan di NDK sehingga banyak menghasilkan pengetahuan tentang kondisi ekonomi NDK. Sejak itu, fenomena NDK menjadi sorotan utama di pentas internasional.<sup>4</sup>

Hasil penelitian kelompok ilmuwan sosial yang dipaparkan secara sistematis ini mendapat apresiasi positif dari pemerintah AS dan kelompok bisnis. Mereka tertarik dengan gagasan itu dan menyediakan dana cukup besar untuk mendukungnya. Kolaborasi antara ilmuwan modernisasionis dengan pemerintah AS menghasilkan pembentukan komite khusus dalam "*The Social Science Research Council*" yang berfungsi sebagai penyalur sumber dana bagi penelitian mengenai kegiatan para ilmuwan itu melalui sokongan mereka terhadap beberapa yayasan filantropi, seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan Fulbright Foundation.<sup>5</sup>

Para pendukung proyek modernisasi sosial-ekonomi itu berharap bahwa hasil penelitian bisa dipakai untuk membantu NDK mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Membiarkan kemiskinan merebak di wilayah NDK dianggap berbahaya karena akan mengundang masuknya pengaruh komunis yang dimotori oleh US. Semboyannya waktu itu adalah memerangi si merah

---

<sup>4</sup> Gagasan mengenai pembangunan dilontarkan sekitar tanggal 20 Januari 1949, ketika Presiden Harry S. Truman untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan AS mengenai istilah keterbelakangan (*underdevelopment*).

<sup>5</sup> Lihat Mohtar Mas'ood, "Resep itu Bernama Washington Consensus", kata pengantar buku Andrinof A. Chaniago, *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. xxii.

(komunis) melalui penghijauan (yaitu pembangunan pedesaan).<sup>6</sup> Inilah akar ideologis dari program *community development* yang digalakkan oleh kaum modernisasionis dan developmentalisme.

Ada keyakinan umum di kalangan masyarakat Barat bahwa untuk mengatasi keterbelakangan (*underdevelopment*) yang dapat mengarah pada masuknya sosialisme US, *community development* dan pembangunan ekonomi adalah suatu keharusan.<sup>7</sup> Untuk menyebarkan gagasan pembangunan ke NDK, pada tahun 1950-an dan 1960-an para ahli ilmu sosial bergabung dalam *Center for International Studies* di MIT untuk membantu menyelenggarakan lokakarya yang berhasil menciptakan diskursus resmi dan akademis tentang pembangunan.<sup>8</sup>

Mereka beranggapan bahwa proses *community development* yang digalakkan di NDK seharusnya melibatkan tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat di tingkat lokal atau akar rumput serta lembaga-lembaga masyarakatnya. Dalam perkembangannya, lembaga yang disebut terakhir inilah yang dikenal saat ini dengan lembaga swadaya masyarakat (selanjutnya disebut LSM).<sup>9</sup> LSM dirancang sebagai agen-agen *community development* dengan harapan mendukung proyek-proyek developmentalisme.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Modernisasi sosial-ekonomi dan diskursus mengenai pembangunan secara resmi diluncurkan pertama kali dalam kaitannya dengan konteks perang dingin. Maksud dari kebijakan ini adalah dalam rangka membendung pengaruh komunisme dan sosialisme di NDK.

<sup>7</sup> Keyakinan umum Barat ini juga didukung oleh kecenderungan NDK untuk meniru dan menjadikan NIM sebagai model pembangunan (*demonstration effect*), yang seringkali dicapai dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari berbagai paradigma (*fusion effect*), dan ingin mencapai prestasi – yang oleh NIM dicapai berabad-abad - hanya dalam beberapa dasawarsa (*compression effect*). Lihat Moeljarto Tjokowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 8.

<sup>8</sup> lihat I. Gendzier, *Managing Political Change: Social scientists and the Third World*, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1985), hlm. 69 – 74.

<sup>9</sup> Istilah LSM berawal dari istilah ORNOP (Organisasi non pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari NGO (Non Governmental Organization). ORNOP berubah menjadi LSM pada tahun 1980-an atas inisiatif Bina Desa, Walhi, dan YTKI. Lihat Bonie setiawan, *Organisasi non Pemerintah dan Masyarakat Sipil, Prisma*, Juli 1996.

Cerita selanjutnya adalah terjadinya perkembangan luar biasa dalam jumlah LSM yang melakukan kegiatan di NDK. Misalnya saja, pada tahun 1981 Development Cooperation Review (OECD) telah memperkirakan sebanyak 8.000 LSM yang terlibat dalam kerja pembebasan dan pembangunan diseluruh dunia. Lembaga-lembaga itu menyumbangkan lebih dari 3,3 milyar dolar AS per tahun untuk mendukung program-program mereka. Sepertiga dari dukungan itu berasal dari sumber-sumber swadaya. Jumlah ini hampir mendekati 10 persen dari seluruh dana bantuan pembangunan secara global.<sup>10</sup>

Pada tahun 1985 saja, kehidupan lebih dari satu juta petani di benua Amerika Latin, Afrika, dan Asia secara langsung dipengaruhi oleh kegiatan lembaga-lembaga itu. Saat ini jumlah dan kegiatan LSM tersebut telah meningkat, bahkan menjadi dua kali lipat.<sup>11</sup> Perkembangan pesat jumlah LSM yang ada di NDK ini tidak terlepas dari kontribusi lembaga-lembaga dana yang berasal dari Barat demi proyek-proyek developmentalisme.

## **B. NGO di Indonesia**

Di Indonesia, LSM dianggap sebagai salah satu bentuk organisasi gerakan sosial yang secara umum dikenal dengan istilah "Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat" (LPSM).<sup>12</sup> Sejak

---

<sup>10</sup> Lihat OECD, *Komite Bantuan Pembangunan, Development Cooperation Report*, (Paris: OECD, 1986), hlm. 21.

<sup>11</sup> Kini terdapat lebih kurang 4.000 organisasi non Pemerintah yang bergerak di sektor pembangunan dalam anggota OECD saja (OECD 1986), yang menelan nilai bantuan sebesar 3 milyar dolar AS setiap tahun. Mereka melakukan kegiatan bersama dengan sekitar 10.000 hingga 20.000 NGO "selatan" yang membantu sekitar 100 juta rakyat. Lihat M. Edwards dan D. Hume, *Making a Different: NGOs and Development in Changing World*, (London: Earthscan Publication, 1993), hlm. 13

<sup>12</sup> Asal usul gerakan sosial di Indonesia dapat ditelusuri dari abad ke-19. yaitu ketika rakyat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Selama itu, periode gerakan sosial diwarnai oleh tiga aspek karakteristik: (1) Radikalisme pedesaan yang terlihat dari kebangkitan petani di Jawa dan Sumatra; (2) Militansi buruh dimana pekerja pabrik pedesaan dan perkotaan

tahun 1970-an, pesatnya perkembangan LSM sangat mengesankan jika ditinjau dari segi jumlah, keragaman, serta letak geografisnya. Jika di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an hanya ada sedikit sekali gerakan sosial dan kelompok non pemerintah yang secara aktif memiliki kepedulian dan kemampuan untuk menangani masalah-masalah pembangunan, kini keadaan tersebut telah jauh berubah.<sup>13</sup>

Para aktivis LSM di tahun 1970-an tersebut kebanyakan bekerja dengan menganut kerangka kerja developmentalisme. Tak satu pun LSM yang benar-benar menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan. LSM malah berupaya mendorong masyarakat untuk menyukseskan pembangunan dengan perannya sebagai konsultan pembangunan.

Berdasarkan bidang ataupun masalah-masalah yang menjadi kepedulian dan yang ditanganinya, telah terjadi peningkatan yang luar biasa. Jika dulu hanya memusatkan perhatian pada kebutuhan praktis dan pengembangan kelompok usaha bersama, sekarang masalah yang ditanganinya merentang luas mulai dari masalah lingkungan dan perlindungan hutan hujan (rain forest), masalah hak asasi manusia dan penindasan, gender, budaya lokal, eksploitasi buruh dan hak-haknya, serta masalah-masalah lainnya yang tidak muncul di tahun 1970-an.<sup>14</sup>

Jika dalam masa 1970-an, kegiatan LSM lebih difokuskan pada bagaimana kerja dengan rakyat ditingkat akar rumput dengan

---

terutama industri kereta api dan gula mengorganisasi diri dan mogok kerja menuntut kondisi kerja yang lebih baik; (3) Semangat gerakan kaum muda dimana kaum muda berpendidikan Barat di kota-kota besar membentuk kelompok-kelompok diskusi dan menyuarakan nasionalisme Indonesia. Lihat Bob S. Hadiwinata, Masyarakat Sipil: Sejarah, Kelangsungan dan Transformasi Sosial, dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 1, 1999, hlm. 8

<sup>13</sup> Dalam waktu kurang lebih tiga dasawarsa, terdapat lebih dari 3.000 kelompok LSM di kota-kota besar di Jawa, melainkan telah meluas di pelbagai daerah terpencil sampai di kawasan yang tidak mudah dijangkau. Lihat R. Betts et. Al., *A Strategic Assessment of NGOs Development in Indonesia*, (Boulder: Westview Press, 1987).

<sup>14</sup> *ibid.*

melakukan kerja pengembangan masyarakat (*community development*), maka dalam tahun 1980-an bentuk perjuangannya menjadi lebih beragam dari perjuangan lokal hingga jenis advokasi baik tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah aktivis LSM bahkan mulai mengkhususkan diri melakukan advokasi politik untuk perubahan kebijakan yang dalam banyak manifestasinya dilakukan dengan membuat pelbagai macam statement politik, petisi, lobi, protes, dan demonstrasi.<sup>15</sup>

### C. Relasi NGO dan Orde Baru

Secara umum pada masa awal rezim Orde Baru, LSM pada kenyataannya menjadi bagian dari kekuatan hegemoni negara dan agen dari kekuatan hegemoni negara serta agen dari ideologi developmentalisme, modernisasi, dan kapitalisme. Hal ini dapat dibuktikan dari empat indikator utama:<sup>16</sup>

Pertama, bahwa ternyata mayoritas aktivitas dalam gerakan LSM, secara teoritik dan ideologis, pada dasarnya pendukung developmentalisme. Sebagian besar aktivis LSM menerima konsep pembangunan apa adanya tanpa mempertanyakan secara kritis dan tak terelakkan memahaminya secara netral.

Kedua, bahwa pada akhir tahun 1970-an, jelas dinyatakan oleh para pemimpin aktivis LSM bahwa keberadaan mereka adalah sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Diyakini bahwa LSM menyumbangkan pendekatan alternatif terhadap pembangunan berkenaan dengan metodologi dan teknik implementasi. Oleh karena itu, mengidentifikasi dirinya sebagai LSM dari pada

---

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> Empat indikator utama LSM di masa Orde baru ini diambil dari Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 165 – 181.

ORNOP, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak anti pemerintah atau tidak bermaksud meruntuhkan ideologi developmentalisme.

Ketiga, bahwa peran LSM ternyata lebih menunjukkan kecenderungan sebagai konsultan pembangunan ketimbang sebagai bagian dari gerakan rakyat. Meskipun sebagian besar aktivis menyadari bahwa gerakan LSM merupakan gerakan masyarakat sipil dan oleh karenanya merupakan gerakan rakyat atau gerakan yang berbasis pada rakyat, ada banyak masalah yang menjadikan gerakan LSM teralienasi dari rakyat.

Keempat, adanya hegemoni dari lembaga dana. Lembaga-lembaga dana memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan membentuk agenda kerja sama LSM. Banyak agenda lokal pada dasarnya ditentukan oleh lembaga dana internasional. Hubungan kekuasaan itu menyulitkan gerakan LSM untuk mengembangkan ideologi, visi, dan agendanya sendiri.<sup>17</sup> Lembaga-lembaga dana internasional, baik lembaga dana yang berkaitan dengan negara seperti CIDA dari Kanada, USAID dari AS, dan GTZ dari Jerman, maupun lembaga dana non pemerintah seperti CRS, USC Kanada, CUSO, CARE, Save The Children, FADO, HIVOS, NOVIB, dan OXFAM yang memainkan peranan sangat besar dalam membentuk visi, ideologi, dan program LSM. Banyak agenda LSM lokal pada dasarnya ditentukan oleh lembaga dana internasional.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pada sisi yang lain, LSM di masa Orde Baru mengalami bias gender, bias negara, bias saintis, bias modernis, dan bias pendeta atau kyai. Ibid. Dan untuk kritiknya lihat Dadang Yuliantara, "LSM, Masyarakat Sipil, dan Transformasi sosial", dalam *jurnal Wacana*, Vol. 1, No. 1999, hlm. 38.

<sup>18</sup> Hubungan yang timpang antara lembaga dana internasional dan mitra lokalnya ini menjadi lebih rumit karena adanya kenyataan bahwa banyak lembaga dana menekankan perlunya struktur birokrasi baru, yaitu menjadikan LSM besar sebagai perantara. Konsekuensinya, LSM kecil dipaksa mengadopsi isu dan agenda yang telah ditetapkan oleh LSM besar nasional, yang dirancang oleh lembaga dana sebelumnya. Salah satu contoh adalah YAPIKA (Yayasan Indonesia Kanada) yang dibentuk oleh CIDA Kanada dan LSM besar Indonesia untuk menjembatani hubungan lembaga dana Kanada dengan LSM kecil Indonesia. Lihat Mansour fakih, *Op cit.*, hlm. 171 dan 181.

Peran LSM yang dipandang hanya merupakan pendukung proyek-proyek modernisasi, developmentalisme dan kapitalisme yang disodorkan oleh lembaga-lembaga dana internasional ini didukung oleh mileu politik domestik Indonesia pada masa rezim militer Orde Baru yang memang memprioritaskan pembangunan ekonomi sebagai program utama.<sup>19</sup> Bahkan, pembangunan telah dijadikan ideologi dominan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.<sup>20</sup> Akhirnya, yang terjadi hanyalah kerjasama segitiga antara lembaga dana internasional, negara, dan LSM dalam mengeksploitasi rakyat ditingkat akar rumput. LSM berperan agar rakyat memahami proses pembangunan dan bukannya anti terhadap pembangunan.<sup>21</sup>

#### D. NGO Pasca Perang Dingin

Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan hancurnya ideologi sosialis-komunis US dan lahirnya AS sebagai kekuatan adidaya tunggal dunia juga telah mengubah tata politik global.<sup>22</sup> Pasca perang dingin diawal tahun 1990-an telah menjadi titik tolak munculnya isu-isu global baru yang secara intensif diperbincangkan dan mempengaruhi lembaga-lembaga dana internasional dalam melakukan hubungan dengan LSM di Indonesia. Isu-isu global yang baru muncul dan mendapat perhatian publik adalah isu-isu mengenai demokrasi, hak asasi

---

<sup>19</sup> Pemahaman lebih mendalam tentang hubungan LSM dengan pemerintah dapat dipahami dari John Clark, *NGO dan pembangunan Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

<sup>20</sup> Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, *Politik Pembangunan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

<sup>21</sup> Disadari atau tidak, LSM telah melakukan ideologisasi terhadap masyarakat akan pembangunan. Rakyat dilatih dan diberdayakan bukan untuk melawan pemerintah dan menentang kapitalisme, tapi rakyat di desain untuk memahami makna pembangunan ala Barat. Pendek kata, terjadi proses penjinakan terhadap rakyat oleh LSM. Padahal, LSM juga diperdayai oleh lembaga dana internasional. LSM dirancang oleh lembaga dana internasional untuk mengamankan aset kapital dari proyek-proyek kapitalisme global.

<sup>22</sup> Lihat S. L. Roy, *Diplomasi*, terjemahan Harwanto dan Mirsawati, ((Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

manusia, *good governance*, dan *corruption watch*. Isu-isu ini bukanlah suatu yang terpisah dari isu *community development* dan proyek *developmentalisme*, tapi merupakan suatu yang secara ideologis di desain untuk secara inheren mendukung program pembangunan di NDK.<sup>23</sup>

Semakin beragamnya isu-isu dan orientasi lembaga dana internasional membuat LSM di Indonesia melakukan proses-proses penyesuaian. Bahkan, banyak LSM yang lahir didanai oleh lembaga dana internasional sekedar hanya merespons isu-isu yang berkembang. Ini bisa dilihat dari pendirian Fordem, ICW, YLBHI, KontraS, dan masih banyak lagi lainnya yang sebenarnya latar belakang pendiriannya hanya mengikuti anjuran dari lembaga dana internasional.<sup>24</sup>

Di samping itu, dalam rangka memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan LSM-LSM lokal, khususnya yang berada di pedesaan di luar Jawa, lembaga dana internasional mengembangkan dan memperluas cabang-cabangnya di Jakarta melalui kantor-kantor perwakilan. Lembaga dana internasional juga kerap kali menyelenggarakan forum-forum formal yang mempertemukan LSM-LSM untuk diberi pengarahan dan pelatihan sehingga program kerja dan kegiatan LSM tidak melenceng dari apa yang diminta oleh lembaga dana Internasional. Proses evaluasi dan monitoring pun dilakukan untuk memantau perkembangan LSM yang didanainya.

Proses pendanaan LSM yang berasal dari lembaga dana internasional membuat aktivis LSM pada akhir tahun 1980-an dan

---

<sup>23</sup> Mansour fakih, *Op Cit*.

<sup>24</sup> Disamping itu, negara juga melakukan penjinakan terhadap LSM di Indonesia bisa dilihat dari dua langkah yang dilakukan pemerintah rezim Orde Baru. Pertama, membubarkan LSM-LSM yang dianggap mengancam stabilitas keamanan dan mengganggu jalannya pembangunan, khususnya LSM-LSM yang berbau komunisme orde lama. Kedua, membentuk LSM-LSM pro status quo, seperti HKTI, HNSI, KADIN, KOSGORO, KNPI, Pemuda Pancasila, dan lain-lain.

1990-an mengalami ambiguitas. Di satu sisi, LSM harus berperan sebagai lembaga transformasi sosial dan gerakan perubahan sosial dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil Society).<sup>25</sup> Di sisi lain, LSM harus menuruti visi, misi, dan ideologi dari lembaga dana internasional sebagai donaturnya sehingga LSM merasa tertekan dan terkesan di dikte. Singkatnya, pada masa rezim Orde Baru, Merupakan masa frustrasi bagi kalangan aktivis LSM karena berbagai usaha yang mereka lakukan seakan-akan mengalami jalan buntu.<sup>26</sup> Kalangan aktivis LSM merasa dibayang-bayangi oleh lembaga dana internasional.

---

<sup>25</sup> Contoh dari komitmen LSM terhadap demokrasi dan masyarakat sipil ini dapat dilihat dari peran LSM menasionalkan kasus kedung Ombo, insiden Santa Cruz, dan kerusuhan 27 Juli 1996. Dalam kasus-kasus itu, LSM dianggap sebagai aktor yang berada dibalik kasus tersebut. Gejala ini dimungkinkan mengingat kondisi mandulnya institusi demokrasi yang lain, seperti partai politik dan parlemen. LSM dianggap sebagai memiliki kehadiran yang signifikan. Lihat Arief Budiman, "Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi", Pengantar dalam INFID (peny.), *Pembangunan di Indonesia: Memandang dari sisi lain*, (Jakarta: YOI-INFID, 1993).

<sup>26</sup> Jalan buntu yang dimaksud adalah bahwa LSM merasa terbatas ruang geraknya karena selalu ditekan dan dibatasi oleh lembaga dana internasional. Ini bisa dilihat dari setiap kali LSM akan menerima kucuran dana. Proses pengucuran dana selalu diawali dengan proses penandatangan MoU dimana butir-butir MoU yang dipersyaratkan itu harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan LSM tersebut. Jika tidak, maka lembaga dana internasional akan menghentikan kucuran dana. Padahal, LSM sangat bergantung pada finansial lembaga dana internasional. Celakanya lagi, butir-butir MoU itu bertujuan agar LSM-LSM mengamankan kapital internasional yang dimiliki oleh negara Barat. Inilah makna dibalik internasionalisasi kapital yang menimbulkan paradoks.

## BAB XI

---

# HAKIKAT ANCAMAN DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL

### A. Pengantar

Pada era Perang Dingin, hakikat ancaman, baik ancaman nasional maupun internasional, lebih didasarkan pada ancaman yang bersifat militer dan berasal dari eksternal. Agresi militer antara satu negara ke negara lain yang didorong oleh perluasan ideologi sangat mewarnai politik global saat itu. Faktor ideologi dan penekanan pada konsep “*national security*” sangat menentukan bagi para pengambil keputusan, baik pada level nasional maupun global, dalam merumuskan hakikat ancaman.

Bagi Blok Barat, hakikat ancaman adalah negara-negara yang berideologikan sosialis-komunis dan yang menginduk pada

Uni Soviet dalam koalisi Blok Timur. Bagi Blok Timur, hakikat ancaman adalah negara-negara yang berideologikan liberalis-kapitalis dan yang mengekor pada Amerika Serikat dengan bendera Blok Barat. Penentuan kawan atau lawan dalam percaturan politik global lebih didasarkan pada ideologi apakah komunis atau liberalis. Isu global yang muncul saat itu adalah isu keamanan tradisional/konvensional berupa agresi militer yang dilakukan oleh aktor negara (*state actor*).

Namun demikian, berakhirnya Perang Dingin telah membawa konsekuensi pada perubahan hakikat ancaman atas keamanan internasional. Berbeda dengan periode Perang Dingin, dalam periode pasca Perang Dingin, ancaman keamanan internasional bersifat masalah-masalah non-militer dan bersumber dari masalah lokal dan global. Dalam dasawarsa kedua periode pasca Perang Dingin ini, konflik skala rendah, terorisme internasional, kejahatan transnasional, terganggunya keamanan ekonomi, kemiskinan, kelaparan, ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan kelangkaan sumber daya alam merupakan isu-isu yang akan berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional dan internasional. Isu global yang muncul saat ini isu keamanan non tradisional/non konvensional yang sebagian besar dilakukan oleh aktor non negara (*non state actors*).

Berdasarkan alur cerita di atas, tulisan ini sebenarnya ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut: *Apa yang dimaksud dengan Ancaman? Kerangka Konseptual-Teoritis apa yang dapat dipakai untuk memahami transformasi hakikat ancaman nasional, khususnya pasca Perang Dingin? Apa hakikat ancaman nasional yang harus mendapatkan prioritas bagi Pemerintah Indonesia saat ini? dan solusi apa yang dapat dilakukan untuk menangkal hakikat ancaman tersebut?* Semua pertanyaan di atas akan dicoba dijawab dalam uraian berikut ini.

## B. Tipologi Ancaman

Secara konvensional, fungsi utama militer adalah memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Misi dan doktrin keamanan nasional (*national security*) sangat menentukan posisi militer dan juga hubungan sipil-militer. Pijakan utama formulasi doktrin pertahanan dan keamanan sebagai perangkat lunak adalah "ancaman", yang secara umum bisa dirumuskan menjadi dua kategori, yaitu *sifat ancaman dan sumber ancaman*. Dua kategori ancaman ini melahirkan 4 tipologi ancaman seperti tergambar dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Tipologi Ancaman**

<b>Tipologi Ancaman</b>	<b>Militer</b>	<b>Non-Militer</b>
<b>Eksternal</b>	Tipe 1	Tipe 3
<b>Internal</b>	Tipe 2	Tipe 4

Sumber: Alfred Stephan, *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*, (Princeton: Princeton University Press, 1971) dan Barry Posner, *The Source of Military Doctrine*, (Ithaca: Cornell University Press, 1994) sebagaimana dikutip dalam Ari Sujito (ed), Ari Sujito dan Sutoro Eko (ed.), *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2002)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dikatakan bahwa sifat ancaman bisa dirumuskan menjadi ancaman militer dan non militer, sedangkan sumber ancaman dibagi menjadi ancaman internal dan eksternal. Tipe I adalah ancaman militer-eksternal yang mencakup agresi, invasi dan infiltrasi kekuatan militer bersenjata dari luar wilayah/teritorial suatu negara. Tipe 2 adalah militer-internal dalam bentuk pemberontakan separatis bersenjata atau gerakan disintegrasi bangsa yang menggunakan kekuatan senjata secara terorganisir dan terlatih (*well armed*). Tipe 3 adalah ancaman

non-militer-eksternal berupa *Transnational Organized Crime* (TOC) yang mencakup emigran gelap, *drugs trafficking*, terorisme, aktivitas kriminal bajak laut, *illegal fishing*, *human trafficking*, dan perusakan lingkungan. Tipe 4 adalah nonmiliter-internal seperti bencana alam, wabah penyakit, konflik sipil, pelanggaran HAM, diskriminasi gender, kemiskinan, kelaparan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan masalah lain yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan militer tetapi mempunyai kandungan perlindungan terhadap rakyat sebagai individu atau warga negara.<sup>1</sup>

Tipologi di atas secara normatif menuntut dengan tegas perbedaan pertahanan dan keamanan, dan sekaligus akan sangat mempengaruhi dimana peran militer. Di Indonesia, khususnya setelah reformasi, secara konvensional, ancaman pertahanan adalah tipe 1 dan tipe 2, yang kemudian menjadi wilayah yang dibebankan kepada militer (TNI). Sedangkan ancaman keamanan berkaitan dengan tipe 3 dan tipe 4 yang dibebankan kepada polisi dan elemen-elemen sipil lainnya.<sup>2</sup>

### C. Dari “National Security” Menjadi “Human Security”

Jika pada masa Perang Dingin, persepsi ancaman keamanan<sup>3</sup> nasional setiap negara diformulasikan secara parsial hanya sebagai ancaman militer berupa agresi teritorial yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam konteks perang ideologi antara blok Barat dan blok Timur sehingga

---

<sup>1</sup> Dirangkum dan diolah dari Ari Sujito dan Sutoro Eko (ed.), *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2002), hlm. 6-7.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ada lima dimensi konsep keamanan, yakni: (1) the origin of threats; (2) the nature of threats; (3) changing response; (4) changing responsibility of security; (5) core value of security. Dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita, “Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003, No. 1, hlm. 71 – 72.

mengancam keamanan nasional, maka pada masa Pasca Perang Dingin, ancaman militer mulai mengendur digantikan oleh ancaman non militer berupa kejahatan Transnational Organized Crime, pelanggaran HAM, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan degradasi lingkungan yang sebagian besar dilakukan oleh aktor non negara sehingga mengancam keamanan manusia.

Perubahan hakikat ancaman nasional setiap negara pasca Perang Dingin ini telah melahirkan sebuah konsep baru keamanan dalam literatur disiplin ilmu hubungan internasional, yakni konsep Human Security (keamanan manusia). Konsep human security lahir dan menguat pada masa pasca Perang Dingin sebagai pengganti konsep national security (keamanan nasional) yang eksis pada masa Perang Dingin. Konsep *human security* telah menjadi agenda baru keamanan internasional pasca Perang Dingin, yang kini tidak lagi berfokus pada isu-isu keamanan tradisional-konvensional berupa ancaman militer dari sebuah negara, tetapi pada isu-isu keamanan non tradisional-non konvensional yang datang dari para pelaku non negara. Tabel 2 berikut ini akan menguraikan secara lebih mendalam perbedaan antara paradigma National Security dan Human Security.

**Tabel 2**  
**Perbedaan Paradigma *National Security***  
**dan *Human Security***

<b>Unsur Perbedaan</b>	<b>National Security</b>	<b>Human Security</b>
Eksistensi	Masa Perang Dingin	Pasca Perang Dingin
Unit Analisis	State	Individu
Target	Wilayah, Teritorial	Hati, Pikiran, Jiwa
Basic Needs	Kebutuhan fisik dasar	Kebutuhan psikis dasar
Sifat	Fisik, Statis	Psikis, Dinamis

Wujud	Kongkret, Empiris, Riel	Abstrak, Laten, ideal
Jenis	Tradisional, Konvensional	Non tradisional, Non Konvensional
Dimensi	Militer	Ekonomi, kesehatan, Politik, Komunitas, Personal, Pangan, Lingkungan
Ancaman	Invasi & Agresi Militer yang dilakukan oleh aktor negara	Transnational Organized Crime, pelanggaran HAM, Kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, degradasi lingkungan yang dilakukan oleh aktor non negara
Solusi	Dihadapi dengan Kekuatan Bersenjata	Dihadapi dengan membangun <i>capacity building</i> dan demokrasi

Menurut Bary Buzan, konsep-konsep keamanan pada masa Perang Dingin tidak lagi memadai, karena umumnya konsep ini dibangun dalam pengertian yang statis dan militeristik. Oleh karena itu, konsepsi lama mengenai keamanan bisa mengakibatkan kesalahan dalam menilai ancaman dan melahirkan kebijakan yang tidak tepat dalam menghadapinya. Seusai Perang Dingin, konsep keamanan berkembang dan paling tidak memiliki lima dimensi yang saling terkait dan tidak terisolasi satu sama lain, yaitu: militer, politik, ekonomi, societal, dan lingkungan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pemahaman mendalam tentang pergeseran paradigma keamanan pasca Perang Dingin ini dapat dibaca pada Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*, (Cornwall: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 19 – 20.

Lebih lanjut Buzan mengatakan bahwa dalam mencapai keamanan, negara dan masyarakat tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis dan setara. Kerap kali, kedua belah pihak ini berada dalam posisi yang berlawanan. Kebutuhan untuk menciptakan dan memelihara keamanan negara seringkali mengorbankan hak-hak individu warga negara, sebagaimana umumnya terjadi di negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi Komunis selama periode Perang Dingin.<sup>5</sup> Dengan kata lain, aman bagi negara belum tentu aman bagi warga negara yang berada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena seringkali negara, yang mengatasnamakan keamanan nasional, keutuhan teritorial, dan stabilitas politik-keamanan, melakukan tindakan represif terhadap warga negaranya sehingga menciptakan *feel of human insecurity*.

Walaupun masih terus diperdebatkan hingga kini, konsep human security bisa memberikan bingkai pemahaman terhadap perubahan hakikat ancaman nasional pasca Perang Dingin. Konsep Human Security diperkenalkan secara resmi untuk pertama kalinya oleh UNDP dalam laporan tahunannya yang berjudul "Human Development Report 1994". Laporan tersebut menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

*"Sudah terlalu lama konsepsi keamanan dibentuk oleh potensi konflik antar negara. Sudah terlalu lama keamanan dikaitkan dengan ancaman terhadap batas wilayah sebuah negara. Sudah terlalu lama bangsa-bangsa mencari senjata untuk melindungi keamanannya".*

Berdasarkan pernyataan tersebut, UNDP mengajukan sebuah rumusan baru untuk keamanan yang diawali dengan pemahaman bahwa keamanan berarti:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dikutip dari Philip Jusario Vermonte, "Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya", *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No. 1, hlm. 47.

<sup>7</sup> *Ibid.*

*“Keamanan dari ancaman terus-menerus dari rasa lapar, penyakit, kejahatan, dan penindasan... perlindungan terhadap gangguan yang membahayakan atas kehidupan sehari-hari-baik di rumah, tempat kerja, masyarakat atau lingkungan”.*

Menurut UNDP, definisi konsep *human security* mengandung dua aspek penting. Pertama, *human security* merupakan “keamanan (manusia) dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Kedua. *Human security* juga mengandung makna adanya “perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang –baik di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan”.<sup>8</sup>

Selanjutnya, UNDP mengidentifikasi tujuh komponen *human security*, yaitu: *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security dan political security*. Konsep dasar *human security* menekankan pentingnya empat karakter esensial, yakni bahwa konsep *human security* haruslah: Universal, independen, terjamin melalui pencegahan dini, dan berbasis pada penduduk (*people centered*).<sup>9</sup>

Hal yang menarik dari konsep yang diajukan oleh UNDP ini adalah karena konsep *human security* berangkat dari konsep hak asasi manusia yang menjadi landasan pendirian Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dihasilkan dari Konferensi San Francisco pada bulan Juni 1945. ketika itu, dirumuskan bahwa keamanan memiliki dua komponen penting, yakni *freedom from fear* dan *freedom from want*. Sejauh ini, konsepsi keamanan banyak didasarkan pada komponen pertama sehingga menghasilkan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Landry Haryo Subianto, “Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek”, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.1, hlm. 106

konsepsi national security dan kurang mengabaikan komponen kedua sehingga menghambat lahirnya konsepsi human security.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paradigma human security hadir untuk menegaskan bahwa terciptanya kondisi national security suatu negara belum tentu menjamin perasaan aman bagi individu-individu yang ada di dalamnya. Suatu negara akan dapat dikatakan memiliki keamanan nasional yang tangguh apabila keamanan individu-manusia yang ada di dalamnya merasa terjaga secara utuh dan komprehensif.

#### **D. Ancaman Keamanan Manusia**

Setelah kita mengetahui hakikat ancaman, khususnya perubahan hakikat ancaman nasional pasca Perang Dingin, maka dalam konteks Indonesia, yang perlu diuraikan selanjutnya adalah hakikat ancaman nasional yang harus mendapatkan prioritas bagi Pemerintah Indonesia saat ini, khususnya dalam proses transisi menuju demokrasi yang terus berjalan sekarang ini.

Berdasarkan pada tipologi ancaman sebagaimana telah diuraikan di depan kemudian dikaitkan dengan perubahan hakikat ancaman pasca Perang Dingin, penulis memberanikan diri untuk menyatakan bahwa ancaman nasional yang harus mendapatkan prioritas penanganannya bagi Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

##### **1. Ancaman Non Militer- Eksternal**

Yang dimaksud dengan ancaman non-militer-eksternal adalah berupa *Transnational Organized Crime* (TOC) yang mencakup emigran gelap, *drugs trafficking*, aksi terorisme, *hijacking*, *illegal fishing*, *human trafficking*, illegal logging, dan perusakan lingkungan.

---

<sup>10</sup> *Op. Cit.*

## 2. Ancaman Non Militer-Internal

Yang dimaksud ancaman nonmiliter-internal adalah berupa bencana alam, wabah penyakit, konflik sipil/SARA, pelanggaran HAM, diskriminasi gender, kemiskinan, kelaparan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan masalah lain yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan militer tetapi mempunyai kandungan perlindungan terhadap rakyat sebagai individu atau warga negara.

Baik ancaman non militer-eksternal maupun non militer-internal merupakan ancaman yang berfokus bukan pada keamanan manusia, bukan keamanan nasional yang ingin merebut dan menduduki suatu wilayah tertentu dari sebuah negara. Ambil contoh aksi terorisme misalnya, sasarannya adalah manusia dengan medium peledakan bom. Kelompok teroris tidak bertujuan menguasai wilayah tertentu. Hal ini berbeda dengan agresi militer suatu negara yang bertujuan merebut dan menduduki wilayah dari negara yang didudukinya tersebut.<sup>11</sup>

Prioritas penanganan pada ancaman yang bersifat non militer baik internal maupun eksternal ini bukan berarti mengabaikan sama sekali ancaman yang bersifat militer-eksternal dan militer internal. ancaman militer tradisional-konvensional dari luar bukan berarti tidak ada. Ancaman militer dari luar tetap ada. Hal ini diindikasikan dengan era ancaman perang nuklir yang tidak disertai dengan penghapusan senjata nuklir, konflik perbatasan antar negara, dan serangan negara adikuasa terhadap negara kecil atas nama "*humanitarian intervention*".<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tentang terorisme dan kaitannya dengan konsep human security, baca Poltak Partogi Nainggolan, "Terorisme dan Perspektif Keamanan Pasca Perang Dingin, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.1, hlm. 69 – 89.

<sup>12</sup> Majalah Tempo, 27 September 2004, hlm. 57.

Namun demikian, ancaman agresi militer asing yang bersifat teritorial sudah sangat minimal dan *out of question*. Ancaman agresi teritorial kurang diprioritaskan karena menunjuk pada perkembangan berikut ini: (1) tumbuhnya norma universal yang makin kuat melandasi hukum internasional untuk menentang agresi militer yang termanifestasikan dalam Piagam PBB; (2) anggapan umum bahwa kekuatan militer semakin tidak efektif dalam menyejahterakan dan membesarkan negara dan bangsa, dan bahkan malah *counterproductive*; (3) keterkaitan dan ketergantungan antar negara; (4) gelombang demokrasi dan hak asasi manusia diseluruh dunia.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan gerakan separatisme bersenjata atau gerakan disintegrasi bangsa, hendaknya kita mengubah pola pikir bahwa gerakan separatisme sudah selayaknya dianggap sebagai tantangan, dan bukan ancaman. Alasannya adalah bahwa munculnya separatisme diasumsikan sebagai kegagalan negara dalam membangun sistem ekonomi, sosial dan politik bangsa sehingga menimbulkan fenomena disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia ditantang untuk menyelesaikan gerakan separatisme sebagai akibat dari krisis ekonomi, sosial, dan politik. Penyelesaiannya pun tidak bisa hanya dengan menggunakan pendekatan keamanan, melainkan harus mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Memang, mengubah pola pikir semacam ini tidak mudah, khususnya dari kalangan yang masih berpegang teguh pada paradigma lama keamanan nasional yang tradisional.

Dalam pandangan TNI AD, berbagai ancaman nasional, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dan baik yang bersifat militer maupun non militer, seperti telah disebutkan di atas, merupakan bagian dari ancaman yang disebut dengan istilah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

“Perang Modern”. Istilah ancaman Perang Modern yang diperkenalkan pertama kali oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Ryamizard Riyacudu, ini kemudian disosialisasikan secara getol oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Dansesko), Mayjen. Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si.<sup>14</sup>

## E. Apa Solusi Penangkalnya?

Menurut George Mac lean, seorang akademisi dari Manitoba University, Kanada, pada intinya tugas pengelolaan keamanan suatu negara memiliki dua tujuan esensial, yakni: (1) memelihara keutuhan wilayah negara dan integritas nasional-*tujuan keamanan*; dan (2) memastikan tersedianya barang-barang publik yang terdistribusi dengan baik bagi warga negara-tujuan kesejahteraan.<sup>15</sup>

Dari pendapat Mac Lean tersebut kemudian dikaitkan dengan solusi dalam menangkal hakikat ancaman nasional bangsa Indonesia, maka yang perlu ditekankan saat ini adalah prioritas pada pendekatan kesejahteraan mengingat hakikat ancaman yang dihadapi adalah ancaman yang bersifat non tradisional alias berdimensi manusia, dan bukan pada pendekatan keamanan yang

---

<sup>14</sup> Menurut Komandan Seskoad ini, upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman Perang Modern, yang fokus serangannya pada eksistensi individu manusia dari rasa aman adalah dengan membentengi hati dan pikiran manusia melalui nilai-nilai spiritualitas. Nilai-nilai spiritualitas berfungsi sebagai filter yang akan menyaring dan membentengi diri dari berbagai penetrasi asing yang masuk melalui medium-medium IPOLEKSOSBUDHANKAM. Lihat Syarifudin Tippe, “Perang Modern”, makalah yang disampaikan dalam seminar ASPAC on ASET bertema *Meningkatkan Kompetensi SDM Sebagai Pendidik, Pelatih, Peneliti & Pengembangan Yang Dilandasi Oleh Art, Science, Engineering, and Technology*, yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung pada hari Kamis, 7 Oktober 2004 di Universitas Parahyangan Bandung.

<sup>15</sup> George Mac Lean, “The United Nations and the New Security Agenda”, dalam <http://www.unac.org/canada/security/maclean.html>.

memfokuskan ancaman militer tradisional alias berdimensi teritorial.

Langkah-langkah yang harus diambil bangsa Indonesia dalam menangkal ancaman nasional non tradisional yang mengancam eksistensi keamanan manusia adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat *State Building*, *Nation Building*, dan *Character Building*

*State Building* diperlukan untuk menciptakan supra struktur yang kuat sehingga lahir institusi-institusi demokratis yang kuat dalam menangkal setiap hakikat ancaman yang muncul. *Nation Building* dibutuhkan dalam rangka membangun *civil society organization* (CSO's) sehingga dapat dijadikan ujung tombak dalam proses pendidikan multikultural tentang arti penting dari universalitas konsep keamanan manusia. *Character Building* diarahkan untuk membentuk karakter pribadi manusia Indonesia sehingga mampu dijadikan filter dalam membentengi diri dari penetrasi asing yang tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan telah melebar ke non fisik.

2. Program *Capacity Building* untuk Demokrasi

Demokrasi yang di dalamnya terdapat norma-norma inti seperti kebebasan individu, supremasi hukum, persamaan hak, dan akuntabilitas harus diterapkan ke dalam struktur bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi dapat memperbesar peluang bagi perlindungan serta implementasi kebijakan keamanan yang mengutamakan keamanan manusia. Oleh karena itu, untuk menyebarkan dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di masyarakat Indonesia harus disertai dengan proses *capacity building* yang di dalamnya terdapat penguatan struktur dan institusi yang demokratis. Pada titik ini, kapasitas/ kapabilitas pemerintah dalam kaitannya dengan isu keamanan manusia menjadi sangat penting.

Kemampuan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menciptakan keamanan manusia adalah merumuskan *local policing*, *local governance*, kerjasama transnasional dan pendekatan legal, konstitusional serta yuridis.

## F. Catatan Penutup

Dari serangkaian pembahasan di atas, terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam memahami hakikat ancaman nasional, khususnya pergeseran dari konsep *national security* menjadi *human security*.

Pertama, tipologi ancaman nasional setiap negara sangat bervariasi, mulai dari ancaman militer-eksternal, militer-internal, sampai dengan ancaman non militer-eksternal, non militer-internal. Secara konseptual, keempat tipe ancaman nasional tersebut dapat disebut sebagai ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non tradisional.

Kedua, *human security* merupakan sebuah konsep yang dapat dijadikan kerangka analisis untuk memahami perubahan hakikat ancaman nasional yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin. Konsep *human security* telah menggeser konsep *national security* yang telah dianut oleh negara-negara di dunia selama masa Perang Dingin.

Ketiga, ancaman nasional yang harus mendapatkan prioritas penanganan bagi bangsa Indonesia adalah ancaman non militer-internal dan non militer-eksternal. Kedua ancaman ini secara langsung dapat membahayakan eksistensi keamanan manusia yang saat ini telah menjadi tren global.

Keempat, solusi untuk menangkal ancaman nasional bangsa Indonesia, khususnya ancaman keamanan manusia adalah dengan: (1) memperkuat *state building*, *nation building* dan *character building*; (2) program *capacity building* untuk demokrasi.

## BAB XII

---

### **“PERANG MODERN” DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Sejarah manusia adalah sejarah konflik dan perang, karena sejarah perang adalah setua sejarah umat manusia. Berbicara tentang perdamaian adalah berbicara tentang perang, dalam arti perdamaian adalah menunda perang, sinonim dengan istirahat sebelum manusia mulai berperang lagi. Oleh sebab itu, seolah-olah yang dianggap normal dalam kehidupan manusia adalah berperang.

Pernyataan di atas didukung oleh data yang berasal dari buku *Wars of the World* (1940) yang menampilkan data bahwa antara tahun 1496 SM sampai tahun 1861, suatu kurun waktu selama 3.500

tahun terdapat 227 tahun damai dan 3.130 tahun perang. Dengan kata lain, untuk setiap tahun damai ada 13 tahun perang.<sup>1</sup>

Sejak tahun 1861 sampai sekarang, dunia mengalami lagi ratusan dan bahkan ribuan perang dan bentuk-bentuk kekerasan bersenjata lainnya. Di antara yang terpenting adalah peperangan karena penjajahan Barat terhadap wilayah-wilayah koloninya, PD I, PD II, Perang Arab-Israel, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk, dan lain-lain.

Melihat realitas Hubungan Internasional di atas, dapat dikatakan bahwa Perang dan Damai adalah ibarat “dua sisi dari satu keping mata uang” yang sama. Keduanya adalah konsep yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hal ini diperkuat oleh adagium “*Civis Pacem Para Bellum*” (*Kalau ingin damai, maka siaplah untuk berperang*) dan “*Dalam kondisi perang, militerlah yang berperang. Dalam kondisi damai, Diplomatlah yang berperang*”. Meskipun adagium ini tidak sepenuhnya benar dan masih bisa diperdebatkan, namun adagium tersebut sebenarnya cukup menggambarkan keterkaitan antara Perang dan Damai.

Sampai di sini sebenarnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis, seperti apakah manusia memang suka berperang? Apakah manusia tidak suka dengan perdamaian? Apakah manusia hanya mengejar kekuasaan? Apakah manusia tidak suka dengan ketentraman? Apakah manusia hanya mengejar hal-hal yang bersifat materi-duniawi? Apakah manusia tidak suka dengan hal-hal yang bersifat non materi-akhirati?

Namun demikian, dihadapkan pada jaman modern seperti sekarang ini, pemahaman terhadap perang lebih bersifat *soft*, non fisik dan latent. Hal ini disebabkan oleh adanya perang-perang yang terjadi

---

<sup>1</sup> Ninok Leksono (ed.), *Perang, Militerisme dan Tantangan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 13.

di dunia ini, yang bukan perang dalam artian fisik atau yang bersifat *hard*, tapi lebih bersifat non fisik, seperti Perang Ekonomi, Perang Informasi, Perang Teknologi, Perang Ilmu/ Pemikiran, Perang Psikologi dan Perang Budaya (*Popular Culture versus Rest Culture*). Dalam konteks inilah, Penulis memberanikan diri untuk menamakan fenomena perang tersebut di atas dengan label atau sebutan "Perang Modern".

Apa sebenarnya "Perang Modern"? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan dijelaskan secara komprehensif tentang ancaman, logika munculnya, definisi, spektrum, tahapan, teori-teori pendukung dalam "Perang Modern", dampak "Perang Modern" terhadap menurunnya nasionalisme serta solusi untuk menangkalnya.

## A. Ancaman "Perang Modern"

Berakhirnya Perang Dingin telah membawa konsekuensi pada perubahan hakikat ancaman atas keamanan nasional. Berbeda dengan periode Perang Dingin, dalam periode pasca Perang Dingin, ancaman keamanan nasional lebih bersifat masalah-masalah non-militer dan bersumber dari masalah lokal dan global.<sup>2</sup> Dalam dasawarsa kedua periode pasca Perang Dingin ini, konflik skala rendah, terorisme internasional, kejahatan transnasional, terganggunya keamanan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kelangkaan sumber daya alam merupakan isu-isu yang akan berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional.

---

<sup>2</sup> Untuk lebih menyamakan persepsi tentang konsepsi "Ancaman", Alfred Stepan mengatakan bahwa ancaman dapat dirumuskan menjadi dua kategori, yaitu **sifat ancaman dan sumber/asal ancaman**. Sifat ancaman bisa dirumuskan menjadi ancaman militer dan non militer, sedangkan asal/sumber ancaman bisa dibagi menjadi ancaman internal dan eksternal. Lihat Alfred Stepan, *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*, (Princeton: Princeton University Press, 1971). Sedangkan untuk memperdalam tentang doktrin militer, baca Barry Posner, *The Source of Military Doctrine*, (Ithaca: Cornell University Press, 1984).

Perubahan hakikat ancaman di atas seharusnya mendorong Indonesia untuk merumuskan kembali persepsi ancaman yang akan dihadapi baik di masa kini maupun masa mendatang. Sejauh pengamatan, sampai saat ini, belum ada rumusan eksplisit dan empiris dalam konstitusi yang menggambarkan tentang ancaman keamanan nasional yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia belum memberikan penjelasan yang kongkret dan komprehensif berkaitan dengan persepsi ancaman. Padahal, penyamaan persepsi antar komponen bangsa tentang hakikat ancaman keamanan nasional merupakan hal yang sangat penting. Dari sini barulah bangsa ini dapat menyelaraskan langkah dan tindakan, membentuk sinergi, menciptakan daya tangkal yang handal dalam menghadapi hakikat ancaman nasional, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan literatur studi strategis dan pertahanan, tipologi ancaman sangat multidimensi, meliputi dimensi *security issues* maupun *non security issues*. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan tipologi ancaman melalui visualisasi tabel.

**Tabel XI.1**  
**Tipologi Ancaman Nasional**

<b>Tipologi Ancaman</b>	<b>Militer</b>	<b>Non-Militer</b>
<b>Eksternal</b>	<b>Tipe 1</b>	<b>Tipe 3</b>
<b>Internal</b>	<b>Tipe 2</b>	<b>Tipe 4</b>

Sumber: Alfred Stephan, *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*, (Princeton: Princeton University Press, 1971) dan Barry Posen, *The Source of Military Doctrine*, (Ithaca: Cornell University Press, 1994) sebagaimana dikutip dari Ari Sujito dan Sutoro Eko (ed.), *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2002), hlm. 6-7.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri jika dilihat secara mendalam memang belum memberikan gambaran yang cukup tentang hakekat ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rumusan hakekat ancaman yang bisa kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang.

Berdasarkan tabel XI.1 di atas dapat dikatakan bahwa pijakan utama dalam memformulasikan doktrin pertahanan dan keamanan negara adalah mengidentifikasi hakikat “ancaman”, yang secara umum bisa dirumuskan menjadi dua kategori, yaitu **sifat ancaman dan asal/ sumber ancaman**. Sifat ancaman bisa dirumuskan menjadi ancaman militer dan non militer, sedangkan asal/sumber ancaman dibagi menjadi ancaman internal dan eksternal. Tipe I adalah ancaman militer-eksternal yang mencakup agresi, invasi dan infiltrasi kekuatan militer bersenjata dari luar. Tipe 2 adalah militer-internal dalam bentuk pemberontakan separatis bersenjata yang menggunakan kekuatan senjata secara terorganisir dan terlatih (*well armed*). Tipe 3 adalah ancaman non militer-eksternal yang mencakup emigran gelap, penyelundupan narkoba, terorisme, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, *illegal logging*, dan perusakan lingkungan. Tipe 4 adalah nonmiliter-internal seperti bencana alam, wabah penyakit, konflik sipil, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan masalah lain yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan militer tetapi mempunyai kandungan perlindungan terhadap rakyat.<sup>4</sup>

“Perang Modern” yang saat ini telah membayang-bayangi dan bahkan menjebak bangsa Indonesia, merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai tipe ancaman, yang lebih menitikberatkan sifat non fisik (non militer) dengan sasaran utamanya adalah hati, jiwa dan pikiran manusia.

## **B. Logika Munculnya “Perang Modern”**

Tujuan utama dari serangkaian perang dalam peradaban manusia adalah kepentingan negara kuat untuk menguasai negara

---

<sup>4</sup> Ari Sujito dan Sutoro Eko (ed.), *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2002), hlm. 6-7.

yang lemah, yang dilatarbelakangi oleh kepentingan penguasaan serta eksploitasi sumber daya, baik alam maupun manusianya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan berbagai cara, sarana, alat, yakni cara-cara fisik maupun cara-cara non fisik.

Perang dengan menggunakan cara-cara fisik adalah perang yang terjadi pada era sebelum Perang Dingin. Sebagai contoh perang fisik adalah perang yang terjadi sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rosyidin, Eropa Abad Pertengahan (Abad kegelapan), Perang Agama 30 Tahun (1618-1648), Perang Napoleon, sampai dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Kolonialisme antara negara-negara Kolonialis (Amerika Serikat dan Eropa) dengan negara-negara Dunia Ketiga (Asia, Afrika, Amerika Latin) pada awal abad 20.

Karakteristik perang yang terjadi sebelum Perang Dingin adalah penggunaan militer sebagai instrumen perang untuk penguasaan wilayah secara fisik, yakni datang secara langsung ke daerah tujuan untuk menaklukkan, menduduki dan kemudian mengeksploitasi manusia dan alam yang ada di dalamnya. Praktik perang semacam itu dinamakan dengan “kolonialisme”.<sup>5</sup>

Disahkannya Piagam PBB tahun 1945 yang menyatakan bahwa invasi dan agresi militer suatu negara terhadap negara lain merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional,<sup>6</sup> kemudian ditambah dengan doktrin “*peaceful co-existence*” atau hidup berdampingan secara damai, dijadikan patokan oleh masyarakat dunia untuk menghapuskan secara mutlak praktik kolonialisme/penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa

---

<sup>5</sup> Dikutip dari Kata Pengantar Arief Budiman dalam buku Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru: Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

<sup>6</sup> Ada dua syarat yang memperbolehkan suatu negara melakukan intervensi terhadap negara lain, yakni: (1) Apabila negaranya diserang sehingga harus membela diri; (2) mendapat mandat dari PBB. Dikutip dari Han J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa, Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990).

Barat dan Amerika Serikat terhadap Negara Sedang Berkembang (Asia, Afrika, Amerika Latin).

Sedangkan contoh-contoh perang dengan menggunakan cara-cara non fisik atau psikis adalah perang yang terjadi pada pasca Perang Dingin, seperti Perang Dagang antara AS-Jepang, Perang Pasar antara AS-Uni Eropa, Perang Informasi/Berita antara AS-Timur Tengah, Perang Teknologi antara AS-Uni Eropa dan Jepang, serta Perang Pemikiran/Mazhab Kapitalis versus Komunis versus Islam, Perang Budaya (*Pop Culture vs Rest Culture*) dan Perang Urat Syaraf (*Psy War*). Serangkaian perang seperti inilah yang sebenarnya disebut dengan “Perang Modern”.<sup>7</sup>

Munculnya “Perang Modern” dilatarbelakangi oleh adanya larangan-larangan oleh organisasi internasional dan hukum internasional pasca Perang Dunia II, yang melarang sebuah negara menjajah negara lain. Oleh karena itu, negara-negara kolonialis kemudian mencari cara atau metode lain untuk menguasai Negara-negara Sedang Berkembang, selain cara atau metode militer yang bersifat fisik. Lahirlah kemudian “Perang Modern” yang sebenarnya bentuk lain dari neo kolonialisme dan neo imperialisme.

Sebagai catatan, harus diketahui terlebih dahulu perbedaan pokok antara kolonialisme dengan imperialisme, berikut ini:

### 1. Kolonialisme

Kolonialisme adalah aliran pemikiran dimana negara yang lebih kuat secara fisik merebut dan menguasai daerah negara yang

---

<sup>7</sup> Akan tetapi setelah menyaksikan penyelenggaraan Perang Teluk ke II yang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap Irak, sesungguhnya merupakan cerminan dari penerahan fisik dan non fisik, namun dalam hal ini lebih dititikberatkan cara-cara non fisik, sekalipun perang inilah yang dibanggakan AS dan Koalisi sebagai tipikal perang modern dan kejayaan mereka, dalam arti kekuatan militer dikerahkan setelah Amerika Serikat, melalui perang informasi (opini) nya, berhasil meyakinkan dunia bahwa tindakan militer yang diambil adalah satu-satunya alternatif atau alternatif yang paling menguntungkan. Dikutip dari General Wesley K Clark, *Waging Modern War*, (New York: Princess Affairs, 2002).

lebih lemah. Kolonialisme mempunyai arti yang lebih sempit. Penguasaan wilayah taklukannya dilakukan dengan cara mengirimkan militer/ tentara.

## 2. Imperialisme

Imperialisme merupakan aliran pemikiran dimana sebuah negara berusaha menciptakan “kerajaan” dunia (*imperium*) dengan menguasai negara-negara lain. Ini bisa dicapai dengan hanya menaklukkan negara yang lemah dan memaksa negara tersebut, tanpa secara harfiah, menguasai daerah/tanah dari negara yang ditaklukkan.

Dengan demikian, kolonialisme merupakan salah satu bentuk imperialisme, sedangkan imperialisme tidak selalu berarti kolonialisme. Imperialisme bersifat lebih luas dibandingkan dengan kolonialisme. Dikaitkan dengan paham Neo Konservatisme (*Neo Cons*), maka tampilan Neo Konservatisme dapat dilihat dari pikiran dan implementasi konsep strategis Neo kolonialisme dan Imperialisme, maupun Kapitalisme dan Liberalisme di dunia saat ini.

Menyimak beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1997, maka suatu negara yang belum “*established*” umumnya memang mudah untuk dijadikan sasaran “Perang Modern”, karena hampir seluruh tatanannya belum mapan. Upaya yang dicanangkan dengan gegap gempita dan penuh harap, kini cenderung menjadi suatu masa transisi yang tak berkesudahan. Presiden berkali-kali diganti di tengah jalan, demikian juga Menteri. Peristiwa krisis seperti ini juga dialami bangsa lain, tetapi krisis komunitas kebangsaan kita yang mencakup krisis moral-spiritual jauh lebih parah. Krisis pun kemudian akhirnya diadaptasi menjadi banyolan politik dan sinisme akademik <sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Daood Joesoef, “Ini Indonesia Baru, Ini Baru Indonesia”, dalam Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (Penyunting), *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 2002).

Kondisi labilitas tersebut, bisa berasal dari semua motif terjadinya konflik yang dialami negara sasaran. Konflik kepentingan terutama konflik politik yang “*intens*” lebih memungkinkan terjadi pada negara-negara yang masih mencari bentuk. Konflik keyakinan beragama, juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan “Perang Modern”.

Kondisi ekonomi yang morat-marit, komitmen bangsa dan wawasan kebangsaan yang tidak solid, lebih memudahkan terjadinya infiltrasi atau subversi. Adanya strata tertentu dalam masyarakat yang sudah tidak mempercayai kepemimpinan nasional, sangat memudahkan negara “dalang” menyebar desas-desus, provokasi dan adu domba. Demikianlah strategi yang dipakai dalam “Perang Modern” yang dipastikan akan memasuki, mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, pertahanan, hukum dan lain-lain).

Perlu diakui, kerentanan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia, sehingga terjadi krisis komunitas kebangsaan, sebenarnya bisa ditilik dari beberapa hal berikut:

1. Pemaknaan tentang tanah air sebagai modal fisik ternyata sangat berbeda antar satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya di Indonesia, antara yang memanfaatkan tanah air sebagai “*to have more*”, dengan yang memanfaatkan tanah air sebagai “*to be more*”, pola hidup sebagian besar masyarakat bangsa yang masih berkisar sekedar “mencari makan” akan melahirkan cara pandang yang sempit terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya sehingga memungkinkan timbulnya frekuensi terjadinya bencana, konflik/ keributan, kelemahan dan kepicikan.
2. Pemaknaan tentang modal budaya, modal ruang, modal mental, modal politik, modal intelektual, nampaknya tidak cukup

dijadikan modal untuk menjadikan Indonesia yang bercitra konseptual, yaitu “Indonesia Baru” yang memiliki ketahanan di segala bidang, sepanjang belum dilandasi satu tingkatan moral-spiritual yang memadai.

Kerentanan suatu bangsa, misalnya situasi yang tidak solid, ketidaksabaran rakyat akan kehidupan yang dimimpikan, akan menjadi sasaran dari negara yang berkepentingan untuk melakukan serangkaian usaha berjangka panjang. Media infiltrasinya cukup banyak, baik melalui film, surat kabar, radio, agen-agen yang sudah direkrut, yang memiliki rasa nasionalisme yang semu maupun yang terang-terangan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa nasionalisme.

Kita percaya bahwa di dunia ini tidak ada negara yang benar-benar bebas dari perbedaan kepentingan di dalam negerinya. Namun perbedaan cara pandang tersebut, jangan diperburuk ke arah konflik yang merugikan, dan tidak menutup kemungkinan, konflik tersebut akan dimanfaatkan oleh negara lain sebagai sasaran antara. Jika kemudian situasi sudah berkembang ke kondisi yang diskenariokan yaitu kondisi dimana semua serba salah, tidak ada yang diyakini, tidak ada yang patut dipercaya, maka masyarakat bangsa akan merasa tidak tahu lagi apa dan mengapa mereka menjadi tidak nyaman dalam hidupnya. Kondisi carut marut, mulai dari subsistem, sistem sampai supra sistem, kemudian akan muncullah orang-orang yang berjuang untuk sesuatu yang seolah-olah patriotis, padahal sebenarnya siapa yang mereka bela, apa motifnya, negara mana yang diuntungkan, semua tidak jelas. Mereka berjuang atas nama rakyat, atas nama demokrasi, tetapi negara lain yang diuntungkan. Seharusnya mereka sadar, mereka berjuang untuk siapa? Siapa yang memetik keuntungan dari semua itu?

### C. Definisi “Perang Modern”

Untuk sampai pada rumusan definisi “Perang Modern” seperti yang dimaksud dalam buku ini, sebelumnya diuraikan mengenai apa definisi perang. Menurut *Encyclopedia Americana*,<sup>9</sup> perang diartikan dua macam, yakni (1) perang adalah penggunaan angkatan bersenjata melawan kekuasaan asing atau melawan golongan-golongan yang menentang dalam negara; (2) perang adalah satu pertentangan dengan menggunakan angkatan bersenjata yang dijalankan antara bangsa-bangsa, negara-negara, atau penguasa yang ada dalam bangsa atau negara yang sama.

Menurut Von Clausewitz<sup>10</sup>, perang adalah diplomasi dengan cara lain. Perang merupakan kelanjutan dari diplomasi. Kegagalan diplomasi akan mengantarkan pada kondisi perang. Dalam situasi damai, diplomatlah yang berperang dan dalam kondisi perang, tentaralah yang turun ke medan peperangan.

Menurut Quincy Wright<sup>11</sup>, perang adalah suatu kondisi yang sah yang membolehkan dua atau lebih golongan-golongan yang bertentangan melaksanakan pertentangannya dengan menggunakan angkatan bersenjata. Menurut Lindgren<sup>12</sup>, perang adalah pertempuran bersenjata yang berkelanjutan; melibatkan sebuah pemerintah di satu pihak dan di pihak lain melibatkan sebuah pemerintah lain atau sebuah kelompok terorganisasi; menyangkut usaha untuk menguasai sebuah pemerintahan atau merebut sebuah daerah yang dikuasai oleh sebuah negara.

---

<sup>9</sup> *The Encyclopaedia Americana*, International Edition, Vol. 9, (Danbury: Grolier Incorporated, 1995).

<sup>10</sup> Pendapat Von Clausewitz ini dikutip dari buku Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, (Ney Jersey: Prentice Hall, 1978).

<sup>11</sup> Quincy Wright, *The Study of International Relations*, (Bombay: 1960).

<sup>12</sup> Lindgreen, *International Wars and Conflict Politics*, (Stanford: Stanford University Press, 1979).

Definisi perang di atas masih bersifat sempit dan terbatas, yakni perang dipahami dan dijelaskan hanya dalam konteks perang fisik dan konvensional. Pemahaman perang secara luas, tidak terpaku pada perang fisik dan konvensional, tetapi lebih bersifat *soft* dan non fisik, akan diuraikan berikut ini:

Menurut Sun Tzu<sup>13</sup>, menjelaskan bahwa perang dianalogikan dengan berbisnis, dan militer dianalogikan dengan manajemen. Menurutnya, tentara yang berperang sebenarnya sama dengan pengusaha yang berbisnis. Keduanya memakai strategi dan taktik untuk mencapai kemenangan dan keuntungan. Karena itu, para pengusaha harus dibekali dengan strategi dan manajemen dalam menghadapi lawan.

Menurut Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan,<sup>14</sup> perang dapat dimaknai secara luas sebagai eksploitasi sumber daya ekonomi oleh suatu pihak terhadap pihak lain. Penguasaan dan monopoli ekonomi oleh negara-negara besar terhadap Negara Dunia Ketiga merupakan perang jenis ketiga. Bentuk perang jenis pertama adalah perang primitif dan perang jenis kedua adalah perang tradisional.

Sebelum menginjak ke definisi "Perang Modern", TNI AD memandang perlu untuk menjelaskan perbedaan antara "Perang Modern" dengan Perang Tradisional secara rinci sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Pendapat Sun Tzu ini dikutip dari Wee Chow Hou, Lee Khai Sheang dan Bambang Walujo Hidayat, *Sun Tzu: Perang dan Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992); Angelica Low, Penerapan The Art of War Sun Tzu dalam Strategi Politik, (Jakarta: Inovasi, 2003).

<sup>14</sup> Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: They Key Concepts*, (London dan New York: Rout ledge, 2002).

**Tabel XI.2**  
**Perbedaan "Perang Modern" dengan Perang Tradisional**

No	Aspek/Bidang	Perang Tradisional	"Perang Modern"
1	Istilah (Nomenklatur)	Perang Konvensional, Perang Fisik	Perang Non Konvensional (Titik Berat) dan Perang Konvensional
2	Sistem	Melalui proses deliberasi	Tidak Melalui Proses Deliberasi
3	Sarana/Alat	Senapan, meriam, kapal perang, peluru kendali, bom nuklir, intelijen, tentara.	Non-Konvensional: MNC's, NGO, Kantor Berita, Buku-Buku, Media Cetak dan Elektronik, Turisme, Wartawan Konvensional: Pasukan multinasional, taktik canggih, pameran kekuatan dan strategi 3 dimensi, operasi gabungan ( <i>US Vision 2010</i> )
4	Karakteristik	Konkret, Fisik, "Hard", Manifest, Tangible	Abstrak, Psikis, Soft, Latent, Intangible
5	Proses	Prosesnya Cepat	Prosesnya lamban tapi mematikan
6	Dampak yang ditimbulkan	Dampaknya Jangka Pendek menyangkut aspek militer	Dampaknya Jangka Panjang menyangkut semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

Sumber: Data diolah dari berbagai referensi.

Dari beberapa definisi perang secara luas dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perang mengalami perluasan arti dan makna. Perang tidak hanya identik dengan senjata dan kekerasan fisik saja, tetapi perang juga bisa dimaknai secara canggih yang dalam perkembangannya dinamakan dengan “Perang Modern” yang lebih menitikberatkan cara-cara non-fisik.<sup>15</sup> “Perang Modern” dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kontrol dari negara-negara kuat terhadap negara-negara yang dianggap tidak mau mengakomodasikan kepentingan nasionalnya kuat atau untuk mengontrol negara yang dapat membahayakan keamanan dan kepentingan nasional mereka.

Keberhasilan pihak agresor mengontrol dan menguasai atau menaklukkan negara-negara sasarannya dimaksudkan untuk memperbesar koalisinya, sehingga terwujud dunia yang unipolar (*unipolar world*) yang menganut sistem nilai, norma dan kepentingan universal berbasis kapitalisme dan liberalisme.

Dalam menerapkan konsep “Perang Modern”, negara-negara agresor akan menggunakan dan melibatkan *total instrument of national power*-nya untuk menghantam *total instrument of national power* dari negara-negara sasarannya. Dalam keadaan tertentu, “Perang Modern” bisa menggunakan alat peralatan berteknologi tinggi seperti teknologi komunikasi, komputer dan informasi yang kemudian berkonvergensi melahirkan kemampuan *cybernetic*.

Berdasarkan pada uraian di atas, “Perang Modern” dapat di definisikan sebagai: *Penguasaan sebuah negara atau lebih (Negara Dalang) terhadap negara lain (negara sasaran) melalui penetrasi dengan*

---

<sup>15</sup> Namun demikian, dalam perkembangannya pula, “Perang Modern” dapat juga dipahami dalam artian yang lebih bersifat fisik dimana pengerahan Angkatan Bersenjata dengan alutsista yang canggih seperti dirujuk oleh pemerintah AS, bahwa Perang Koalisi dengan Irak adalah bentuk perang modern yang berhasil dimenangkan koalisi. Artinya, metode Perang Modern biasanya pertama kali dilakukan dengan cara-cara non fisik, seperti embargo ekonomi, embargo senjata, dan embargo diplomatik untuk selanjutnya ketika negara sasaran sudah lemah tidak berdaya maka cara-cara fisik berupa agresi militer dilakukan oleh negara dalang.

menciptakan dan memanfaatkan kerawanan negara sasaran pada berbagai aspek kehidupan, dengan titik berat penggunaan cara-cara non fisik (inkonvensional) dan selanjutnya menggunakan cara fisik dengan mengerahkan kekuatan militer (invasi) bila opini menguntungkan Negara Dalang.

#### D. Spektrum "Perang Modern"

Spektrum "Perang Modern" sangat bervariasi yang mana di dalamnya terdapat isu-isu global yang dipakai sebagai salah satu alat untuk melancarkan "Perang Modern". Spektrum Perkembangan Perang dari Perang Tradisional menjadi "Perang Modern" diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel XI.3**  
**Spektrum "Perang Modern"**

Perang Tradisional	Panah, Pedang, Batu, Tombak	
Perang Modern	KONVENSIONAL C2 ( <i>Command &amp; Control</i> ) -----> Penggunaan Angkatan Bersenjata	
Perang Dingin	INKONVENSIONAL C2 ( <i>Command &amp; Control</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P. Ideologi</li> <li>➤ P. Politik</li> <li>➤ P. Ekonomi (Dagang)</li> </ul>
Post Modern War	INKONVENSIONAL ➤ C3I ( <i>Command, Control, Communications dan Intelligence</i> ) ➤ C4I2 ( <i>Command, Control, Communications, Computers, Intelligence &amp; Interoperability</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P. Informasi</li> <li>➤ P. Teknologi (Cybernetic)</li> <li>➤ P. Ilmu/Pemikiran</li> <li>➤ P. Psikologi</li> <li>➤ P. Budaya</li> <li>➤ P. Angk Bersenjata</li> <li>➤ Kombinasi perang di atas</li> </ul>

Post Modern War "Perang Modern" di Era Globalisasi	INKONVENSIIONAL (PENJAJAHAN BARU) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ISU GLOBAL</li> <li>➤ NGO, MEDIA MASSA</li> <li>➤ PEOPLE POWER</li> <li>➤ NUBIKA</li> <li>➤ BIO-TEK</li> <li>➤ C4I2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P. Ideologi</li> <li>➤ P. Politik</li> <li>➤ P. Ekonomi (Dagang)</li> <li>➤ P. Informasi</li> <li>➤ P. Teknologi (Cybernetic)</li> <li>➤ P. Ilmu/Pemikiran</li> <li>➤ P. Psikologi</li> <li>➤ P. Budaya</li> <li>➤ P. Ang. Bersenjata</li> <li>➤ Kombinasi perang di atas</li> </ul>
--	---	---

Sumber: Data diolah dari berbagai referensi.

### E. Tahapan "Perang Modern"

"Perang Modern" memiliki lima tahapan, yakni: Tahapan Paradigmatis, Tahapan Eksploitasi, Tahapan Menciptakan Sel-Sel Perlawanan di Negara Sasaran, Tahapan *Psy War*, dan Tahapan Invasi Militer. Di bawah ini diuraikan secara singkat kriteria dari masing-masing tahapan.

#### Tahap I Penjajahan Paradigmatis

Pada tahap ini Negara Dalang yang memiliki naluri sebagai penakluk melakukan infiltrasi, tekanan dan pemaksaan terhadap negara sasaran untuk menerapkan isu global sebagai sistem nilai, norma dan kepentingan universal yang tidak cocok dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki negara sasaran, demi kepentingan Negara Dalang tersebut.

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan perang informasi dengan tujuan membentuk opini internasional yang menyebutkan bahwa negara sasaran adalah negara yang

harus dikucilkan karena berbagai alasan yang sengaja dibuat, terutama yang berkaitan dengan isu kemanusiaan seperti terorisme internasional, hak azasi manusia dan penumpukan senjata penghancur massal. Pengaruh yang ditimbulkan akibat “Perang Modern” pada tahap penjajahan paradigmatis ini adalah terjadinya benturan sistem nilai, norma dan kepentingan universal yang berhadapan dengan kepentingan nasional, berupa; (1) Semakin maraknya berbagai bentuk rivalitas yang mengarah kepada ambisi akan kekuasaan tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih luas; (2) Memanfaatkan kebebasan pers untuk menjalankan kepentingan Negara Dalam; dan (3) Mengedepankan kebebasan individualistik yang berpeluang membenturkan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti persatuan dan musyawarah mufakat.

## **Tahap II Eksploitasi**

Pada tahap ini kegiatan intelijen dilakukan dengan menerapkan aksi penggalangan terhadap kelompok tertentu untuk mempersiapkan aksi-aksi yang dapat menimbulkan instabilitas nasional serta menghambat gerak maju pembangunan nasional. Bentuk kegiatan lainnya adalah melakukan intervensi ke dalam semua aspek kehidupan nasional negara sasaran, seperti kebijakan embargo ekonomi terhadap negara sasaran akibat ketergantungan kepada pihak asing. Penetrasi sosial budaya dan hukum dilakukan dengan memanfaatkan LSM dan agen-agen asing yang berkedok turis, wartawan dan lain-lain untuk menyuarakan dan memperjuangkan penerapan isu-isu global, seperti derasnya opini tentang pelanggaran HAM yang didengung-dengungkan dilakukan oleh TNI sehingga dibangun persepsi untuk diadili dalam Pengadilan Mahkamah Internasional.

Pengaruh yang ditimbulkan akibat “Perang Modern” pada tahap eksploitasi ini adalah terjadinya benturan sistem nilai, norma dan kepentingan universal yang berhadapan dengan kepentingan nasional. Iklim kebebasan menyebabkan tumbuhnya LSM seperti jamur di musim hujan tanpa ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci. Banyak LSM dibentuk dan diperalat oleh pihak asing dengan kemasam perlindungan kemanusiaan dan demokrasi. LSM yang dibentuk oleh pihak asing, diberi pemahaman yang salah tentang Demokrasi, padahal demokrasi hanya salah satu alat yang harus diformat untuk mencapai tujuan nasional. LSM yang dibentuk dan diperalat oleh pihak asing seperti itu patut diwaspadai, karena cenderung melakukan intervensi diberbagai bidang yang kontra produktif demi kepentingan Negara Dalang.

Penetrasi dan infiltrasi yang dilakukan oleh Negara Dalang tidak hanya memanfaatkan LSM, tetapi juga komponen-komponen bangsa dan masyarakat lainnya khususnya yang memiliki kecenderungan dan niat bermusuhan dengan sesama anak bangsa atau pemerintah. Misalnya melakukan upaya untuk melemahkan peran dan fungsi militer sebagai pengawal kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Wacana yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan Komando Teritorial (Koter) dibubarkan dan kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) ditiadakan merupakan salah satu contoh aktual upaya melemahkan TNI secara sistematis. Padahal di Amerika pun, justru membentuk semacam komando teritorial setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 untuk melindungi *way of life* bangsanya, yaitu *Department of Homeland Security*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Department of Homeland Security* dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang dikepalai oleh seorang Direktur yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga keamanan nasional di Amerika Serikat.

### **Tahap III Menciptakan Sel-Sel Perlawanan di Negara Sasaran**

Tahap ketiga ditujukan untuk mematangkan situasi dan kondisi yang telah diciptakan sebelumnya. Pada tahap ini, Negara Dalang merekayasa kondisi agar terbentuk sel-sel perlawanan di dalam negeri berupa pemberontakan atau gerakan-gerakan separatis dengan memanfaatkan kelompok-kelompok oposisi atau pihak yang tidak puas, sehingga timbul kekacauan dan ketidakstabilan di negara sasaran. Politik adu domba sangat mungkin dilakukan pada tahap ini dengan memanfaatkan situasi dan kondisi negara yang rawan, seperti pada penyelenggaraan Pemilihan Umum. Negara Dalang menggelar kegiatan provokasi berupa pembentukan opini internasional, propaganda dan mendukung gerakan perlawanan bersenjata di negara sasaran. Selanjutnya Negara Dalang melakukan kegiatan ofensif diplomatik dan politik, blokade dan embargo ekonomi, penetrasi sosial budaya dan hukum serta menciptakan teror untuk menimbulkan *chaos*, mempermudah penguasaan pengaruh diberbagai bidang, agar tercipta kondisi ketergantungan negara sasaran, mudah dikendalikan dan dieksploitasi sesuai kebutuhan Negara Dalang. Di Indonesia, tahap ketiga dari “Perang Modern” ini sudah digerakkan cukup lama, ditandai dengan maraknya pemberontakan dan munculnya gerakan separatis di daerah Aceh, Papua, Maluku Selatan dan bentrokan fisik antar sesama anak bangsa yang dilatarbelakangi oleh aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, suku dan etnis.

### **Tahap-IV Perang Urat Syaraf (*Psy War*)**

Pada tahap keempat diskenariokan untuk mengubah aspek kejiwaan dan sikap mental anak bangsa dengan tujuan menurunkan potensi kekuatan dan ketahanan nasional negara sasaran dalam segala aspek kehidupan. Berbagai kampanye dan propaganda dilakukan secara terus menerus oleh negara dalang dengan

memanfaatkan sel-sel perlawanan yang telah terbentuk di negara sasaran. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan cara *Psychopolitics* yaitu suatu kegiatan yang digunakan untuk mengubah dan menguasai pikiran dan keyakinan anak bangsa dari negara sasaran melalui "*Mental Healing*"<sup>17</sup>

*Psychopolitics* dapat mengubah dalam waktu singkat loyalitas seseorang, sekelompok orang terhadap sosok pemimpinnya, negara dan bangsanya. Kegiatan *psychopolitics* dapat mengubah loyalitas anak bangsa termasuk menguasai pimpinan atau tokoh penting dari suatu negara untuk jangka panjang.

Penggunaan "*psychotronic weapons*" dimaksudkan untuk menghancurkan kekuatan jiwa suatu masyarakat, dengan menggunakan gelombang radio frekuensi rendah untuk mengacaukan proses berpikir, stabilitas emosi, sehingga mengganggu cara pandang suatu masyarakat. Selain itu penggunaan kata-kata, istilah, sindiran, yang diharapkan mampu mempengaruhi dan membangkitkan reaksi emosi suatu masyarakat, sentimen negatif terhadap suatu pihak sehingga pada akhirnya akan melumpuhkan kekuatan pihak negara sasaran yang dituju (*Psycholinguistics*).

## Tahap V Invasi Militer

Tahap kelima adalah tahap yang dilakukan secara demonstratif sebagai klaim dominasinya terhadap negara sasaran dengan invasi militer secara terbuka. Tahap ini mungkin dilakukan dengan dua pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, tahap-tahap sebelumnya dianggap kurang efektif, kurang berhasil ditinjau dari penguasaan dan eksploitasi sumber daya negara sasaran. *Kedua*,

---

<sup>17</sup> Di dalam Arthur S Reber, *Dictionary of Psychology*, (Harmonsworth: The Penguin, 1985). *Mental Healing* adalah sama dengan *Faith Healing* yang didefinisikan sebagai pengobatan, Penyembuhan atau terapi yang dicapai melalui kepercayaan (*faith*) atau keyakinan (*beliefs*) terhadap kekuatan dari pihak penyembuh apakah terapis maupun terhadap prosedur terapi. Sekalipun biasanya istilah ini dilihat dalam penggunaan keagamaan

akibat invasi telah diperhitungkan lebih menguntungkan baik dari segi politik, ekonomi maupun militer Negara Dalang dalam jangka panjang. Invasi dilakukan agar dapat dengan bebas memaksakan kehendak untuk menganeksasi, meng-okupasi dan memproteksi negara sasaran sebagai koloninya. Tahap ini disertai perang informasi untuk membentuk opini masyarakat internasional sebagai upaya pembenaran terhadap apa yang dilakukannya. Melalui perang informasi mereka hadir di mata dunia sebagai penyelamat, sebagai pahlawan dan penegak HAM sejati, sebagai demokrat sejati dan sebagai pelindung dan penjaga lingkungan hidup yang paling peduli.

Tahap-tahap “Perang Modern” yang dilancarkan oleh Negara Dalang sangat fleksibel disesuaikan dengan aspek yang menjadi sasaran di wilayah, keluasan obyek sasaran, media yang digunakan maupun waktu yang diperlukan, yang dianggap paling efektif dan efisien.

Tidak menutup kemungkinan, agresi militer itu akan mendapatkan perlawanan dari negara sasaran secara gigih dan berlarut, sekalipun eksistensi negara sasaran menjadi terpecah-pecah dalam beberapa negara kecil atau dikuasai agresor, namun akan terus berupaya untuk mengembalikan integritas wilayah dan kedaulatan negaranya. Bangsa yang memiliki tradisi sebagai bangsa pejuang akan terus melakukan upaya untuk merebut kembali kemerdekaannya dengan cara melakukan perang berlarut.<sup>18</sup>

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, selalu terjadi interaksi antara kekuatan intervensi yang dilancarkan dari luar dengan kelemahan dan kerawanan yang ada di dalam negeri. Setiap kelemahan dan kerawanan yang ada dimanfaatkan secara maksimal oleh Negara Dalang antara lain bahaya laten komunis

---

<sup>18</sup> Ratyono, *Perang Modern: Sebuah Teori dan Kenyataan*, naskah yang sedang dipersiapkan menjadi buku, hal 124 – 25.

yang masih cukup kuat indikasinya, ekstrim kanan dan kelompok fundamental yang tidak tertutup kemungkinan akan “link up” dengan kekuatan-kekuatan ini.

Sesuai dengan tujuannya yaitu penguasaan sumber daya negara-negara yang menjadi sasaran “Perang Modern”, apabila Tahap-I, Tahap-II dan Tahap-III telah mampu melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari negara sasaran, maka kondisi tersebut akan dipertahankan selama dianggap lebih menguntungkan dalam arti memenuhi kepentingan nasional Negara Dalam baik kepentingan politik, ekonomi maupun militer dalam jangka panjang. Akan tetapi, bila sampai dengan tahap ini belum mencapai hasil yang dikehendaki, akan dilancarkan Tahap-IV (Perang Urat Syaraf) sebagai penyiapan kondisi untuk melancarkan Tahap-V (Invasi Militer). Berikut ini ditampilkan tahapan “Perang Modern” dalam visualisasi Tabel.

**Tabel XI.4**  
**Tahapan “Perang Modern”**

<b>Tahapan</b>	<b>Kegiatan</b>
I. Penjajahan paradigmatis	Infiltrasi
II. Eksploitasi	Penggalangan, pengkaderan
III. Menciptakan sel-sel perlawanan di negara sasaran.	Adu domba, timbulkan kerusuhan/instabilitas nasional
IV. Perang urat syaraf	Kampanye dan propaganda untuk menurunkan potensi kekuatan dan ketahanan nasional
V. Invasi militer	Operasi militer yang didukung perang informasi

Sumber: Data diolah dari berbagai referensi.

## F. Teori-teori Pendukung Sebagai Instrumen Analisis

### 1. Teori Ketergantungan/*Dependency Theory*<sup>19</sup>

Teori ketergantungan berasal dari Amerika Latin dimana tokoh-tokohnya, antara lain Andre Gunder Frank, Saamir Amin, Theotonio Dos Santos, F.H. Cardoso, dan Paul Baran. Kata kunci yang utama dalam teori ketergantungan adalah Penetrasi dan *Dominance-Dependence*. Asumsi intinya adalah bahwa munculnya penetrasi asing berupa penetrasi ekonomi, politik dan budaya, akan mendistorsi struktur politik-ekonomi suatu negara yang pada akhirnya akan menyebabkan negara tersebut akan mengalami kemiskinan dan ketergantungan. *Kasus*: Perekonomian Indonesia yang sangat tergantung pada negara-negara Barat, terutama AS, yang tergabung dalam IMF dan Bank Dunia.

### 2. Teori Hegemoni/*Hegemony Theory*.<sup>20</sup>

Muncul pertama kali di Italia dengan pelopor utamanya adalah Antonio Gramsci. Kata Kunci utama teori hegemoni ini adalah hegemoni dan hegemon. Asumsi intinya adalah adanya pola hegemoni suatu kelas terhadap kelas yang lain. Bentuk hegemoninya tidak bersifat represif-militeristik, melainkan bersifat ekonomi, seperti penguasaan alat-alat produksi. *Kasus*: Kalangan Buruh yang terhegemoni oleh para pemilik pabrik. Buruh tidak bisa berbuat apapun dalam melawan pemilik pabrik karena secara ekonomi di dirinya terhegemoni.

---

<sup>19</sup> Ronald H. Chilcote, *Theory of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Boulder and Colorado: West view Press, 1981), hlm. 271 – 315.

<sup>20</sup> Dikutip dari Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 19 -33; Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 31.

### 3. Teori Stabilitas Hegemonik/*Hegemony Stability Theory*<sup>21</sup>

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Kindle Berger dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Gilpin. Kata Kunci utama teori stabilitas hegemoni ini adalah hegemoni, stabilitas, dan rezim.<sup>22</sup> Asumsi intinya adalah bahwa sistem internasional dikuasai oleh sebuah rezim yang hegemoni dimana rezim hegemonik tersebut akan menentukan aturan-aturan demi terciptanya stabilitas dunia. Rezim hegemonik akan memberlakukan mekanisme “*reward and punishment*” terhadap anggota-anggota dalam rezim tersebut. Kasus: AS yang berperan sebagai rezim hegemonik menjatuhkan hukuman/*punishment*, berupa embargo (ekonomi, diplomatik, militer) kepada negara-negara yang dianggap mengancam stabilitas. AS juga akan memberikan hadiah/*reward*, berupa bantuan dana dan investasi kepada negara yang dianggap melang-gengkan dan mendukung rezim hegemonik.

### 4. Teori Struktural Imperialisme/*Imperialism Structure Theory*<sup>23</sup>

Teori struktural imperialisme dicetuskan pertama kali oleh Johan Galtung. Kata kunci utama teori ini adalah struktur, imperialisme, dan eksternal. Asumsi intinya adalah bahwa sistem internasional telah dirancang dan didesain oleh negara-negara imperial Barat agar menguntungkan mereka dan merugikan negara Dunia Ketiga. Rezim-rezim ekonomi-politik internasional dikondisikan sebagai alat bagi imperial Barat untuk menguasai negara-negara Dunia Ketiga. Kasus: Lembaga-lembaga Ekonomi Internasional, seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia telah dipakai

---

<sup>21</sup> Dikutip dari Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 190.

<sup>22</sup> Stabilitas hegemonik akan menciptakan sebuah rezim internasional yang sering dianalogikan dengan terbentuknya sebuah pemerintahan dunia di bawah panji-panji kapitalisme global dan demokrasi liberal dengan AS sebagai penguasanya.

<sup>23</sup> Johan Galtung, "Suatu Teori Struktural Imperialisme", dalam Amir Effendi Siregar (eds.), *Arus Pemikiran Ekonomi-Politik: Esai-esai Terpilih*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 136.

sebagai sarana bagi AS dan negara Eropa Barat untuk membuka pasar domestik negara-negara Dunia Ketiga dan memuluskan jalan Perusahaan Multinasional Barat dalam mengeksploitasi sumber alam di Negara Dunia Ketiga.

## 5. Teori Agresi Manusia/*Theory of Man Aggression*<sup>24</sup>

Pada dasarnya, dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, teori ini merupakan *domain* ilmu psikologi. Namun dalam perkembangannya dalam konteks studi hubungan Internasional, khususnya dalam melihat sebab-sebab terjadinya perang, setidaknya terdapat dua tokoh, Filsuf sosial Thomas Hobbes (1588-1679) dan Antropolog Anthony Storr, keduanya dari Inggris, mempelopori teori ini. Kata kunci teori ini adalah agresi, kekerasan, kekuasaan, dan kebutuhan hidup manusia. Asumsi dasarnya adalah bahwa penyebab utama terjadinya perang berangkat dari agresi manusia yang terefleksi dalam bentuk pengerahan kekuatan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 6. Konsep *National Security* dan *Human Security*

Keamanan nasional merupakan suatu konsep yang dirumuskan dalam rangka menghadapi ancaman agresi atau invasi militer dari negara lain yang ingin menguasai wilayah nasional suatu negara. Untuk menghadapi ancaman tradisional dan bersifat fisik ini, biasanya negara mempersenjatai diri dengan alat-alat perang yang canggih dan mengirim pasukannya ke wilayah-wilayah perbatasan untuk menghalau musuh agar supaya musuh tidak bisa masuk ke batas wilayah nasionalnya.<sup>25</sup> Namun demikian,

---

<sup>24</sup> Theodore A. Coulombis, dan James A. Wolfe, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, (Bandung: Abardin, 1990), hlm. 198.

<sup>25</sup> Untuk memahami Paradigma Human Security dan Relevansinya bagi Indonesia dapat dibaca pada Anak Agung Banyu Perwita, "Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003, No. 1, hlm. 70 – 76.

dalam perkembangannya, khususnya setelah Perang Dingin Berakhir, Paradigma Keamanan Nasional sudah kurang relevan lagi diterapkan dalam menghadapi ancaman keamanan yang baru. Sebuah ancaman baru yang target serangannya tidak pada wilayah nasional, melainkan pada hati, pikiran dan jiwa manusia yang ada di dalam wilayah nasional suatu negara. Jadi, wujud ancamannya abstrak dan sifat ancamannya fisik-psikis. Secara konseptual-teoritik, ancaman non konvensional ini dikenal dalam literatur ilmu Hubungan Internasional dengan nama “Keamanan Manusia”.<sup>26</sup> Dalam pandangan penulis, ancaman baru ini disebut dengan “Perang Modern” sebagaimana telah diungkapkan di atas.

Tabel berikut ini akan menguraikan secara lebih mendalam perbedaan antara paradigma keamanan nasional dan keamanan manusia.

**Tabel XI.5**  
**Perbedaan Paradigma Keamanan Nasional**  
**dan Keamanan Manusia**

<b>Unsur Perbedaan</b>	<b>National Security</b>	<b>Human Security</b>
Eksistensi	Masa Perang Dingin	Pasca Perang Dingin
Unit Analisis	State	Individu
Target	Wilayah, Teritorial	Hati, Pikiran, Jiwa
Basic Needs	Kebutuhan fisik dasar	Kebutuhan psikis dasar
Sifat	Fisik, Statis	Psikis, Dinamis
Wujud	Kongkret, Empiris, Riel	Abstrak, Laten, ideal
Jenis	Tradisional, Konvensional	Non tradisional, Non Konvensional
Dimensi	Militer	Ekonomi, Sosial, Politik, Komunitas, Personal, Lingkungan

<sup>26</sup> Landry Haryo Subianto, “Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek”, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.1, hlm. 104 – 110.

Ancaman	Invasi dan Agresi Militer yang dilakukan oleh aktor negara	Transnational Organized Crime, pelanggaran HAM, Kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, degradasi lingkungan yang dilakukan oleh aktor non negara
Solusi	Dihadapi dengan Kekuatan Bersenjata	Dihadapi dengan membentengi diri pembangunan kapasitas berkelanjutan dan penegakan demokrasi dan HAM melalui kerangka nilai-nilai spiritualitas

Sumber: Data diolah dari berbagai referensi.

## 7. Teori Kecerdasan Manusia<sup>27</sup>

Pada awalnya Kecerdasan Manusia ditemukan dan dikembangkan secara terpisah yang terdiri dari Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ). Teori ini dipelopori masing-masing oleh Howard Gardner (PD I), Daniel Goleman (1995), V.S. Ramachandran, Michael Persinger, Wolf Singer, dan Rodolfo Llinas; juga Danah Zohar dan Ian Marshall, Paul D. Edwards, Michael Levin. Namun secara terintegrasi teori ini kemudian dikembangkan oleh Ary Ginanjar (2001 dan 2003). Kata kunci utama teori ini adalah IQ (kecerdasan intelektual) terefleksi sebagai kekuatan fisik manusia; EQ (kecerdasan emosional) terefleksi sebagai keinginan untuk

<sup>27</sup>Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, (Jakarta: Penerbit Arga, 2001).

berkuasa; dan SQ (kecerdasan spiritual) terefleksi sebagai kesadaran bahwa kekuasaan manusia sangat temporer dan kekuasaan Tuhan lah yang abadi. Asumsi dasarnya adalah bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, hendaklah manusia menyadari adanya pusat kekuasaan (Tuhan = God Spot = SQ) yang mengendalikan sifat-sifat kekuasaan (EQ) dan kemampuan intelektual (IQ) manusia. Artinya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk cara-cara berperang dalam mengembangkan kekuasaannya hendaknya berbasis spiritual, bukan didasarkan pada ambisi-ambisi manusia yang sifatnya pemenuhan hawa nafsu, seperti popularitas, materialis, hewani, dan sebagainya. Kasus: Berbagai peperangan yang terjadi di jaman Nabi-Nabi. Semuanya mencerminkan nuansa spiritualitas. Sebagai contoh, tidak kurang dari 1000 kali peperangan di jaman Nabi Muhammad SAW, semuanya bersandar pada penegakan kebenaran hakiki yaitu kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini Perang Badar dan Perang Uhud yang merefleksikan bagaimana Muhammad mencontohkan implementasi peperangan sifatnya ke dalam dan keluar. Ke dalam adalah melawan hawa nafsu, dan keluar mengajak pihak lain berada dalam kebenaran.

## **G. Dampak “Perang Modern” terhadap Menurunnya Nasionalisme**

Pengaruh “Perang Modern” terhadap menurunnya nasionalisme bangsa Indonesia dapat dilihat dari indikator panca gatra berikut ini:

### **1. Gatra Ideologi**

Mulai lunturnya semangat dan keyakinan akan jiwa Pancasila di sebagian besar rakyat Indonesia. Pemahaman terhadap ideologi Pancasila hanya sebatas pada penghafalan, namun belum

pada tataran implementasi dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan ada upaya-upaya dari beberapa pihak untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

## **2. Gatra Politik**

Munculnya berbagai gejala beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau gejala disintegrasi dan separatisme, seperti di Aceh, Papua, dan Maluku merupakan gambaran nasionalisme bangsa yang semakin menipis. Selain itu, tidak terciptanya konsensus nasional antar elit yang kemudian berakibat pada terfragmentasinya kekuatan-kekuatan politik dan sebagian demonstrasi mahasiswa yang sudah tidak murni lagi memperjuangkan rakyat merupakan gambaran umum kondisi carut marutnya perpolitikan bangsa.

## **3. Gatra Ekonomi**

Krisis ekonomi regional yang kemudian merembet ke Indonesia telah menghancurkan sendi-sendi dasar perekonomian Indonesia sehingga menciptakan berbagai permasalahan seputar kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan. Masuknya IMF, bercokolnya perusahaan asing, privatisasi terhadap BUMN, penjualan aset strategis bangsa, disusul dengan *Capital flight* dan hancurnya sistem perbankan merupakan sedikit gambaran kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang sedang dalam krisis. Bahkan, timbul kecenderungan manusia-manusia ekonomi telah menjadikan kapitalisme sebagai tuhan baru. Akibatnya adalah lahirnya kondisi ekonomi yang "*hipercommodity*", "*hyperfunction*", dan "*hipersignification*".

#### **4. Gatra Sosial Budaya**

Semangat gotong royong dan tenggang rasa yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia telah mengalami penggerogotan oleh nilai-nilai individualisme Barat sehingga sangat mempengaruhi gaya hidup dan pola hidup bangsa Indonesia, terutama kaum mudanya. Budaya pop (*Pop culture*) telah berhasil menggantikan budaya timur (*Rest culture*). Budaya lokal-nasional telah tergusur oleh proyek “uniformisasi budaya” global Barat. Karakter ego etnis merupakan titik rawan terjadinya konflik antar etnis. Akibatnya, manusia mulai menuhankan Postmodernisme sebagai tuhan baru yang kemudian semakin mengucilkan dan memenjarakan manusia dalam gerakan implosi yang bebas nilai.

#### **5. Gatra Pertahanan dan Keamanan**

Adanya embargo persenjataan oleh AS telah melemahkan sistem pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia sehingga membuat TNI agak kesulitan dalam melengkapi dirinya dengan peralatan yang dibutuhkan, dihadapkan kepada luasnya wilayah yang harus dijaga yakni keseluruhan integritas wilayah Indonesia. Hal ini dapat dicontohkan dengan masuknya enam pesawat udara militer AS di Pulau Bawean tahun lalu yang tidak bisa dicegah oleh TNI. Selain itu, pencurian atas kekayaan laut oleh negara asing juga sulit diantisipasi oleh TNI. Keterbatasan anggaran pertahanan juga menjadi salah satu hal yang ikut melemahkan kehandalan kinerja TNI. Diperparah lagi dengan isu pembubaran Koter yang memperlemah TNI dan kejahatan trans nasional di wilayah perbatasan.

## H. Solusi Menghadapi "Perang Modern"

1. Membangun Komitmen Kebangsaan dalam konteks membangun masyarakat dan manusia seutuhnya. Kepemimpinan sebagai titik sentral, pemimpin harus memiliki komitmen intelektual, emosional dan spiritual.

a. Rekonsiliasi Nasional

Tujuan rekonsiliasi adalah kesamaan visi dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Sasarannya adalah terjadinya perubahan sikap, pulihnya hubungan antara pihak yang berbeda serta satunya persepsi mengenai "Perang Modern" sebagai ancaman nasional.

b. Revitalisasi Wawasan Kebangsaan

Memulihkan nilai-nilai nasionalisme dan pemaknaan jati diri bangsa melalui sumpah pemuda yang berbasis spiritual.

2. Mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara

a. Pancasila sebagai acuan kritis dan etika politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Membangun kedaulatan rakyat.

c. Memantapkan pengakuan terhadap pluralisme.

d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

e. Meningkatkan sistem pertahanan negara.

f. Mengembalikan kedaulatan negara setara dengan negara maju.

Eksistensi "Perang Modern" telah mempengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menggoyahkan semangat wawasan kebangsaan. Dari solusi yang telah diuraikan di atas, sudah selayaknyalah segenap komponen bangsa menaruh perhatian terhadap kondisi dan posisi generasi muda dalam konteks Perang Modern. Pemuda adalah

generasi penerus bangsa dan tulang punggung negara. Pemuda adalah agen pembaharuan yang mempunyai posisi strategis dalam dinamika sejarah bangsa. Pemuda merupakan gerakan moral yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kondisi dan posisi strategis inilah yang harus dijadikan penangkal dalam menghadapi perang modern, bukan malah menjadi agen bagi negara dalam menggelar Perang modern.

Revitalisasi wawasan kebangsaan dengan platform spiritualisme merupakan salah satu solusi dalam menghadapi “Perang Modern”. Untuk menghadapi “Perang Modern” (fisik dan psikis), perlu perumusan kebijakan publik yang mengarah pada kesadaran terwujudnya rekonsiliasi dan revitalisasi wawasan kebangsaan dengan fokus pada tiga pilar pembangunan yakni “*state, nation, dan character building*” yang berbasis spiritual.

Pemberdayaan empat pilar kebangsaan, seperti Pancasila, UU NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, harus menjadi paradigma dalam membentengi diri di tengah serangan Perang Modern. Pemanfaatan teknologi informasi, dunia maya, dan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci memenangkan perang modern. Sinergitas antar komponen bangsa harus dikedepankan dan mendapatkan prioritas serta kesampingkan ego sektoral antar lembaga, institusi dan kelompok dalam menahan gempuran perang modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subagyo, "Menelanjangi Kapitalisme Global", *Pikiran Rakyat*, 21 November 2003.
- Agus Subagyo, "Terorisme Dalam Hubungan Internasional," *Pikiran Rakyat*, 1 November 2002.
- Alex Schmid, *Political Terrorism: A Research Guide*, (New Jersey: Trans Action Books, 1984).
- Alexander Love, *Development Cooperation*, (Paris: OECD, 1994)
- Alvin Y. So dan Suwarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994); Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Amien Rais, "Pengantar", kata pengantar dalam buku *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Amir Tahery, *Holy Terror: The Inside Story of Islamic Terrorism*, (London: Sphere Books Limited, 1987).
- Annual Report of the ASEAN Standing Committee*, 1983-1984, hlm. 80.
- Anthony Giddens, *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, (terjemahan), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan: Studi Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1992).
- Barrington Moore, *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, (Boston: Beacon Press, 1966).
- Bob S. Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).

- Christopher Greenwood, "The Concept of War in Modern International Law", *International and Comparative Law Quarterly*, No. 36, 1987.
- Claire Sterling, *The Terror Network*, (Holt: Rinehart & Winston, 1981).
- D. Bouchier, *The Feminist Challenge: The Movement for Women's Liberations in Britain and The United States*, (London: Macmillan, 1983).
- Paul-Heinz Koesters, *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987).
- David Potter, "The Democratizations of Third World States", dalam Tim Allen dan Thomas (ed.), *Poverty and Development in the 1900s*, (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Denis Osborne, "Action For Better Government", A Role For Donors, *IDS Bulletin*, Vol. 24, No. 1 (1993).
- Edy Prasetyono, *Hak Asasi Manusia Dalam Hubungan Internasional*, (Jakarta: CSIS, 1992).
- Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, (Yogyakarta: Qalam, 2001).
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terjemahan), (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Georg Sorensen dan Robert Jackson, *Introductions of International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter, *Transition From Authoritarian Rule: Prospect for Democracy*, (Baltimore, Md.:: John Hopkins University Press, 1986).
- H. A. Masyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Hasnan Habib, *Kapita Selekta Hubungan Internasional*, (Jakarta: CSIS, 1997).

- I Nyoman Sudira, "Globalisasi dan Studi Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar Pemahaman Politik Dunia Kontemporer", *Jurnal Pacis*, Tahun 1 / Juni 2003.
- International Forum On Globalization, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, (terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Rakyat Cerdas, 2003).
- Jacqui True, Feminism, dalam Scoot Burchill dan Andrew Linklater (ed.), *Theories of International Relations*, (London: Macmillan Press Ltd, 1996).
- Jame Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21* (terjemahan), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003).
- James Adams, *The Financing of Terror: How the Group That Are Terrorizing the World Get the Money to Do It*, (New York: Simon & Schuster, 1986).
- John Nasibit, *Global Paradox* (terjemahan), (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).
- Kenichi Ohmae, *Borderless World*, (New York: 1995).
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti Budi Utama, 2003).
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti Budi Utama, 2003).
- Laksamana Sukardi "Relasi Negara dan Pasar dalam Sistem Global", *Jurnal Media Inovasi*, No. 2, Thn. X/2000, hlm. 22-23.
- Larry Diamond, Juan J. Linz dan Seymour Martin Lipset (ed.), *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences With Democracy*, (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1990).
- Makarim Wibisono, World Summit On Sustainable Development: Jawaban Atas Permasalahan Dunia?, Perspektif Dunia, dalam *Jurnal Global*, Vol. 5, No. 1, November 2002

- Martin Griffith dan Terry O' Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2002).
- Martin Khor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan* (terjemahan), Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2002)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990).
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Mohtar Mas'ued, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Mohtar Mas'ued, *Ekonomi Politik Pembangunan*, Dikatat Kuliah, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2001).
- Mohtar Mas'ued, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Mohtar Mas'ued & Riza Noor Arfani (ed.), *Isyu-Isyu Global Masa Kini*, (Yogyakarta: PAU- Studi Sosial, 1990).
- Munawar Ahmad Annes, *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, (Bandung: Mizan, 1991).
- Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, terjemahan dari *Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World*, pent. Hamid Basyaib, (Bandung: Mizan, 1991).
- Nurul Isnaeni, Bank Dunia, Indonesia, dan Politik Lingkungan Global: Mencermati Agenda Pembangunan Berkelanjutan, dalam *Jurnal Global*, Vol. 1, No. 7 Tahun 2001.
- Oka A. Yuti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1983).

- Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *“International Relations Theory: Realism, Pluralism, and Globalism”*, (London: Maxwell Macmillan, 1987).
- Richard Robison, *“Authoritarian States, Capital-owning Classes, and the Politics of Newly Industrializing Countries: The Case of Indonesia”*, *World Politics*, Vol. 41, No. 1 (Oktober 1988).
- Robert Dahl, *Polyarchy: Participations and Oppositions*, (New Heaven: Yale University Press, 1979).
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2002).
- Safrudin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002).
- Saleh Sahab, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Refika Aditama, 1982).
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terjemahan), (Jakarta: Grafiti Press, 1995).
- Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratizations in the Late Twenty Century*, (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).
- Sedarmayanti, *Good governance (Tata Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar maju, 2003).
- Sekarwarsini Djelantik, *Terorisme Internasional: Aktor Bukan Negara dalam Hubungan Internasional*, dalam Andre H.

- Pareira (ed.), *Perubahan Global dan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Seymour Martin Lipset, *Political Man: Social Bases of Politics*, (New York: Anchor, 1963).
- Sutejo Atmowasito, "Demokrasi: Suatu Tinjauan Deskriptif dan Komparatif", dalam *JISIP*, No. 1/Volume 1/April 1994.
- Sutejo Atmowasito, "Terorisme Internasional: Pengertian, Bahaya, dan Pencegahannya," *Honesties Vivere*, Jakarta: UKI, 1993.
- Suzanne Taschereau dan Jose Edgardo L. Campos, *Building Government-Citizens-Business Partnerships*, (Ottawa, Canada: Institute of Governance, 1997).
- The Merriam Webster Dictionary*, (New York: Merriam Webster Inc., 1994).
- United Nations Development Programme, *Participatory Local Governance, Technical Advisory Paper I*, Local Initiative Facility for Urban Environment (LIFE), (New York: 1997).
- Valerie Bryson, *Feminist Debates Issues of Theory and Political Practice*, (London: Macmillan, 1999).
- Vernon Van Dyke, *Political Science: A Philosophical Analysis*, (Stanford: Stanford University Press, 1960).
- Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster New World Cleveland, 1984).
- Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia Baru*, (terj.), (Jakarta: Gramedia, 1993).
- Yang Hui, "On Current International Terrorism and Struggle against It," *International Strategic Studies*, No. 1, (China Institutes for International Strategic Studies, January, 2002).
- Alfred Stephan, *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*, (Princeton: Princeton University Press, 1971).

- Anak Agung Banyu Perwita, "Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003, No. 1.
- Ari Sujito dan Sutoro Eko (ed.), *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2002).
- Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*, (Cornwall: Harvester Wheatsheaf, 1991).
- Barry Posson, *The Source of Military Doctrine*, (Ithaca: Cornell University Press, 1994).
- George Mac Lean, "The United Nations and the New Security Agenda", dalam <http://www.unac.org/canada/security/maclean.html>.
- Landry Haryo Subianto, "Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek", *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.1.
- Philip Jusario Vermonte, "Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya", *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No. 1.
- Poltak Partogi Nainggolan, "Terorisme dan Perspektif Keamanan Pasca Perang Dingin, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.1.
- Syarifudin Tippe, "Perang Modern", makalah yang disampaikan dalam seminar ASPAC on ASET bertema *Meningkatkan Kompetensi SDM Sebagai Pendidik, Pelatih, Peneliti & Pengembangan yang Dilandasi Oleh Art, Science, Engineering, and Technology*, yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung pada hari Kamis, 7 Oktober 2004 di Universitas Parahyangan Bandung.
- Tempo, 27 September 2004

## BIODATA PENULIS



Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Syarifudin Tippe, S.IP, M.Si, lazimnya, nama Syarifudin ditulis dengan dua *d*. Atas dasar itu, pria kelahiran 7 Juni 1953 ini selalu mengecek ulang penulisan namanya yang sering salah ditulis. Hal ini sudah lumrah terjadi sejak menempuh pendidikan SD, SMP dan SMA di kota kelahirannya Sinjai, Sulawesi Selatan. Setelah itu, Syarifudin muda melanjutkan ke AKABRI Darat yang diselesaikan pada 1975.

Usai Taruna, Putra Makassar ini ditempatkan di berbagai bidang dan daerah. Antara lain sebagai Danton, Pa Intel Ops, Wadan Den Zipur, Anjungan-Kalbar (1976-1985), Gumil Gol VI dan Kasi Taktik Depmilum Pusdikzi-Bogor (1998-1989). Wadan Yonzipur 2 Dam II Sriwijaya Prabumulih Sumatera Selatan (1992-1993). Dosen Gol V Seskoad Bandung (1993-1995), Spri Pangab ABRI-Jakarta (1995-1997). Danpusdikzi Ditziad Bogor (1997-1999). Danrem 012/Teuku Umar (1999-2001), dan setelah KRA 34 Lemhannas (2001) pada tahun 2002-2003 menjadi Kasdam Iskandar Muda. Pada tahun 2003 diamanahkan Sebagai Wadan Seskoad dan 4 bulan setelah itu diangkat sebagai Danseskoad sampai dengan 2007. Setelah itu, penulis diangkat menjadi Pangdam II/Sriwijaya pada tahun 2007 - 2009, selanjutnya menjadi Dirjen Strahan Kemhan tahun 2009 - 2011, dan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) tahun 2011 - 2013, Rektor Universitas Ibnu Khaldun 2013 - 2014 dan menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Jaya Baya Jakarta 2014 - sampai sekarang.

Selain aktif di lapangan, Syarifudin juga aktif belajar dan mengajar. Boleh dikatakan, dia tergolong Perwira Akademik. Menamatkan Seskoad pada tahun 1990, mengikuti Sesko *Comparative* di Amerika Serikat pada tahun 1992 dan DMS (*Defence Management Seminary*) di Australia pada tahun 1994. Sementara itu gelar S1 diraihinya dari Fisip UT (1995), S2 dari Universitas Jayabaya, dalam konsentrasi Hubungan Internasional (1998), dan S3 dari Universitas Negeri Jakarta (2012).

Tentang karya tulis yang pernah dihasilkan yaitu "*Sekilas Informasi tentang Secabaregzi*" (1987), *Strategi Perang di Kepulauan Solomon* (1989), *Upaya Pencegahan Kemungkinan Timbulnya Pertikaian Perbatasan terhadap Perkembangan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kawasan Laut Cina Selatan* (1990), "*Analisa Perang Teluk*" (1990), "*Aktualisasi Perang Malvinas, Suatu Tinjauan dari Aspek Zeni*" (1991), *Perilaku Cina pada Era Pasca Perang Dingin di Kawasan Asia Pasifik, Sebuah Evaluasi Kritis* (Tesis di Universitas Jayabaya, Jakarta, 1998), *Antagonisme Masyarakat Aceh Terhadap TNI, Introspeksi dalam Perspektif HAM dan Demokrasi* (Mei 2000), *Aceh di Persimpangan Jalan* (Nopember 2000), *El-Hurr: Nurani untuk Aceh* (April 2001), *Implementasi Karakter Bangsa, Kritik dan Solusi* (2003), *Kegelisahan Moral Bangsa Indonesia dalam prespektif Spiritual* (2004) dan sebagai pembicara dalam Seminar, Lokakarya dan mengajar ke berbagai Instansi baik Militer, Sipil, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi sebanyak 36 kali dengan judul *Bangsa Indonesia terjebak "Perang Modern"*.



Agus Subagyo, lahir di Sukoharjo, 18 April 1978. Memperoleh gelar Sarjana (S.IP.) dalam Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2000. Gelar Magister (M.Si.) diperoleh dari Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Gelar Doktor Ilmu Politik (Dr.) diperoleh dari FISIPOL UGM tahun 2013.

Semasa mahasiswa aktif dalam Study Club, seperti GEMAK Study Club dan FELSYS Study Club. Di samping itu, pernah menjadi Redaktur Pelaksana pada Buletin MERCUSUAR dan TEROPONG yang mengkaji masalah-masalah Politik Internasional. Tercatat sebagai Tentor Sejarah dan Geografi pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) "Milenium" Yogyakarta tahun 2000-2001. Pernah pula aktif pada Kelompok Kerja Pemberdayaan Agrotani (KKPA) Pokja Segoro Gunung (2001).

Pengalaman penelitian yang dilalui penulis adalah Asisten Peneliti di Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS-PSP) UMY (2000-2001), staf peneliti pada Center for Democracy and Conflict Management Studies (CDCMS) Yogyakarta (2000-2002), dan Wakil Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Masyarakat Sipil (PS-DMS) Yogyakarta (2001-2003), staf peneliti pada Pusat Studi Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan, UNJANI (2002- 2007), Ketua Pusat Kajian Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (PK3) FISIP UNJANI (2006-2010).

Pengalaman mengajar di beberapa perguruan tinggi, antara lain, mengajar di FISIP Universitas Langlang Buana (2007-2009), Dosen Non Organik di Sesko TNI (2004-2007), Dosen Non Organik di Pusdikintel Polri (2008-2010), Dosen Non Organik di Seskoad

(2003–Sekarang), mengajar di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani Cimahi, dan di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Sentul Bogor sampai dengan sekarang. Pengalaman jabatan struktural yang pernah diemban adalah Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNJANI (2010-2011), Wakil Dekan I FISIP UNJANI (2011-2013), dan Dekan FISIP UNJANI (2012-2014). Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Cimahi.

Buku yang pernah ditulis adalah *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi: Kebijakan atas Krisis dalam Tinjauan Sistem Moneter Internasional*, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003; Kontributor dalam buku: *Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern*, Penerbit Seskoad, Bandung, 2004; *Pancasila untuk Mahasiswa Kedokteran*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014; *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015; *Teroris(me): Aktor dan Isu Global Abad XXI*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015. Pernah menulis artikel yang dimuat di harian Kompas, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Bernas dan Radar Jogja. Penulis bisa dihubungi via email: [subagyoeti@yahoo.com.au](mailto:subagyoeti@yahoo.com.au) dan [subagyo@scientist.com](mailto:subagyo@scientist.com). Kunjungi pula blog penulis di: [www.agussubagyo1978.wordpress.com](http://www.agussubagyo1978.wordpress.com).